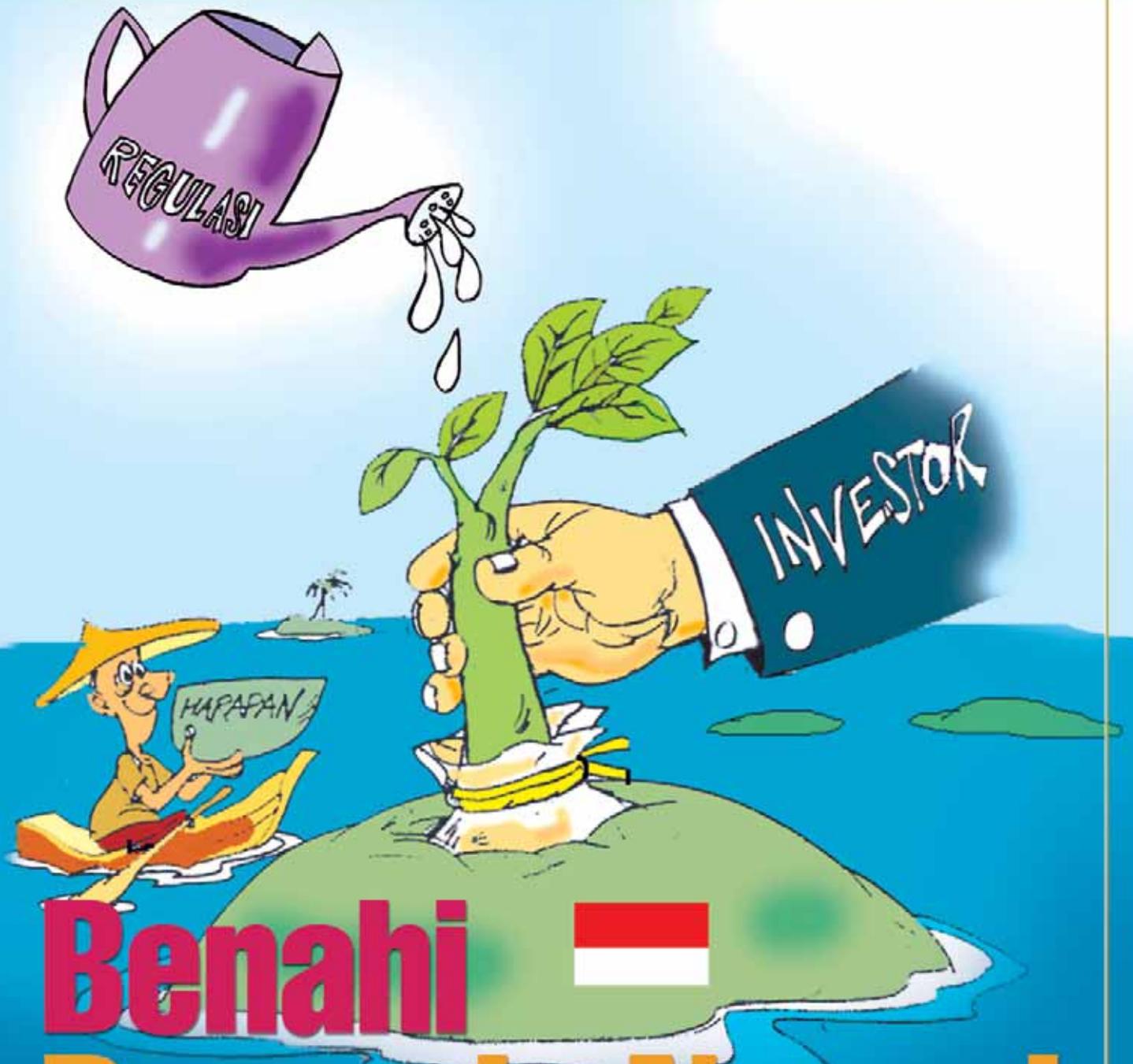


GLOBALISASI DAN PENDIDIKAN: APA ARTINYA BAGI INDONESIA?

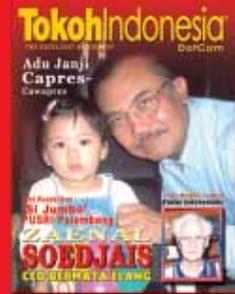
BERITA INDONESIA[®]

Edisi 11/Th.I/ 7 - 20 April 2006

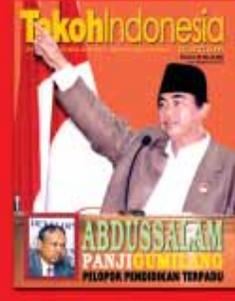
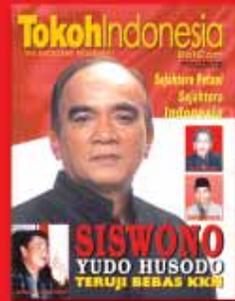
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)



Benahi Beranda Negeri



TokohINDONESIA
Majalah Biografi
Pertama dan Satu-satunya
di Indonesia



www.tokohindonesia.com

The Excellent Biography



Sampul:
Eri Irawan
Karikatur:
Dandy Hendrias

Edisi No.11/Th.I/ 7 - 20 APRIL 2006

DARI REDAKSI 4
SURAT KOMENTAR 5
HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 7
BERITA TERDEPAN 12
VISI BERITA 13

BERITA UTAMA

RAMAI-RAMAI KELOLA BERANDA INDONESIA

Upaya memberi perhatian dengan mengelola pulau-pulau kecil terluar bukan hanya berdampak ekonomi, namun juga berfungsi menjaga ketahanan dan keamanan wilayah 14



Mempertegas Batas-batas Wilayah 16
 Pulau-pulau Kecil Lebih Rawan 17
 "Kami Serius Ingin Mengelola Pulau Untuk Kesejahteraan" 18
 Dalam Kawalan Sapta Marga 20
 Pos Pengamanan TNI di Perbatasan Belum Ideal .. 21
 Pemerintah Mesti Responsif-Rasional 22
 Mendorong Investor 23
 Inilah 12 Pulau Terluar 24
 Membenahi Natuna 26

BERITA OPINI

Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, MSc, Ph.D 27

BERITA WAWANCARA

Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. 28

BERITA NASIONAL

Multidimensi Masalah di Papua 30

Longsor itu Meminta Korban 31

BERITA KESEHATAN

Mereka Sakit Karena Air 42



LENTERA

GLOBALISASI DAN PENDIDIKAN: APA ARTINYA BAGI INDONESIA

Kemandirian sangat mutlak diperlukan dalam menentukan arah perjalanan sebuah negara. Indonesia harus mereformasi pendidikan yang hingga hari ini belum mampu membangkitkan bangsa Indonesia 34

BERITA KHAS

Warisan Tradisi Untuk Menjaga Kesehatan 40
 Meningkatkan Daya Tahan Tubuh 42

BERITA DAERAH

Mengurai Persoalan Jakarta 44
 PT KA - ITS Siapkan SDM Handal 46
 Jalintim Trans Sumatera Makin Merana 47

BERITA HANKAM

Jurubicara Cilangkap dari Matra Laut 48

BERITA HUKUM

Dua Meneer Tak Sepakat 50
 Mereka yang Beruntung 51

BERITA POLITIK

Kontroversi Kepemimpinan di Senayan 52

BERITA PROFIL

Onggy Hianata 54

BERITA MANCANEGERA

Pemimpin Tangguh dari Timor Leste 56

BERITA EKONOMI

Lahan Indonesia, Sawitnya Malaysia 58
 85 Langkah Perbaikan Iklim Investasi 59

BERITA IPTEK

Ada XP di Dalam Apple 61

BERITA OLAHRAGA

Mengenal Three Lions di Ajang World Cup 62

BERITA PEREMPUAN

Putri Pendekar Perang 63

BERITA FEATURE

Manusia Asli Amerika 64

BERITA OBITUARI

Ramadhan KH (Alm) 65

BERITA HUMANIORA

Jejak Kaum yang Hilang 66



BERITA TOKOH

Irwan Hidayat 32



BERITA MEDIA

Amarah di Abepura 60

Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

Pemimpin Umum:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:

Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:

MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Syahbuddin Hamzah
Dandy Hendrias
Suryo Pranoto
Anis Fuadi

Redaktur Pelaksana:

Anna Fauzia Diponegoro
Mangatur Lorieicide Paniroy (Website)

Sekretaris Redaksi

Retno Handayani

Kepala Litbang dan Pusat Data:

Suryo Pranoto

Staf Redaksi:

Hapason Tampubolon
Samsuri
Nawawi
Ikhwan Triatmo
Sarjiman
Henry Maruwas
Christian Natamado
M Subhan
Sanita Retmi
Amron Ritonga
Hotman L Gaol

Wartawan Foto:

Wilson Edward

Redaktur Bahasa dan Pracetak

Marjuka Situmorang
Mangatur Lorieicide Paniroy

Desainer:

Eri Irawan, Esero Design

Biro Redaksi:

Medan: H. M. Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang **Purwakarta:** Benhard Sihite

Penerbit:

PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan
PT Citraprinsip Publisitas Indoaprint

Komisaris:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/ Pemimpin Perusahaan:

Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:

Samsuri

Iklan dan Promosi:

Imam Supriyanto
Watty Soetikno

Keuangan dan Umum:

Mangatur Lorieicide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:

Abdul Halim
Marjuka Situmorang

Harga:

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:

PT Gramedia
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 9101871

E-mail:

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:

www.beritaindonesia.co.id



DUET PEREMPUAN: Jurnalistik kedua perempuan ini dipilih untuk menerapkan etos kerja perempuan, yang dinilai banyak pihak lebih teratur, telaten dan berdisiplin.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera untuk Kita Semua,

Sidang Pembaca yang budiman! Dalam upaya meningkatkan mutu majalah ini, kami terus melakukan pembenahan, di antaranya dalam bidang organisasi kerja redaksi. Pelaksanaan kerja di dapur redaksi, dipimpin oleh dua orang perempuan. Duet itu adalah Anna Diponegoro dan Retno Handayani. Selain karena kapasitas jurnalistik kedua perempuan ini, mereka dipilih untuk menerapkan etos kerja perempuan, yang dinilai banyak pihak lebih teratur, telaten dan berdisiplin. Tentu saja terlebih penting adalah profesionalisme keduanya sebagai jurnalis yang berdedikasi, loyal dan memahami visi majalah ini: Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian.

Anna, bernama lengkap Anna Fauzia Fetty Diponegoro, yang akrab kami panggil Ibu Anna, ibu dari dua anak dan isteri dari seorang abdi negara di sebuah lembaga strategis, adalah sebagai komandan yang bertanggung jawab sebagai Redaktur Pelaksana. Sebelumnya, dia telah berpengalaman sebagai Redaktur Pelaksana di penerbitan khusus wanita. Namun sesungguhnya dia sangat berminat masalah politik dan komunikasi. Maklum dia adalah lulusan S1 Jurusan Komunikasi Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta (1993).

Sedangkan Retno Handayani, sebagai Sekretaris Redaksi, masih lajang, sudah delapan tahun menjadi wartawan majalah berita. Gadis 'manja' ini akrab dipanggil Eno, saja. Dia lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, maka dia pun bertugas sebagai *desk* rubrik berita hukum.

Di tangan kedua jurnalis perempuan ini etos kerja perempuan tengah 'menguasai' kebiasaan para pria dengan perasaan superioritas kelaki-lakiannya, paling tidak di dapur redaksi majalah ini. Dan, ternyata, keduanya dapat mengendalikan berita politik, yang oleh sebagian lelaki diklaim sebagai domainnya. Demikian Pembaca, sekelumit dapur redaksi.

Pada Edisi 11 ini, kami menampilkan berita perihal ribuan pulau-pulau terluar Indonesia, yang dalam tahun terakhir sebagian di antaranya diklaim dan dikuasai pihak asing. Demi Indonesia Raya yang kuat, kami merasa penting mengangkat berita ini, yang dipicu beberapa pemberitaan akhir-akhir ini, di antaranya masalah pulau Bidadari, Sipadan dan Ligitan, serta Blok Ambalat. Dan sejumlah berita lainnya. Selamat membaca!

Wassalamu'alaikum Wr., Wb.



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sbb:

- http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
- email: redaksi@berindo.com
- surat: Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840 Telp. (021) 70930474, (021) 83701736 Fax. (021) 9101871

Jangan Hancurkan Jayapuraku

Saya kelahiran Jayapura tahun 1981. Saya selalu membanggakan pulau Cendrawasih di depan teman-teman saya orang Indonesia maupun orang asing, walaupun saya bukan asli orang Irian, melainkan keturunan Sunda. Sekarang ini saya sedang menuntut ilmu di Jerman. Saya tidak ingin jika nanti saya pulang ke Indonesia,

Irian sudah hancur. Karena itu saya mohon kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, jangan hancurkan pulau saya tercinta. Jangan bunuh saudara-saudara saya di sana. Dan jangan rebut kekayaan alam mereka. Mereka sama seperti kita, yaitu orang Indonesia.

Adis Hamidasarai,
sayah_ajah@yahoo.com

PLN Tidak Transparan

Sebagai pelanggan listrik, saya merasa kecewa dengan pelayanan PLN, terutama soal biaya beban sekarang ini. Di dalam struk yang diterima, tidak ada rincian beban dan segala macamnya. Perusahaan Negara ini terlalu pelit untuk mengeluarkan biaya kertas. Memang sih kalau kita terlambat bayar kemudian kita bayar di pusat dapat struk yang ada biaya beban. Saya sebagai pelanggan tidak mau menunda-nunda pembayaran tapi justru

yang rajin membayar dikasih struk yang tidak lengkap. Saya tidak tahu apa semua cabang juga menerima struk yang kecil seperti struk ATM. Kebetulan saya tinggal di Cikupa.

Istiqomah,
es-tee288@plasa.com

Rice : Indonesia Inspirasi Dunia

Benar juga ucapan Menlu Amrik itu. Sebab apa? Indonesia negeri yang sangat kaya. Dengan teknologi yang sangat canggih (satelit) mereka bisa melihat dengan jelas isi bumi Indonesia. Negeri manapun pasti *ngiler* dengan kekayaan alam Indonesia, tak terkecuali dengan Amrik yang sudah menancapkan kukunya di bumi Cendrawasih Irian Jaya dengan PT Freeport-nya. Di sana itu bukannya tembaga yang dihasilkan akan tetapi harta karun yang tak ternilai harganya seperti platinum dan emas.

Cuma yang disayangkan, kenapa SDM kita tidak dikasih kesempatan untuk mengolah sendiri hasil bumi pertiwi? Salah satu sebab adalah SDM kita belum terdidik dan ini adalah tanggung jawab pemimpin negeri ini untuk memperbaiki pendidikan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya bangsa lain *ngiler* dengan kekayaan alam Indonesia karena sudah bisa diolah sendiri. Bangsa lain kalau mau harus beli dengan harga yang ditentukan Indonesia.

Kushendratno,
thykoes@plasa.com

Kecewa Pada Penerimaan CPNS

Biar kelihatan jujur dan transparan maka penerimaan CPNS disebarluaskan melalui berbagai sumber. Bentuk formalitas inilah yang diambil sehingga masyarakat akan menilai bahwa penerimaan CPNS

BUNG WARTO



benar-benar jujur. Republik Indonesia adalah sarang kolusi dan korupsi, apapun bentuk pekerjaan pasti berkaitan dengan korupsi dan kolusi. Demikian juga penerimaan CPNS sekarang ini tidak bisa lepas dengan yang namanya kolusi dan korupsi. Seperti contoh, teman saya anaknya kerja honor di Bea Cukai dengan masa honor 1 tahun. Kebetulan yang dibutuhkan oleh instansi tersebut cuma beberapa orang saja dan yang honor juga banyak maka dibutuhkan kompetensi antar mereka. Hasilnya bisa ditebak walaupun sama-sama honor 1 tahun dan nilai kompetensi sama maka keputusan yang diambil adalah mereka yang bisa menyogok sampai 20 jutaan dan punya koneksi dengan kepala kantor. Sampai kapanpun manusia Indonesia selalu korup.

Ika N K,
ichachantik@yahoo.com

Registrasi Prabayar Gagal Terus

Kalau benar bulan April 2006 pemerintah memberlakukan telepon genggam prabayar wajib daftar, maka banyak sekali pengguna kartu prabayar baik seluler maupun CDMA merasa dirugikan. Karena sampai dengan saat ini sudah berulang kali saya mencoba mendaftar sesuai dengan kemauan pemerintah dengan mengirimkan SMS ke 4444 ternyata tidak pernah berhasil. Alasannya belum lengkap melulu.

Yang lengkap itu yang bagaimana? Berikan contohnya dong cara registrasinya. Saya berharap pemerintah jangan merugikan pelanggan prabayar baik itu seluler maupun CDMA. Batas waktu yang diberikan pemerintah kepada pengguna kartu prabayar sangat singkat melihat sering gagalnya registrasi (pendaftaran). Mohon kiranya pe-

merintah mengkaji ulang keputusan Menkominfo Nomor 23/M/10/2005 tanggal 28 Oktober 2005. Mohon kiranya Menkominfo bisa memberikan contoh registrasi yang benar (cara penulisannya) lewat media elektronik atau cetak.

Iwan N, iwan_n@plasa.com

SBY JK

Semua Bencana Yang Ada Rakyat Jadi Kelaparan. Pemimpin Indonesia tidak pernah mengambil pelajaran dari negara tetangga, seperti di Korea, PM Lee mengundurkan diri setelah didemo oleh masyarakat gara-gara main golf saat hari mogok nasional. Di Indonesia, didemo kayak apa saja, pemimpin kita anteng-anteng saja. Misal ada warga yang demo dengan menjahit mulut mereka menuntut SUTET. Sampai matipun pemimpin kita tidak pernah menghiraukan. Pemimpin kita su-

dah budek dan tuli.

Sarno P, gajkt@skill.co.id

TDL Tak Naik, Rakyat Senang

'Hantu' kenaikan TDL yang dirasakan akan membebani masyarakat akhirnya bisa digagalkan. Pemerintah berani mengambil langkah tersebut dengan konsekuensi memangkas pengeluaran departemen. Sebagaimana dikatakan Presiden SBY, setelah dihitung masak-masak, pemerintah menarik kesimpulan bahwa kenaikan TDL akan memukul sektor swasta dan masyarakat ekonomi lemah. Beban dunia usaha sebelumnya telah cukup berat dengan naiknya BBM akhir tahun lalu. Belum lagi dengan berbagai biaya 'siluman' yang tak terlihat, tapi dirasakan memberatkan oleh pengusaha.

Setelah TDL dipastikan tidak naik, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) langsung memberikan respon positif terhadap kebijakan pemerintah ini. Menurut Kadin, tidak naiknya TDL akan menjaga keseimbangan pelaku usaha. Dikhawatirkan, jika TDL naik maka akan menekan biaya produksi. Dengan sendirinya, kenaikan biaya produksi tersebut akan mengurangi margin keuntungan pengusaha yang bersangkutan. Belum lagi ancaman PHK massal yang sempat diteriakkan berbagai kalangan jika TDL naik.

Begitu pun bagi masyarakat bawah. Kelompok masyarakat ini tidak memiliki banyak pilihan selain menerima keadaan. Konsekuensi pembatalan kenaikan TDL dengan memangkas anggaran departemen juga tepat. Selama ini departemen-departemen menjadi lembaga yang tidak efektif dengan program-program yang sekadar menghabiskan anggaran. Ini merupakan kebijakan yang menyejukkan semua pihak di tengah upaya bangkit dari krisis.

Zumna Nabila,
zumna_nabila@yahoo.co.id

PASTIKAN

TARIF IKLAN BERITAINDONESIA®

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwisata	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimmed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimmed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimmed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimmed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimmed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimmed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000

Iklan kupung (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan @ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:

Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736 Fax. 9101871

▶ 16/03/2006

Abepura Berdarah

Aksi massa yang memblokir jalan di depan Kampus Universitas Cenderawasih, Abepura, Jayapura, berubah brutal dan rusuh. Empat aparat tewas dan 19 lainnya luka-luka. Dari pihak massa, empat orang luka-luka dan 40 orang lainnya ditahan. Kerusakan berawal saat aparat kepolisian membubarkan massa yang memblokir jalan poros Jayapura-Sentani, berkaitan dengan penolakan atas keberadaan PT Freeport Indonesia (FI) di Tembagapura. Menghadapi itu, massa bertindak brutal, yakni melempari aparat dengan batu, membacok, bahkan mengeroyok beberapa polisi. Tiga anggota Brimob Kepolisian Daerah Papua, yaitu Bripka Sulaiman Daud, Briptu Arizona, dan Brigadir Sudirman, serta seorang anggota TNI Angkatan Udara, Serda Agung, tewas berlumuran darah. Buntutnya, polisi menahan sekitar 40 orang di Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura, termasuk pemimpin pengunjung rasa, Jefry Pagawak.

▶ 17/03/2006

Delapan Debitor BLBI Bisa Bebas

Pemerintah akan membebaskan delapan debitor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dari tuntutan hukum jika mereka membayar 100 persen utang-

nya hingga akhir tahun 2006 dengan uang tunai atau surat berharga yang likuid. Surat berharga likuid (*near cash*) yang dimaksud ialah Surat Utang Negara atau Sertifikat Bank Indonesia. Dalam hal pembayaran dengan kombinasi tunai dan *near cash* dibatasi 70 persen tunai dan 30 persen *near cash*. Proses perhitungan utang kedelapan debitor itu dilakukan Tim Koordinasi Penanganan PKPS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menkeu Nomor 88/KMK.01/2006. Tim itu terdiri atas Tim Pengarah yang beranggotakan Menko Perekonomian, Menkeu, Jaksa Agung dan Kepala Polri. Tim Pelaksana terdiri atas wakil dari kantor Menko Perekonomian, Depkeu, Polri, Kejugung, dan Bappenas.

▶ 18/03/2006

Milosevic Dimakamkan

Mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic dimakamkan di kampung halamannya, Pozarevac. Ia memang dipuja warga Serbia tetapi juga dihujat pihak lain mungkin hingga akhir zaman. Milosevic meninggal pekan lalu di selnya di tahanan Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda. Milosevic merupakan kepala negara pertama yang diekstradisi ke Pengadilan Internasional. Milosevic diadili atas tuduhan melakukan pemusnahan golongan bangsa, kejahatan

perang dan kejahatan atas kemanusiaan karena peranannya dalam perang-perang Balkan pada 1990-an. Menurut hasil otopsi yang dilakukan para dokter Belanda dan disaksikan ahli pathologi Serbia, penyebab kematian Milosevic adalah tidak berfungsinya sebagian otot jantung yang menyebabkan berhentinya pemompaan darah dari dan ke jantung sehingga kerja jantung terhenti.

▶ 19/03/2006

Demo di New York dan Seluruh Dunia

Bergabung dengan rekan-rekan mereka di berbagai negara di dunia, demonstran berunjuk rasa di Times Square, New York, memperingati tiga tahun invasi militer pimpinan AS ke Irak. Tuntutan utama mereka, ditariknya pasukan asing dari Irak. Puluhan ribu orang di seluruh dunia memprotes perang di Irak, Sabtu dan Minggu (19/3), dengan demonstrasi di Eropa menarik lebih banyak massa dibandingkan demonstrasi di AS. Demonstrasi menandai tiga tahun perang yang menggulingkan rezim Saddam Hussein itu berlangsung saat sentimen antiperang di AS tinggi dan popularitas Presiden George W Bush, arsitek perang itu, anjlok. Unjuk rasa di AS diadakan di New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, dan sejumlah kota lebih kecil oleh beberapa kelompok termasuk koalisi

KarikaturBerita

ANSWER (*Act Now to Stop War and End Racism*).

▶ 20/03/2006

SK Direvisi, Organda Stop Mogok

Pemerintah sepakat merevisi Surat Keputusan Menteri Keuangan No 527/KMK 03/2003 tentang Jasa Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenai Pajak. DPP Organda mengakhiri pemogokan di empat pelabuhan utama Indonesia pukul 21.00 WIB. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pemerintah yang diwakili Menteri Perhubungan (Menhut) M Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu ketua DPP Organisasi Pengusaha Angkutan Darat Murphy Hutagalung di Kantor Ditjen Pajak Jakarta. "Kendaraan umum yang tidak dikenai PPN adalah kendaraan yang berpelat kuning dengan tulisan hitam," kata Hatta.

▶ 21/03/2006

TDL Batal Naik

Pemerintah akhirnya batal menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini. Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan menghemat pengeluaran anggaran, dengan menunda sejumlah proyek, pembelian mobil baru dan pembangunan gedung-gedung. Keputusan untuk tidak menaikkan TDL tahun ini ditempuh Presiden SBY dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Presiden, alasan utama penundaan kenaikan TDL adalah kondisi riil per-

ekonomian Indonesia yang belum pulih pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Oktober 2005.

Revisi SKB Dua Menteri Diteken

Hasil revisi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Dua Menteri No 1 Tahun 1969 antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah ditandatangani. Selanjutnya, SKB tersebut memasuki tahap sosialisasi. Menurut Mendagri, M Ma'ruf, kesepakatan diambil setelah dilakukan dialog bersama dengan berbagai tokoh agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Walubi, dan KWI. Revisi SKB itu terdiri dari 10 bab dan 31 pasal. SKB itu kemudian diganti menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Meneg PAN: PNS Yang "Lulus" Diangkat

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan, calon pegawai negeri sipil yang telanjur diumumkan lulus seleksi tetapi kemudian tidak tercantum dalam pengumuman susulan tetap akan diangkat. Jika kemudian hal itu menyebabkan jumlah calon yang lulus melebihi kuota, kon-

sekuensinya adalah kuota untuk pengangkatan PNS tahun berikutnya berkurang. Menurut dia, munculnya masalah dalam pengumuman hasil penerimaan CPNS ini akibat ada kesalahan teknis pada komputer yang digunakan panitia daerah. Masalah tersebut nantinya akan dibicarakan dalam evaluasi antara Meneg PAN dan panitia daerah (Sekda dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah).

▶ 22/03/2006

Mauresmo, Petenis Putri No.1 Dunia

Untuk pertama kalinya sejak 2004, Amelie Mauresmo kembali menjadi petenis putri nomor satu dunia menggantikan Kim Clijsters yang turun ke posisi kedua. Gelar juara Grand Slam Australia Terbuka 2006 menjadi salah satu penentu naiknya peringkat Mauresmo dari peringkat kedua. Selain Australia Terbuka, gelar juara dalam turnamen di Perancis dan Belgia juga telah diraih Mauresmo di tahun ini. Adapun gelar nomor satu dunia adalah untuk yang kedua kalinya bagi petenis berusia 26 tahun ini yang memulai kariernya di tenis profesional sejak 1993. Sebelumnya, ranking teratas pernah ditempati Mauresmo selama lima pekan, 13 September-17 Oktober 2004.

▶ 23/03/2006

Indonesia Protes Pemerintah Australia

Pemerintah Indonesia memprotes keputusan Pemerintah Australia yang memberikan visa tinggal sementara

Karikatur Berita





KOMPAS

Pesta Kesenian Anak-Anak (PESKA) Mutiara Indonesia IV-2006 digelar selama 3 hari (24-26 Maret) di Gedung Kesenian Jakarta. Acara ini merupakan salah satu wahana untuk tumbuh dan berkembangnya grup-grup kesenian di lingkungan anak-anak.

Marhaenisme, Partai Demokrat, Partai Patriot Pancasila, dan Partai Pelopor. Setelah Abraham, menyusul kemudian pasangan Yorrys Raweyai-Abdul M Killian (Partai Golkar, PDS, dan PSI) dengan perolehan suara 68.609 (23 persen) dan pasangan Dortheus Asmuruf-M Ali Kastela (PPP, PBB, PAN, PBR, PKPB, dan PPNU) yang mendapat 46.970 suara (15,7 persen).

▶ 25/03/2006

200.000 Orang di Los Angeles Memprotes UU Imigrasi

Ratusan ribu pengunjung rasa, kebanyakan warga Hispanik, memprotes keras Rancangan Undang-Undang Imigrasi Amerika Serikat yang baru di Los Angeles, California. RUU itu memicu kemarahan karena menganggap pekerja imigran yang tidak memiliki dokumen sebagai penjahat. RUU itu juga menetapkan hukuman baru bagi para majikan yang mempekerjakan pendatang "haram". Selain itu, RUU mengizinkan pemerintah mendirikan pagar pembatas di sepertiga panjang perbatasan AS-Meksiko.

▶ 26/03/2006

Bangkok Macet Total

Lalu lintas di Bangkok macet total ketika lebih dari 100.000 demonstran anti-Thaksin berpawai melintasi jalan-jalan di pusat ibu kota Thailand itu. Dalam usaha menyebarluaskan seruan mereka, sekitar 10.000 orang dari

kepada 42 dari 43 warga Papua yang meminta suaka di negara itu. Isu 43 pengungsi Papua yang mengajukan suaka di Australia mulai mencuat minggu ketiga Januari 2006. Itu pun terjadi setelah pengungsi Papua itu ditemukan petugas pantai Australia pada 18 Januari 2006. Ketika itu Pemerintah RI, melalui Deplu, sudah menyampaikan bantahan atas alasan-alasan yang disampaikan warga Papua itu untuk meminta suaka di Australia. Alasan itu antara lain adalah mereka telah menjadi korban aksi kekerasan dan penyiksaan serta menjadi incaran aparat keamanan di Papua. Deplu RI sudah berkali-kali meminta akses untuk menemui warga Papua itu sesuai dengan Konvensi Vienna 1963 tentang

hubungan diplomatik. Namun, akses itu tidak pernah diberikan. Bahkan, identitas para warga Papua itu pun terus disembunyikan Pemerintah Australia.

▶ 24/03/2006

Abraham-Katjong Menang

Pemilihan kepala daerah langsung pertama di Provinsi Irian Jaya Barat sudah membuahkan hasil. Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Abraham Octovianus Atururi-Rahimin Katjong ditetapkan sebagai calon terpilih Gubernur Irian Jaya Barat periode 2006-2011 dalam rapat pleno KPUD Irjabar. Pasangan ini memperoleh suara terbanyak, 183.279 suara (61,3 persen). Abraham diusung oleh PDI-P, PDK, PNI



100.000 demonstran itu secara khusus berpawai dari stadion nasional menuju dua mal pusat perbelanjaan paling mewah di Thailand. Kecuali membuat macet lalu lintas di jalan-jalan di pusat kota Bangkok, mereka juga memaksa salah satu mal itu, The Emporium, tutup untuk sementara. Para pemimpin protes meminta Raja Bhumibol agar ikut menyelesaikan krisis politik, setelah PM Thaksin menolak mengundurkan diri meski dituduh korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Raja diminta menunjuk seorang PM baru pengganti Thaksin, yang akan memerintah sementara sampai dilaksanakan pemilihan umum sela, 2 April mendatang.

▶ 27/03/2006

Dideklarasikan, Penghapusan Perdagangan Manusia

Sejumlah pemuka agama dari berbagai latar belakang berbeda, dimotori oleh Dewi Hughes International Foundation, mendeklarasikan gerakan penghapusan perdagangan manusia. Salah satu isi deklarasi itu adalah desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengundangkan aturan tentang perlindungan anak. Para tokoh agama yang hadir dalam deklarasi itu adalah KH Abdullah Gymnastiar, I Sandyawan Sumardi, Ida Pedanda Gde Ketut Sebali Tianyar Arimbawa, Bhiksu Dutavira Mahasthavira, Pendeta Rosmalia Barus, dan Xs Buana Jaya. Selain mereka, hadir pula Seto Mulyadi serta praktisi hukum Elza Syarif.

▶ 28/03/2006

Operasi Wajah 'Free Flap' Pertama di Indonesia

Operasi rekonstruksi wajah secara total dengan sistem *free flap* yang pertama kalinya di Indonesia berlangsung di Rumah Sakit Umum Dr Soetomo, Surabaya. Operasi dengan biaya sekitar Rp 200 juta yang melibatkan 42 dokter, yang terdiri dari tim bedah plastik, anastesi, bedah K/L, mikrobiologi, psikiatri, rehabilitasi medik, dan farmasi, ini dilakukan terhadap Siti Nur Jazilah (22), warga daerah Dupak Bangunrejo, Surabaya, karena wajahnya rusak tersiram air keras. Menurut Ketua Teknis Tim Rekonstruksi Wajah Rumah Sakit Umum (RSU) Dr Soetomo, dr Sjafuddin Noer, operasi plastik wajah di Indonesia umumnya menggunakan metode *skin grafting*—hanya mengambil kulit dari bagian tubuh lain kemudian ditempelkan di bagian tubuh yang membutuhkan tanpa mengikutsertakan jaringannya. Dengan *free flap* operasi dilakukan dengan mengambil kulit dan jaringan dari organ di bagian tubuh lain. Dr Agus Santoso Budi, salah seorang anggota tim bedah plastik, mengatakan, kulit punggung pasien yang diambil seluas 29 x 28 sentimeter.

Ibu Guru Nurlaila Bebas

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima eksepsi mantan guru SMP Negeri 56 Melawai, Jakarta Selatan, Nurlaila, dan mantan ketua komite sekolah tersebut, Jonni Rimon

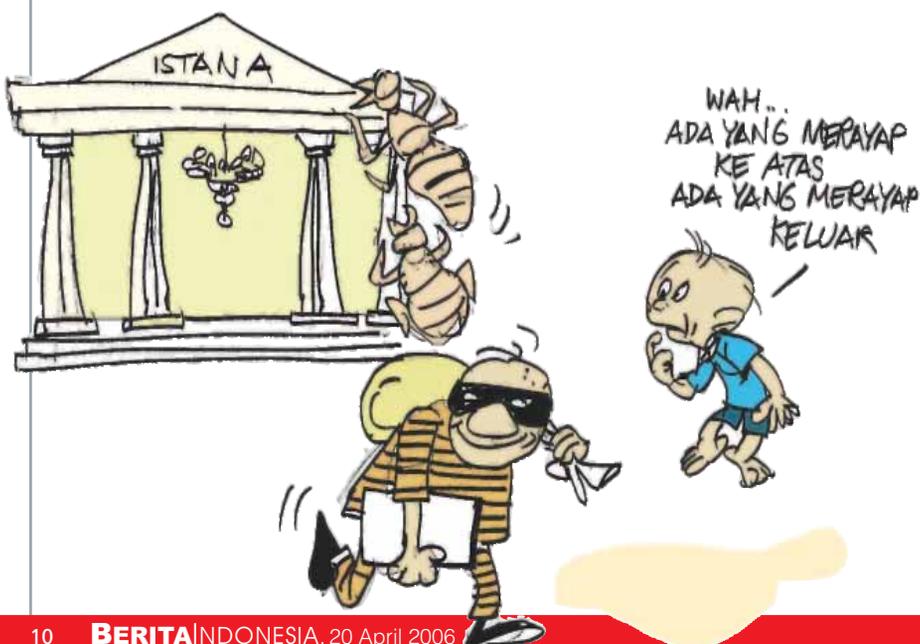
Elian. Majelis menyatakan, surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dan membebaskan kedua terdakwa dari segala dakwaan. Sidang ini merupakan sidang perkara ketiga dalam kasus tukar guling SMPN 56 Melawai dengan bekas sekolah Al-Azhar di Jeruk Purut, juga di Jakarta Selatan. Perjanjian tukar guling ini dilakukan akhir tahun 2000 antara Departemen Pendidikan Nasional dan PT Tata Disantara. Dua perkara lain adalah tentang gugatan kelompok terhadap proses tukar guling itu yang sekarang masih dalam tahap kasasi dan gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta. Gubernur digugat karena menerbitkan Surat Keputusan No 2652/2004 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil kepada Nurlaila. Perkara ini sekarang dalam proses banding.

▶ 29/03/2006

Mantan Direktur Investasi Jamsostek Dituntut 15 Tahun Penjara

Mantan Direktur Investasi PT Jamsostek, Andy Rachman Alamsyah, dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidier enam bulan kurungan. Ia harus membayar uang pengganti Rp 133,25 miliar, yang apabila tak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, hartanya akan disita atau dipidana penjara dua tahun. Demikian tuntutan yang dibacakan bergantian tim jaksa penuntut umum yang diketuai Heru Chairuddin

Karikatur Berita



[HIGHLIGHT BERITA MARET 2006]

Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Nazaruddin Umar, pemimpin Pondok Pesantren Da'iarut Tauhid Abdullah Gymnastiar, dan mantan Menteri Agama, Quraish Shihab. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi yang turut diundang tidak hadir karena ada acara di Surabaya. Pertemuan dengan beberapa tokoh Islam dan kunjungan ke Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan, adalah bagian dari upaya Blair memahami Islam secara lebih baik.

▶ 31/03/2006



Perayaan Tahun Baru Saka 1928, Kamis (30/3) di Bali, berlangsung khushyuk. Masyarakat Hindu merayakan ritual catur brata penyepian dengan sepenuh hati. Mereka melakukan pengeangan atas empat hal, yaitu mengekang hawa nafsu (amati geni), tidak melakukan aktivitas pekerjaan seperti hari-hari biasa (amati karya), tidak bepergian (amati lelungan), dan tidak melakukan hal-hal yang berbau kesenangan (amati lelungan).

pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Sutjahjo Padmo. Andy didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam investasi *medium term notes* (MTN/surat utang jangka menengah) sepanjang Maret-Oktober 2001, yang merugikan negara Rp 311,085 miliar. Andy juga didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam investasi obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank Global sepanjang Mei-Juni 2003 sehingga merugikan negara Rp 100 miliar.

▶ 30/03/2006

Tony Blair Kunjungi Jakarta

Perdana Menteri Inggris Tony Blair melakukan kunjungan dua hari, 29-30

Maret di Jakarta. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama PM Inggris ke Asia Tenggara dalam lebih dari 20 tahun ini. Dalam pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibuat kesepakatan untuk membangun saling pemahaman antara Islam dan Barat. Untuk itu, akan dibentuk Badan Penasihat Islam Indonesia-Inggris guna menangkal radikalisme dan mempromosikan saling pemahaman dan toleransi. Di Kantor Presiden, Yudhoyono dan Blair berdialog dengan lima tokoh Islam Indonesia yang diundang Menteri Sekretaris Negara sehari sebelumnya. Kelima tokoh itu adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif



Saat Garuda Diusik Kangguru

Kebijakan Australia memberikan visa sementara kepada 42 WNI asal Papua telah mengabaikan perasaan dan sensitivitas rakyat Indonesia. Jakarta marah besar.

Hubungan antarnegara sepatutnya dilandasi sikap saling menghargai nasionalisme dan kedaulatan masing-masing negara. Tapi, kebijakan pemerintah Australia dengan memberikan visa sementara (*Temporary Visa*) kepada 42 dari 43 orang warga negara Indonesia (WNI) asal Papua, (23/3), justru telah melecehkan kedaulatan Indonesia.

Sebab, seperti ditegaskan Menko Polhukam Widodo AS dalam Rakor Polkam terbatas di Jakarta, Jumat (24/3), "Tidak ada alasan mereka mencari suaka karena tidak dikejar-kejar aparat, tidak mendapat ancaman dan bahkan juga tidak ada tuntutan".

Kata Widodo, kebijakan Australia itu sama sekali tidak mengindahkan perasaan dan sensitivitas rakyat Indonesia terhadap isu itu. Padahal, Jakarta dan Canberra dalam berbagai tingkat sering melakukan pembicaraan menyikapi berbagai kemungkinan terjadinya kasus-kasus seperti ini. Jakarta selalu memegang komitmen Australia untuk menghormati integritas wilayah NKRI.

Jakarta memang pantas sangat kecewa dan berang atas sikap Canberra. Betapa tidak. Sejak awal, baik melalui Deplu maupun penegasan langsung Presiden SBY via telpon kepada PM Australia John

Howard, Indonesia mengklarifikasi tidak satupun dari para peminta suaka itu tengah dikejar-kejar aparat keamanan.

Bukan hanya itu, Presiden SBY bahkan telah meminta Howard untuk memulangkan mereka seraya menjamin mereka tidak akan dituntut hukum bila kembali ke tanah air.

Karena itu, imbuhan Menko Polhukam, "Kebijakan itu seolah-olah membenarkan sinyalemen yang berkembang selama ini bahwa ada elemen-elemen di Australia yang membantu gerakan separatisme di Papua. Kalau kita lihat proses kedatangan dan respons pemerintah Australia sampai keluarnya izin tinggal sementara itu, seolah-olah mengesankan adanya spekulasi elemen-elemen di Australia membantu gerakan separatisme".

Sebagai wujud reaksi kerasnya, Jakarta telah menempuh sejumlah langkah politis: memanggil pulang Dubes RI di Australia, Teuku M. Hamzah Thayeb, untuk dimintai penjelasan seputar sekap terjang Australia menyikapi permintaan suaka politik 43 WNI dan memanggil Dubes Australia di Jakarta untuk menyampaikan kekecewaan Indonesia.

Juru Bicara Deplu-RI, Yuri Thamrin, (24/3), menegaskan langkah Jakarta memulangkan Dubesnya di Australia sudah dipertimbangkan secara matang dan terukur.

"Banyak cara untuk menunjukkan kekecewaan terhadap sikap negara asing, dari mengirim surat, memanggil Dubes asing di Indonesia untuk menyampaikan protes, hingga pemanggilan duta besar Indonesia," ujar Yuri.

Namun, kata Direktur Asia Timur dan Pasifik Deplu itu, Dubes Hamzah tidak ditarik secara tetap melainkan secara sementara. Ditambahkan Yuri, KBRI di Australia tidak dikonsultasi oleh Canberra tentang keputusan pemberian visa.

Yuri tidak menampik kemungkinan bakal memburuknya hubungan Jakarta dengan Canberra sebagai eksekus kasus ini. "Keputusan itu telah mengganggu atmosfer secara umum hubungan kedua negara. Itu tidak mungkin mendorong kerja sama kedua negara, terutama menghadapi pendatang ilegal," ujar Yuri Thamrin.

Kalangan Komisi I DPR malah mendesak pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia. Ali Mochtar Ngabalin, anggota DPR, menyitir informasi yang dia terima, dalam waktu 6-9 bulan atau paling lambat 3 tahun, Papua akan dilepaskan dari NKRI.

Pengamat intelijen Wawan Purwanto, seperti dikutip *Rakyat Merdeka* (25/3), menganalisis, ada konspirasi tingkat tinggi di balik kasus memanasnya Papua, dengan Australia dan Amerika Serikat sebagai pelakon.

"Tujuannya ingin memisahkan provinsi ini dari pangkuan Indonesia. Saat ini dua negara itu melakukan permainan dua kaki, di depan lain dan di belakang lain pula," tandas Wawan.

Kalau begitu, Indonesia mesti antisipatif jangan sampai kasus pemberian visa, sesaat setelah kejadian di Abepura, Papua yang menewaskan lima aparat Polri dan TNI, bergulir dan menjadi bom waktu bila tidak ingin Papua di-Timor Leste dan lepas dari pelukan sayap Garuda. ■ **af**



PULAU TERLUAR

Meskipun sudah terlambat, pemerintah tergerak juga untuk memberi perhatian serius pada 92 pulau kecilnya yang terluar. Pemerintah tersadar dari kelalaiannya setelah beberapa kejadian fatal di masa lalu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (29/12-2005) merasa perlu untuk menerbitkan Peraturan Presiden sebagai landasan formal pengelolaan pulau-pulau tersebut. Peraturan itu memberi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah agar tidak saling menyalahkan.

Ke 92 pulau tersebut; berada di Provinsi Kep. Riau (20); Kaltim (4); Sulteng (3); Sulut (11); Maluku (1); Papua (9); Maluku (18); NTT (5); NTB (1); Jatim (3); Jateng (1); Jabar (1); Banten (1); Lampung (1); Bengkulu (2); Sumbar (2); Sumut (3); dan NAD (6).

Pengawasan pulau-pulau ini diserahkan kepada sebuah tim koordinasi, dipimpin oleh Menko Polhukam, Widodo AS, beranggotakan; 15 menteri, Sekab, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN. Maksudnya, menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional dan pertahanan negara, memanfaatkan sumber daya alam dan memberdayakan masyarakat.

Tujuannya memang sangat ideal. Tetapi masalahnya, pulau-pulau itu sangat terpencil, hampir semuanya tidak berpenghuni. Hanya para nelayan yang kesasar yang mungkin singgah di pulau-pulau tersebut.

Departemen Pertahanan punya gagasan untuk membangun pos-pos penjagaan TNI-AL di pulau-pulau tersebut. Juga Departemen Perhubungan punya rencana yang menarik, membangun mercu suar di setiap pulau kecil terluar. Sedangkan Departemen Kelautan berencana menempatkan para nelayan. Semua ga-

gasan itu bagus, tetapi untuk mewujudkannya perlu dana yang cukup besar. Tetapi kalau tidak ditangani, pelajaran pahit di masa lalu akan terulang kembali.

Pengalaman pahit yang masih disesalkan sampai sekarang yaitu lepasnya P. Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, tahun 2002. Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Negeri Belanda, memenangkan Malaysia dan mengalahkan

kosong dan terlantar.

Kepekaan Indonesia menipis lantaran sibuk dengan euforia reformasi, sehingga lupa miliknya yang sangat berharga dicaplok negara lain. Kedua pulau tersebut memang dipersengketakan sejak dulu. Sengketa itu pernah muncul ke permukaan di era pemerintahan Presiden Soeharto.

Pak Harto menganggap kepemilikan kedua pulau tersebut sebagai persoalan yang sangat serius dan prinsipil. Ketika pemerintah Malaysia menempatkan para nelayannya di sana, Pak Harto memerintahkan pengiriman satuan TNI-AL untuk mengusir mereka.

Malaysia serta merta mengosongkan kedua pulau tersebut. Dan pemerintah Indonesia menempatkan para nelayan, sesekali dipatrol oleh AL. Para nelayan yang bersedia menghuni kedua pulau tersebut mendapat bantuan dari pemerintah, seperti; pemukiman, alat penangkap ikan dan sembako.

Bersamaan dengan jatuhnya pemerintahan Pak Harto (Mei 1998), bantuan untuk para nelayan terabaikan. Pemerintah dan masyarakat terlena oleh euforia reformasi, melupakan para nelayan yang hidup terasing di Sipadan dan Ligitan. Para nelayan itu, lama kelamaan meninggalkan kedua pulau tersebut, karena tidak lagi mendapat perhatian dari pemerintah. Sipadan dan Ligitan kembali kosong dan terlantar.

Sebaliknya, Malaysia diam-diam menempatkan para nelayannya di tengah galau reformasi di Indonesia. Tidak itu saja. Malaysia juga membangun berbagai fasilitas pariwisata di kedua pulau tersebut. Kelebihan itulah yang dicuri Malaysia sebelum mengajukan gugatannya.

Namun kehilangan Sipadan dan Ligitan belum memberi pelajaran kepada pemerintah. Hanya benar-benar tergerak setelah munculnya kasus-kasus Abange, Gosongniker dan Mengkudu. Dan terakhir, P. Bidadari di lepas pantai P. Sumba, NTT, dijual oleh tuan tanah setempat kepada orang asing (2005). Yah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. ■



Indonesia untuk mengakhiri sengketa yang berkepanjangan.

Kita terperangah ketika Malaysia menggunakan batas pantai kedua pulau tersebut sebagai titik ukur terdepan untuk mengklaim palung dasar laut milik Indonesia, Blok Ambalat, yang kaya minyak bumi. Baru setelah itu pemerintah dan masyarakat kebakaran jenggot.

Sebelum menggugat ke MI (2002), Malaysia secara de facto menguasai Sipadan dan Ligitan. Sedangkan Indonesia tidak peduli, menganggap enteng persoalan, sehingga membiarkannya

RAMAI-RAMAI KELOLA BERANDA INDONESIA

Upaya memberi perhatian dengan mengelola pulau-pulau kecil terluar bukan saja berdampak ekonomi, namun juga berfungsi menjaga ketahanan dan keamanan wilayah. Keluarnya Perpres No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar menunjukkan bukti keseriusan itu.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil. Dari 17.506 pulau tersebut, menurut mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Ir. Rokhmin Dahuri, masih banyak pulau kecil yang belum digarap secara serius, bahkan banyak yang tidak berpenghuni dan tanpa nama. “Padahal pulau-pulau kecil, utamanya pulau terluar itu sebenarnya beranda negeri ini,” lanjutnya.

Pemerintah sebenarnya telah lama membuat pedoman umum pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun, menurut Rokhmin, *framework* pembangunan bangsa yang dipraktekkan selama ini menyebabkan hanya pulau-pulau besar yang menjadi pusat-pusat aktivitas utama pembangunan. Akibatnya banyak yang kurang mengenal pulau-pulau kecil atau gugusan pulau kecil lainnya. Sehingga kesannya, kawasan ini menjadi terlantar dan tidak dikelola dengan baik.



Negeri ini pernah memiliki pengalaman tidak mengenakkan dalam kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia. Padahal berdasarkan catatan dan dokumen yang ada, Indonesia seharusnya yang berhak memilikinya. Menurut catatan sejarah, keduanya tadinya berada dalam kekuasaan Kerajaan Bulungan, Kalimantan Timur. Namun, karena tidak dirawat dengan baik, maka dua pulau ini menjadi telantar. Sementara Malaysia cukup agresif memberi kehidupan pada keduanya. Sehingga Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, akhirnya menjatuhkan pilihan pada negeri jiran tersebut.

Kemudian yang belum lama lepas dari ingatan, munculnya kasus serupa di Ambalat. Negeri jiran juga mengincar pulau yang berada di perbatasan ini. Kasusnya hampir sama dengan Sipadan dan Ligitan. Pemerintah Indonesia dinilai kurang memberi perhatian terhadap pulau ini. Belum lagi pulau-pulau lain yang ada di banyak perbatasan. Bukan saja tidak terurus, pulau-pulau terpencil tersebut bahkan tidak memiliki nama. Dikhawatirkan, jika pemerintah tidak segera beraksi memperhatikan pulau-pulau kecil tersebut, suatu saat nasib pulau-pulau tersebut akan tidak jauh dari nasib Pulau Ligitan dan Sipadan.

Masalah 'kurangnya perhatian' dan lemahnya status hukum memunculkan masalah baru. Silang pendapat mengenai kepemilikan Pulau Bidadari kembali membuka wacana status hukum pulau-pulau terluar Indonesia. Ernest Lewandowsky, warga negara Inggris yang dikabarkan membeli pulau di sebelah selatan Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur itu kemudian

membantah. Pemda memang memberi izin, tetapi hanya sebatas hak guna bangunan (HGB). Namun demikian, kasus ini telah memicu kekhawatiran banyak kalangan mengenai nasib pulau-pulau kecil milik Indonesia. Karena, tak ingin lepasnya Sipadan dan Ligitan terulang kembali.

Keseriusan Pemerintah

Berkaca pada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, maka pemerintah berupaya lebih serius dalam menggarap pulau-pulau kecil tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pemerintah juga telah mempersiapkan dana sebesar Rp. 265 miliar untuk membangun infrastrukturnya (simak wawancara Widi Agoes Pratikto-*red*).

Kemudian berdasarkan Perpres itu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) membuat Pedoman Umum (Pedum) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2005. Pembahasan Pedum ini dilakukan secara maraton dengan melibatkan 17 instansi sejak Perpres tersebut diterbitkan pada 29 Desember 2005.

Ketujuhbelas instansi terkait yang ditugasi mengelola pulau-pulau kecil terluar itu antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Luar Negeri. Di luar itu adalah Bappenas, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Panglima TNI, Kepala Polri, Sekretaris Kabinet dan BIN. Secara lembaga, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar ini dikoor-

dinasikan oleh Tim Koordinasi yang dipimpin oleh Menkopolhukam. Sedang Tim Kerja yang bertindak sebagai Pelaksana Harian adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Terbitnya Perpres yang kemudian disusul dengan Pedum setidaknya telah membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar yang juga merupakan beranda Indonesia itu. Saat ini Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar yang tersebar di 19 Provinsi dan 38 kabupaten serta berbatasan dengan 10 negara. Namun, baru 50 % yang telah berpenghuni. Kesembilan puluh dua pulau itu juga berbatasan dengan sepuluh negara tetangga.

Menurut Didi Sadili, Kasubdit Identifikasi Potensial Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, penerbitan Perpres tersebut bertujuan untuk memastikan batas negara, baik untuk Zona Ekonomi Eksklusif, teritorial laut, maupun Batas Landas Kontinen. Perpres juga merinci koordinat pulau-pulau terluar tersebut berikut pengukuran batas wilayah Indonesia yang disusun Dinas Hidro Oceanografi TNI AL pada tahun 2003.

Efek tidak langsung dari adanya Perpres itu adalah adanya komitmen untuk membangun serta mengembangkan wilayah daratan, pesisir dan laut di dalam 92 pulau kecil terluar secara lebih optimal. Apalagi prioritas utamanya adalah pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ■ **AD**



Mempertegas Batas-Batas Wilayah

Ketidakjelasan batas-batas wilayah menjadi salah satu penyebab konflik perbatasan. Pemerintah diharapkan segera mempertegas batas wilayah.

Baik kasus Sipadan dan Ligitan, maupun kasus Ambalat menurut Suhana, peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL-IPB) setelah dikaji, akibat dari ketidakjelasan batas-batas wilayah laut Indonesia dan negara tetangga. Padahal sebenarnya seluruh pulau di Indonesia, termasuk pulau terluar dan pulau tak bernama telah memiliki status hukum yang kuat. Indonesia telah terikat dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1982. Tapi mengapa batas wilayah tersebut masih dipersoalkan?

Batas-batas maritim yang tertuang dalam UNCLOS 1982 meliputi batas-batas laut teritorial, batas-batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas Landas Kontinen. Dengan demikian,

adanya kejelasan batas wilayah dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kejelasan batas wilayah tersebut juga dapat menciptakan kesejahteraan warga negara melalui terjaminnya pemanfaatan potensi sumber daya seperti kegiatan perikanan, eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai, wisata bahari, transportasi laut dan berbagai kegiatan kelautan lainnya.

Penetapan batas wilayah ini penting, bukan saja untuk menghindari pencaplokan pulau oleh negara tetangga, tapi juga menetapkan status hukum atas pulau-pulau tersebut. Sehingga kekhawatiran akan lepasnya pulau-pulau di Indonesia tidak perlu terjadi. Entah itu akibat investor asing yang masuk dan mengelola pulau-pulau kecil tersebut, atau jual beli tanah dengan pihak asing atau negara tetangga di pulau tersebut.

Kepala Seksi Perbatasan Maritim, Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Departemen Luar Negeri, Amrih Jinangkung dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Fakultas Hukum UI awal Maret lalu menegaskan, kekhawatiran lepasnya pulau-pulau di Indonesia tidak perlu terjadi. Sebab seluruh pulau di Indonesia sebenarnya memiliki status hukum yang kuat. "Sebenarnya kita telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai status pulau-pulau terluar, antara lain: Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun

1960, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang dan Keputusan Presiden mengenai Kewilayahan dan Perbatasan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, serta sejumlah Ordonansi Belanda."

Dalam kesempatan yang sama Rusdi Ridwan, Kasubdit Peta Dinas Hidro Oceanografi, TNI Angkatan Laut juga mengatakan, bahwa saat ini Indonesia mempunyai batas maritim dengan sepuluh negara tetangga, yaitu Australia, Timor Leste, Malaysia, Singapura, Philipina, Palau, Thailand, Papua Nugini, India dan Vietnam. Selain perbatasan maritim, Indonesia juga telah menetapkan batas-batas darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Namun demikian, Rusdi mengakui bahwa sampai saat ini penetapan batas maritim dengan negara tetangga tersebut belum dapat diselesaikan dan masih dalam proses perundingan terutama masalah laut teritorial, batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Batas-batas wilayah tersebut telah ditetapkan, namun yang perlu diseriusi pemerintah adalah mempertegas batas wilayah dengan cara menetapkan dan mendepositkan titik-titik batas wilayah ke Sekjen PBB supaya diakui secara internasional. Dengan cara ini, batas wilayah Indonesia semakin dipertegas, sehingga akan meminimalkan konflik di wilayah perbatasan. **AD**





Pulau Kecil Lebih Rentan

terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insular, mempunyai sejumlah besar endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi, tangkapan air relatif kecil, sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut. Dari segi sosial, ekonomi dan budaya, masyarakat pulau-pulau bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Keragaman hayati, sumber daya perikanan dan nilai estetika yang tinggi merupakan nilai lebih ekosistem pulau-pulau kecil. Di sinilah ekosistem dengan produktivitas hayati tinggi, seperti terumbu karang, padang lamun (*sea grass*), rumput laut dan hutan bakau (*mangrove*) ditemukan. Selain itu, pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang

tinggi nilai ekonomisnya dan sekaligus sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan.

Namun sisi lain, pulau-pulau kecil memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi, khususnya menyangkut ketersediaan air yang rendah dan risiko erosi. Oleh karena itu, pilihan pembangunan pulau-pulau kecil merupakan gabungan dari dua sisi ini. Sedangkan menurut Perpres No. 78 Tahun 2005, Bab. I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1A, kriteria pulau terkecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. ■ AD

Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), pulau-pulau kecil memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan yang berbeda dibandingkan dengan pulau-pulau besar. Sehingga pengelolaannya, pola pembangunan dan regulasi disusun berbeda dengan pengelolaan pulau-pulau besar. Pulau-pulau kecil tersebut sebagian besar memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental service*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi.

Batasan-batasan dan karakteristik pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut: Pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km². Dengan jumlah penduduknya kurang atau sama dengan 200.000 orang, secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*), memiliki batas fisik yang jelas dan



Nama Bagi 9.410 Pulau Kecil

Persoalan aktual yang dihadapi bangsa Indonesia bukan hanya masalah penanganan terhadap 92 pulau-pulau kecil terluar, tapi juga pencatatan dan penamaan pulau-pulau yang masih kosong tak berpenghuni. Maklum, negara kepulauan Indonesia yang maha luas ini memiliki 17.506 buah pulau mulai ukuran besar hingga kecil.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Widi A. Pratikto, mengatakan, DKP memiliki program menamai 9.410 pulau yang hingga kini belum bernama.

Di tahun 2005 lalu, DKP sudah dapat menyelesaikan penamaan 5.000 pulau. Kepada 5.000 pulau itu masih dibutuhkan sejumlah tes kelayakan penamaan, dan proses ini akan berlangsung secara terus-menerus untuk memperoleh justifikasi yang sempurna. Tes dilakukan oleh sebuah tim yang SK-nya dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Selama tahun 2006-2007 diharapkan penamaan ke-9.410 pulau sudah selesai semua, sehingga masih tersedia waktu yang cukup untuk melakukan uji ulang kelayakan dan kesahihan penamaannya.

Pembentukan dan pembahasan (Rancangan) Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diharapkan Widi dapat mempercepat program penamaan dan pengelolaan pulau-pulau kecil. RUU ini sejak awal didesain sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan maksud supaya semua hal yang terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil juga bisa masuk ke dalam diktum-diktum RUU.

Namun dalam perjalanan sempat muncul gagasan dari sejumlah pihak, RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan RUU Pulau-Pulau Kecil harus dipisah. Akan tetapi setelah berlangsung pembahasan antara Pemerintah dan DPR, muncul lagi banyak dorongan dan inspirasi baru bahwa, dengan banyaknya masalah dalam pulau-pulau kecil maka sepatutnyalah masalah pesisir dan pulau-pulau kecil digabung menjadi satu.

Karena itulah berbagai produk hukum yang pernah ada, apakah itu berbentuk Peraturan Menteri, Keppres dan sebagainya dituangkan semua ke dalam RUU, lalu dimunculkanlah RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai usul inisiatif bersama antara Pemerintah dan DPR. ■

Widi Agoes Pratikto (Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/KP3K),
Departemen Kelautan dan Perikanan)

“Kami Serius Ingin Mengelola Pulau Untuk Kesejahteraan”



Seolah tak ingin kehilangan tongkat dua kali, sejak lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) segera berbenah menangani pulau-pulau kecil terluar. Anggaran ratusan miliar rupiah sudah dialokasikan untuk menjalankan Perpres No. 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. DKP ingin pengelolaan pulau-pulau kecil terluar ini memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga perbatasan. Berikut petikan wawancara *Berita Indonesia* dengan **Widi Agoes Pratikto**, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), seputar keseriusan pemerintah itu:

WIDI A. PRATIJKO

Kabarnya, pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan benar-benar serius akan memperhatikan dan mengelola pulau-pulau kecil terluar?

Ya. Jadi, peristiwa terlepasnya Sipadan dan Ligitan, lalu sengketa Ambalat itu mendorong kami untuk segera secara serius mengelola pulau-pulau kecil terluar itu. Sebab terus-terang peristiwa-peristiwa itu membuat seluruh jajaran di departemen kami merasa khawatir, peristiwa itu akan terulang lagi.

Lalu apa yang menjadi prioritas utama?

Usai kasus Sipadan-Ligitan yang menjadi prioritas utama DKP adalah pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Kami lalu menggelar sebuah *workshop* yang khusus membahas pulau-pulau kecil, yang waktu itu berlangsung pada Juni 2003.

Hasilnya?

Kami merasakan bahwa kita perlu Perpres (Peraturan Presiden, *Red*) tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Kami mengerti, bahwa hal ini sangat urgen.

Perpres seperti apa yang diharapkan waktu itu?

Perpres yang kami harapkan adalah untuk menyempurnakan pedoman dan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan pulau-pulau kecil. Sebab peraturan yang ada selama ini kami anggap masih kurang efektif. Seperti Keppres No. 41 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, yang telah diperbaiki dengan Keppres No. 67 Tahun 2003. Atau, Keppres No. 38 Tahun 2004 mengenai investasi di pulau-pulau kecil. Demikian pula UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Bahkan, kehadiran UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperbaiki dengan UU No. 32 tahun 2004, malah telah membatasi pengelolaan pulau-pulau kecil menjadi berada dalam yurisdiksi pemerintah daerah. Padahal, kenyataannya kita melihat bahwa pemerintah daerah belum begitu *aware* masalah pulau-pulau kecil terluar. Maka, setelah dua tahun lebih menanti akhirnya Perpres terbit juga. Ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tepat pada tanggal 29 Desember 2005. Namanya Perpres No. 78 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Lalu, langkah selanjutnya?

Kami lalu membentuk Tim Koordinasi. Berdasarkan Perpres tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, disingkat Tim Koordinasi. Tim mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Tim diketuai oleh Menko Polhukam, dibantu dua wakil ketua Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Dalam Negeri, serta beranggotakan 17 pimpinan lembaga kementerian negara, TNI, Polri, dan BIN, serta seorang Sekretaris.

Tim Koordinasi dibantu oleh dua Tim Kerja, keduanya dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tim Kerja I diketuai oleh Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang tugasnya membidangi pembangunan sumberdaya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, ekonomi, sosial dan budaya. Tim Kerja II diketuai Dirjen Pemerintahan Umum, Depdagri, membidangi masalah pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan.

Sebenarnya, apa saja kriteria pulau-pulau kecil?

Pulau-pulau kecil diartikan sebagai pulau yang memiliki luas area kurang atau sama dengan 2.000 kilometer persegi, memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Jadi, Perpres No. 78 itu sangat besar artinya?

Ya. Ada dua skenario besar di balik Perpres No. 78 itu. Yaitu menjaga keaulatan negara (*sovereignty*) dan memberikan kemakmuran atau kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan (*prosperity*).

Kira-kira kegiatan apa yang direncanakan di pulau-pulau kecil terluar?

Selain yang terkait dengan pertahanan, adalah yang memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat. Itu yang menjadi cakrawala pemikiran kita dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Lalu, bagaimana *action* lembaga terkait lainnya?

Setelah keluarnya Perpres 78 semua instansi yang terlibat mencoba melakukan penyusunan kembali matriks kegiatan masing-masing departemen, baik selama tahun 2006 hingga tahun 2007. Departemen Perhubungan, misalnya, bertugas memasang sarana bantu navigasi di 47 pulau terluar. Lalu, antar Ditjen di lingkungan DKP seperti Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, dan Ditjen KP3K mencoba melihat apa yang bisa dipartisipasikan untuk menjaga pulau-pulau terluar.

Lalu, bagaimana dengan dananya?

APBN 2006 sudah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 267 miliar untuk membangun infrastruktur pulau-pulau kecil. Di tahun 2006 pekerjaan Tim masih lebih banyak pada pengidentifikasi-an, terutama membuat profil pulau-pulau terluar bekerjasama dengan TNI AL dan TNI AU melakukan pemotretan dengan bantuan pesawat terbang atau citra satelit.

Lalu, bagaimana sistem pengelolaan pulau-pulau kecil terluar ini?

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, belajar dari kasus sejarah lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dilakukan dalam tiga kepedulian. Yaitu, penguasaan kita secara efektif di pulau, termasuk di dalamnya aspek administrasi (*effective occupation*), keberadaan kita secara terus-menerus di pulau (*continuous presence*), serta adanya perlindungan dan pelestarian ekologis (*maintenance and ecology preservation*).

Lalu, sebagai Ketua Tim Kerja I apa yang akan Bapak lakukan?

Pihak kami akan terus mengkoordinasikan berbagai hal. Karena persoalan utama pulau-pulau kecil terluar adalah aksesibilitas maka kami juga membuat *small infrastructure* baik untuk transportasi, komunikasi, dan penyediaan energi listrik. Dengan PT Pelayaran Nasional (Pelni), misalnya, sesuai ketentuan PSO (*public service obligation*) dibuat MOU supaya Pelni dapat mengunjungi beberapa pulau terluar. Demikian pula dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), berdasarkan ketentuan USO (*universal service obligation*) setiap pulau akan dapat berhubungan melalui sarana komunikasi. Dan untuk infrastruktur kelistrikan di berbagai pulau kecil dikembangkan listrik tenaga surya. Jadi, ini yang menjadi obligasi kita, DKP, untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ini. ■ HT

Dalam Kawalan Pasukan Sapta Marga

Posisi TNI sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara sangat dominan dalam melindungi pulau terluar. Angkatan Laut menempatkan pasukan Marinir di 12 pulau terluar yang memiliki potensi klaim dari negara-negara tetangga.

Syair lagu 'Hilang Permataku', nyaris berubah menjadi 'Hilang Bidadariku'. Bidadari adalah nama sebuah pulau kecil yang masuk dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi bahan pembicaraan. Pulau seluas 15,4 hektare itu diklaim oleh warga Negara Inggris bernama Ernest Lewandowsky sebagai miliknya. Beruntung nasib Pulau Bidadari tidak sama dengan Sipadan dan Ligitan yang kini sudah dicaplok oleh Malaysia. Menyusul pula ketegangan mengenai Blok Ambalat.

Belajar dari pengalaman pahit hilangnya Sipadan dan Ligitan, pemerintah pun tak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Buktinya, pemerintah langsung meluncurkan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Tindakan selanjutnya, Departemen Pertahanan RI pun segera mengalokasikan anggaran dalam upaya penegakan kedaulatan NKRI, termasuk di dalamnya penanganan perbatasan tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 760,58 Miliar dari keseluruhan anggaran pertahanan 2006 yang berjumlah Rp. 28,229 Triliun. Hal tersebut disampaikan Menhan Juwono Sudarsono, Senin (6/3), dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI yang didampingi Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, Sekjen Dephan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, serta para pejabat Eselon I dan II Dephan, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Bahkan untuk menjaga dan mengamankan keutuhan dan kedaulatan NKRI, TNI menggelar kehadiran TNI AD, AL, dan AU secara terpadu, efektif, efisien pada titik-titik terluar. Setiap saat ada prajurit TNI atau kapal dan pesawat TNI, sehingga pengamanan dan keamanan wilayah Indonesia terjaga dari kemungkinan diduduki oleh pihak lain. Lebih jauh ke depan akan



didirikan pos-pos TNI AD dan TNI AL untuk mencegah kerawanan yang mengancam pulau-pulau terluar, meski itu bukan tugas TNI saja. .

Masalah perbatasan menunjukkan betapa urgensinya penetapan batas wilayah suatu negara secara definitif. Terlebih lagi bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sebagian besar batas wilayahnya terdiri atas perairan yang tunduk pada pengaturan ketentuan-ketentuan Hukum Laut Internasional dan sisanya berupa batas wilayah daratan dengan negara-negara tetangganya.

Perbatasan bukan hanya semata-mata garis imajiner yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi juga sebuah garis perbatasan sebagai batas kedaulatan.

Pengawasan dan Pemantauan

Departemen Pertahanan telah menyiapkan dukungan anggaran bagi TNI dalam rangka gelar pasukan dan operasi pengamanan perbatasan. Ini termasuk pengamanan pulau-pulau terluar, serta menetapkan arah kebijakan prioritas penggelaran pos-pos TNI dan patroli, khususnya di wilayah yang rawan, seperti Pulau Situri, Kukusan, Mangudu, dan Bidadari.

Bahkan, Kepala Staf TNI AL Laksamana Slamet Soebijanto mengatakan, pihaknya akan meningkatkan jumlah frekuensi patroli dan kehadiran armadanya di seluruh wilayah kedaulatan RI, terutama di beberapa pulau dari 92 pulau kecil terluar yang dimiliki Indonesia.

TNI AL juga menempatkan pasukan Marinir di 12 pulau terluar yang memiliki potensi klaim dari negara-negara tetangga juga melaksanakan patroli secara rutin di perairan sekitarnya.

Dari total 114 armada kapal perang RI, separuhnya dikerahkan untuk patroli laut. Meski itu masih sebatas konsep patroli rutin, namun lebih diarahkan ke sejumlah daerah yang dipandang perlu untuk diawasi.

Terkait dengan peningkatan kehadiran patroli TNI AL, Slamet mencontohkan hal seperti itu perlu dilakukan di sejumlah wilayah pulau kecil terluar. Seperti Pulau Gosong Niger di Kalimantan Timur dan kawasan Tanjung Datuk di Kalimantan Barat.

Menurut Slamet, selain dengan meningkatkan kehadiran kapal patroli, pemerintah juga perlu mempertimbangkan usul untuk membangun pos TNI AL, khususnya di kawasan Tanjung Datuk. Kini Malaysia tengah membangun sejumlah mercusuar dan pos pengawasan.

Seperti dilaporkan harian *Pelita*, 1 Maret 2006, Menko Polhukam Widodo AS menyatakan pemerintah tetap memantau dan menjaga ke-92 pulau terluar itu secara *de jure* maupun *de facto*. Sehubungan dengan kasus Pulau Bidadari, Widodo menyatakan pemerintah akan memproses kasus kepemilikan orang asing di pulau tersebut.

Meski pengamanan wilayah dan pulau-pulau kecil terluar melibatkan koordinasi antar lembaga terkait, namun posisi TNI sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara sangat dominan dalam melindungi pulau terluar. Panglima TNI Marsekal TNI, Djoko Suyanto, ketika memberikan keterangan pers di Mabes TNI Cilangkap belum lama ini mengatakan, status pulau-pulau itu merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat. Akan tetapi TNI akan selalu siap untuk mempertahankan pulau-pulau tersebut dari segala macam ancaman. ■ SB, RH

Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto

Pos Pengamanan TNI di Perbatasan Belum Ideal

Pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia perlu segera dilakukan. Jangan sampai negara ini kehilangan lagi sebagian wilayahnya.

Menurut Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, pemerintah perlu segera melakukan pembangunan diperbatasan Kalimantan. Sebab jika tidak, kemungkinan puluhan hingga ratusan kilometer wilayah Indonesia sepanjang 3000 kilometer perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) hingga Kalimantan Barat (Kalbar) bisa dicaplok masuk wilayah negara tetangga. Pernyataan itu dikemukakan Panglima dalam kesempatan meninjau pengamanan yang ada di perbatasan Kalimantan.

Namun, mengenai pembangunan wilayah perbatasan ini Panglima mengakui, tidak bisa hanya TNI yang melakukan. “Berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 1994 tentang pembangunan perbatasan, harus melibatkan banyak pihak. Seperti; Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Departemen Kehutanan. Kalimantan ini hutannya masih sangat luas, sehingga perlu keterlibatan pihak Kehutanan,” kata Marsekal TNI Djoko Suyanto di Bandara Juwata Tarakan, usai meninjau pos prajurit TNI di pos pengamanan perbatasan Simenggaris Nunukan, beberapa waktu lalu.

Menurut Djoko Suyanto, keberadaan pos pengamanan di perbatasan Malaysia-Indonesia belum ideal. Sebab, jumlah pos yang ada antara Kaltim hingga Kalbar hanya 39. Padahal, idealnya harus ada 213 pos. “Nah, dalam 3 sampai 4 tahun ke depan kita harus bisa merealisasikan 200 pos. Mudah-mudahan dananya ada sehingga rencana ini dapat kita wujudkan,” katanya.

Menyinggung tentang teknis pengamanan pulau terluar, menurut Panglima, “Eskalasinya tidak sama. Jadi, kita lihat dulu – mana yang dianggap paling rawan, itu yang kita prioritaskan. *Kan* tidak semua pulau terluar itu rawan,” katanya. “Namun, yang jelas,” lanjutnya. “Untuk mengamankan pulau-pulau terluar itu, perlu dana dan dukungan anggaran. Saat

ini, TNI telah melakukan pengamanan di setiap wilayah yang tingkat kerawannya tinggi”.

Panglima juga mendukung adanya upaya pemanfaatan lahan perkebunan di perbatasan untuk menanam kelapa sawit. Rencana pemerintah untuk mengembangkan kebun kelapa sawit di perbatasan itu selain didukung oleh TNI juga Yayasan Maju Kerja (Yamaker). Yayasan Milik Departemen Pertahanan dan Keamanan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1992 ini tugas utamanya adalah



menjadi *security belt* atau pagar pengaman hutan di kawasan perbatasan. Untuk itu, yayasan tersebut mendapat Hak Pengelolaan Hutan (HPH) seluas sejuta hektare yang terbentang sepanjang 3000 kilometer di garis perbatasan Kaltim dan Kalbar dengan Malaysia. Sebagai pengelola HPH, Yamaker menunjuk PT Jaya Maha Kerta (Jamaker). ■ LPS



Pemerintah Mesti Responsif-Rasional

Komisi IV DPR sedang menyusun RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Daerah harus dipacu kreatif dan inovatif mengembangkan potensi yang dimiliki termasuk pulau-pulau kecil.

Sejak Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan bukan milik Indonesia, melainkan milik Malaysia —setelah diperkarakan sejak 1969— trauma terus membayangi Indonesia.

Tak ayal, ketika mendengar kabar Pulau Bidadari, NTT, telah dijual kepada warga negara asing, para petinggi negeri dan tokoh bangsa ini mengumandangkan nasionalisme.

Usut punya usut ternyata si WNA telah memiliki hak guna bangunan (HGB) yang secara resmi diberikan instansi berwenang di daerah. Aturan hukum di Indonesia memang menggariskan, WNA tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia, walaupun mereka diperkenankan memperoleh hak pakai atau hak guna bangunan atau hak guna usaha (HGU) untuk waktu terbatas (30 tahun di Indonesia).

Jadi, perolehan hak pakai, HGB, ataupun hak milik tidak akan menghilangkan kedaulatan NKRI atas wilayahnya, termasuk haknya atas pertahanan dan penegakan hukum atas tanah itu.

Ketua DPR-RI, Agung Laksono, membenarkan WNA tidak bisa menguasai pulau apapun di Indonesia. WNA hanya bisa memiliki HGB dan HGU. "Hak-hak itu bisa diperpanjang bilamana diperlukan. Tapi, kalau sudah waktunya dan tidak diperpanjang, harus angkat kaki. Hak-hak itu biasanya terkait kepentingan pengembangan pariwisata," ujar Agung.

Sekadar informasi, Komisi IV DPR-RI yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan saat ini sedang menyusun RUU



FACHRI ANDI LALUASA

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Anggota Komisi IV DPR, Fachri Andi Laluasa, di satu kesempatan, mengatakan UU tersebut sangat urgen dalam rangka memberikan manfaat serta mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, menguatkan sistem kelembagaan yang mengelola dan menyelesaikan konflik di wilayah pesisir, serta menjamin akses masyarakat pesisir untuk menguatkan sumber daya pesisir yang dikelola secara lestari.

Ditambahkan anggota Fraksi Partai Golkar dari Dapil Sulsel II ini, pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam yang harus dikelola secara

adil dan bijaksana, sesuai prinsip-prinsip keterpaduan dan keberlanjutan.

Sementara itu, dari perspektif pemberdayaan daerah dan kebijakan publik, anggota DPR dari F-PG, DR. Deding Ishak

Ibnu Suja, menilai sikap waspada boleh-boleh saja dilakukan. Namun, kekhawatiran yang berlebihan dan reaksioner juga salah sebab sikap demikian kontra-produktif dengan upaya penciptaan iklim investasi. Jadi, keberadaan pulau-pulau terluar dan pesisir perlu disikapi dengan mengedepankan pendekatan ekonomis dan kesejahteraan masyarakat daerah.

"Menurut hemat saya, menyikapi persoalan seperti kasus Pulau Bidadari mestinya secara responsif-rasional. Jangan cenderung reaksioner padahal belum tahu secara jelas kondisi sebenarnya. Apalagi, saya yakin, pemerintah daerah tidak akan berani sewenang-wenang menjual pulau-pulau milik negara ini. Pasti ada rujukan hukum yang menjadi dasar kebijakannya," ungkap anggota DPR dari Dapil Jabar III ini kepada *Berita Indonesia*.

"Sepertinya kita mengedepankan nasionalisme tapi implikasinya malah jadi buruk bagi kita sendiri. Pihak investor asing akhirnya jadi malas menanamkan modalnya".

Salah satu solusi mengatasi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang terus menaik adalah bagaimana daerah mampu secara kreatif menarik investasi sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku nasional.

"Sepanjang memakai rujukan nasional, pemerintah daerah perlu dipacu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan daerahnya, termasuk memberdayakan pulau-pulau kecil yang berada di wilayah administratifnya agar dimasuki investor asing. Setiap daerah harus berkreasi menciptakan lapangan kerja agar pendapatan dan daya beli masyarakatnya bisa meningkat karena mereka punya pekerjaan. Lapangan kerja sendiri ada berkat investasi, baik dari lokal maupun asing," cetus Deding Ishak.

Untuk itu, masih kata Deding, semua pengambil kebijakan di daerah dimana pulau tersebut berada harus duduk satu meja, misalnya antara pemerintah daerah dengan pihak DPRD-nya, yang *nota bene* mewakili kepentingan masyarakat. Singkatnya, nasionalisme yang dikedepankan bukanlah nasionalisme sempit. ■ **af**



DR. DEDING ISHAK IBNU SUJA

MENDORONG INVESTOR

INVESTOR PERLU DIDORONG DALAM UPAYA MENGELOLA PULAU-PULAU KECIL.

Negeri ini memiliki beribu pulau dan laut dengan potensi sumber alam dan keindahan yang eksotik. Banyak dari pulau itu yang belum dikelola kemudian ditawarkan kepada swasta untuk menggarapnya. Penguasaan pulau-pulau oleh investor untuk wisata sebenarnya juga sudah terjadi seperti gugusan Kepulauan Seribu, Jakarta. Sehingga mestinya kasus seperti Pulau Bidadari yang dikelola oleh investor Inggris, Ernest Lewadowksy, tak perlu dibesar-besarkan lagi.

Sebagai investor, Ernest memiliki perizinan lengkap, mulai dari izin pemerintah pusat hingga daerah. Pe-

nguasaan tanah ternyata hanya 4,54 hektare dari 15,400 hektare luas pulau kecil itu dengan status hak pakai untuk pengelolaan wisata dengan izin investasi asing sekaligus dengan syarat-syarat menjaga konservasi pantai. Bahkan proses perizinannya pun memakan waktu cukup lama sekitar sepuluh tahun. Payung hukum dan aturan-aturan yang mendorong investor mengelola pulau ini telah jelas.

Salah satunya adalah Keppres No. 38 Tahun 2004 mengenai investasi di pulau-pulau kecil. Keppres ini mengatur larangan berinvestasi di pulau yang dikuasai secara keseluruhan. Keppres ini juga diperkuat dengan pedoman pe-

ngelolaan pulau-pulau kecil. “Jika payung hukum dan aturan-aturannya sudah jelas, maka investor asing pun tidak ada salahnya kita dorong untuk masuk,” kata Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian, menurut Rokhmin, sistem investasinya pun perlu diatur. Menurutnya sistem pemberdayaan pulau-pulau kecil itu menggunakan sistem investasi bersama (*Joint investment*). Dengan sistem investasi bersama ini pemegang sahamnya adalah masyarakat lokal bersama dengan Pemda dan investor. (*Lihat Berita Wawancara: Rokhmin Dahuri-red*) ■ **AD**



Ayam Singapura di Abang Besar

INVESTOR Singapura mulai melirik pulau-pulau kecil di seputar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan negara itu. Sebagaimana Pulau Bulan yang jadi tempat peternakan babi dan buaya, kini investor Singapura memilih Pulau Abang Besar untuk pengembangan ternak unggas bagi kepentingan ekspor. Kebetulan, kebutuhan daging itik semakin meningkat dari konsumen Singapura.

Permodalan untuk areal peternakan unggas itu dimobilisasi oleh sebuah konsorsium swasta Singapura. Seperti dikutip *ANTARA*, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), Said Jafar menyatakan, Pemprov Kepri hanya menyediakan lahan serta tenaga kerja. Sedangkan untuk teknologi dan pengawasan produksi, dilakukan pihak Singapura, sesuai standar yang mereka inginkan.

Pengawasan produksi dan teknologi peternakan, menurut

Jafar, akan sangat ketat dilakukan pihak investor. “Karena ini menyangkut standar dan efisiensi mereka. Juga demi menghindari dari berbagai wabah virus, sehingga layak ekspor ke mancanegara,” ungkap Jafar.

Beberapa tahun sebelumnya, kegiatan peternakan babi dan buaya di Pulau Bulan telah dilakukan oleh sebuah konsorsium investasi di bawah kendali salah satu anak perusahaan konglomerat Liem Sioe Liong.

Selain budidaya peternakan dan perikanan, investor Singapura juga sedang mempelajari investasi di sektor pertanian, khususnya hortikultura. Pihak Singapura juga diberi kewenangan penuh dalam hal penerapan teknologi dan pemasaran sayur mayur serta buah-buahan ini.

Lokasi yang diberikan Pemprov Kepri adalah di kawasan Wacopek, Kabupaten Bintan. Pemprov minta pihak Singapura menampung semua hasil produksi, tanpa harus dilakukan sortir. Dengan catatan, seluruh panen itu hanya untuk kebutuhan lokal Singapura, tidak dipasarkan ke negara lain. ■ **RH**

Inilah 12 Pulau Terluar

Ada 12 pulau terluar di Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga, rawan penguasaan efektif, dan rentan menjadi sengketa perbatasan.

Di seluruh Indonesia ada 92 pulau kecil terluar yang tersebar di 19 provinsi. Sebanyak 67 pulau (28 pulau berpenduduk dan 39 pulau belum berpenduduk) di antaranya berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga.

Dari jumlah itu ada 12 pulau diantaranya rawan pencurian ikan (*illegal fishing*) dan penguasaan efektif (*effective occupation*) oleh negara tetangga serta rentan menjadi sengketa perbatasan.

Di bawah ini profil 12 pulau terluar Indonesia yang disarikan dari buku "Profil Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia," karya Alex SW Retraubun dan Sri Atmini, diterbitkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (2004).

Alex SW Retraubun adalah Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

1. Pulau Rondo

Secara administratif termasuk wilayah Kelurahan Ujung Ba'u, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), terletak di ujung utara Pulau Weh. Pulau Rondo adalah pulau terluar strategis di ujung barat Indonesia yang menjadi jalur pelayaran internasional, berbatasan dengan India, tidak dihuni tetap dan hanya dihuni oleh petugas jaga mercusuar. Memiliki potensi kekayaan alam (perikanan dan terumbu karang), namun rawan pencurian ikan.

2. Pulau Sekatung

Secara administratif termasuk wilayah Desa Air Payang, Kelurahan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau. Pulau seluas 0,3 kilometer persegi ini terletak di utara Kepulauan Natuna, masuk Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Termasuk gugusan Pulau Natuna selain Pulau Sedanau, Bunguran, dan Midai. Tidak berpenghuni. Sering digunakan sebagai persinggahan nelayan lokal dan asing. Memiliki potensi kekayaan

alam (perikanan dan terumbu karang), namun rawan pencurian ikan.

3. Pulau Nipa

Secara administratif termasuk wilayah Desa Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Riau. Pulau kecil berbentuk lonjong dengan luas sekitar 60 hektar, 80 persen merupakan batuan karang mati dan 20 persen batuan berpasir. Berbatasan dengan Singapura. Tidak berpenghuni. Di sekitar pulau dijadikan penambangan pasir sehingga menyebabkan abrasi yang mengancam tenggelamnya pulau di tengah pelayaran lalu-lintas internasional yang frekuensinya tinggi.

4. Pulau Berhala

Secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Tanjungpinang, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini berada di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia. Tidak berpenghuni. Memiliki luas sekitar 2,5 kilometer persegi. Memiliki potensi kekayaan alam (keindahan hamparan terumbu karang bawah laut yang mengelilinginya dan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi). Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif oleh negara tetangga.

5. Pulau Marore

Secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Tabukan, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Sebuah pulau kecil seluas 214,49 hektar di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina. Berada di kepulauan berpenduduk sekitar 640 jiwa. Termasuk gugusan Pulau Kawio, merupakan wilayah khusus di perbatasan Filipina yang disebut *check point border crossing area* (titik pertemuan batas wilayah perlintasan). Pulau ini rawan pencurian ikan.

6. Pulau Miangas

Secara administratif termasuk wilayah Desa Miangas, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau ini adalah bagian dari gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina. Memiliki luas sekitar 3,15 kilometer persegi. Jarak Pulau Miangas dengan Kecamatan Nanusa sekitar 145 mil, sedangkan jaraknya ke Filipina hanya 48 mil. Dihuni

penduduk yang mayoritas dari Suku Talaud. Pada 2003, jumlah penduduk sebanyak 678 jiwa. Karena lebih dekat dengan Filipina, perkawinan penduduk dengan warga negara Filipina sulit dihindari. Bukan hanya itu, dilaporkan, mata uang yang mereka gunakan adalah Peso (mata uang Filipina). Pulau sudah diterangi listrik yang bersumber dari PLTD 10 KVA. Pulau Miangas pernah diduduki kolonial Belanda sejak tahun 1677. Sejak 1891, Filipina mengklaim Pulau Miangas sebagai wilayahnya. Namun, berdasarkan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional, belakangan Filipina sudah menerima dan mengakui Pulau Miangas sebagai wilayah NKRI. Pulau ini rawan aksi terorisme dan penyelundupan.

7. Pulau Marampit

Secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Pulau Karatung, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Sebuah pulau di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina. Pulau seluas 12 kilometer persegi ini adalah pulau terluar yang dibatasi Samudera Pasifik di sebelah utara dan timur. Sarana navigasi pelayaran dan dermaga sampai kini belum terpasang di pulau berpenghuni dengan jumlah penduduk sekitar 1.436 jiwa ini. Karena berhadapan dengan laut lepas, pulau ini rawan abrasi, pencurian ikan, dan penguasaan efektif oleh negara tetangga.

8. Pulau Batek

Secara administratif termasuk wilayah Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebuah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, persisnya berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Kupang, NTT, dan Oekusi, Timor Leste. Pulau seluas sekitar 25 hektar ini menjadi tempat bertelur penyu-penyu laut dan lokasi migrasi lumba-lumba. Untuk mencapai pulau ini relatif mudah karena perairan di sebelah utaranya merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Jalur 3 yang menjadi jalur pelayaran internasional. Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif oleh negara tetangga.

9. Pulau Dana

Secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di sebelah selatan Pulau Rote yang merupakan pulau terluar berbatasan dengan Australia. Posisi strategis karena

menjadi pintu masuk jalur pelayaran internasional (ALKI) Jalur 3. Pulau yang tidak berpenghuni ini berjarak 120 kilometer dengan Kota Kupang dan sejauh 4 kilometer dengan Pulau Rote. Untuk mencapai lokasi pulau ini bisa ditempuh dengan perahu motor. Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif oleh negara tetangga.

10. Pulau Fani

Secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua. Pulau ini berbatasan dengan Republik Palau dan termasuk gugusan Pulau-pulau Asia. Dari Kota Sorong jaraknya 220 kilometer. Dapat dicapai dengan kapal motor selama 35 jam. Pulau dengan luas wilayah sekitar 9 kilometer persegi ini berpenghuni. Penduduknya lebih sering berinteraksi dengan warga negara tetangga. Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif oleh negara tetangga.

11. Pulau Faniido

Secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Supiori Utara, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Bagian dari gugusan Pulau-pulau Mapia, pulau tak berpenghuni yang berbatasan dengan Republik Palau. Luasnya sekitar 0,1 kilometer persegi yang dikelilingi hamparan terumbu karang dan dengan pantai berpasir. Dengan ibu kota Biak Numfor berjarak sejauh 280 kilometer. Pulau ini bisa dicapai dengan menggunakan pesawat udara dan kapal laut rute Jakarta-Biak-Mapia. Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif oleh negara tetangga.

12. Pulau Bras

Secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Supiori Utara, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Terletak di ujung utara gugusan Pulau-pulau Mapia, pulau ini berbatasan dengan Republik Palau. Luasnya sekitar 3,375 kilometer persegi. Jarak Pulau Bras dengan Kabupaten Biak Numfor sejauh 280 kilometer dan dengan Pulau Supiori 240 kilometer, bisa dicapai dengan perahu motor. Pulau berpenghuni sekitar 50 jiwa penduduk yang bermata pencarian nelayan dan pembuat kopra ini memiliki potensi wisata terumbu karang. Tapi rawan abrasi dan rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif oleh negara tetangga.

Pemerintah Indonesia harus benar-benar memperhatikan 12 pulau terluar tersebut bila tidak ingin menghadapi masalah sengketa perbatasan dengan negara tetangga di kemudian hari. ■ **RF**

Geliat Pulau-Pulau Kecil

PULAU YANG TELAH BERKEMBANG UNTUK KEGIATAN EKONOMI

1. Kepulauan Seribu
2. Pulau Tinjil, Banten
3. Pulau Moyo, NTT
4. Bunaken
5. Pulau Komodo
6. Nusa Lembangan, Nusa Ceningan, Bali
7. Kepulauan Riau
8. Taka Bonerate
9. Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi)



WAKATOBI (INDUSTRI SELAM DUNIA)

Lokasi : Pulau Tomia (70 Km2) di Kep. Tukang Besi, Sulawesi Tenggara
 Aksesibilitas : - Udara : 2 Jam 15 menit dari Bali
 - Laut : 20 jam dari Makasar atau Kendari

Kegiatan wisata bahari (selam)

Infrastuktur yang dibangun : Penginapan (11 kamar-22 orang), Airport, telepon dan internet

Asal wisatawan : Seluruh dunia

Community development : Pendidikan, peribadatan, perbaikan dermaga

Pendapatan : Rp 14,7 miliar (\$US 1.632.900) per tahun

- Penginapan :
 Tarif per orang \$US 45 - 10 bulan= \$US 297.000
 Paket (12 hari) - \$US 1.998 per orang - \$US 1.098.900 per tahun
- Perjalanan
 \$US 270 per orang - \$US 237.600 per tahun dengan kapal
 BEP diperkirakan akan tercapai pada tahun ke-15



PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN P. KECIL DI MALDIVES

Dilakukan oleh operator internasional (Hilton, Villa, dsb)

Satu pulau dikelola oleh satu manajemen

Berbasis pada:

- SEKTOR PERIKANAN (pengalangan ikan, pembuatan kapal)
- SEKTOR PARIWISATA (pemanfaatan pulau, perdagangan, kerajinan)

Lebih dari 500.000 turis (utamanya dari Amerika, Eropa, Jepang) berkunjung setiap tahun.

Penentuan pengelola dilakukan dengan sistem tender terbuka secara nasional dan internasional.

Sistem pengelolaan (sewa) pulau berdasarkan kontrak selama 25-35 tahun sesuai jumlah investasi yang ditanam.

Dalam kontrak diatur secara rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengelola beserta sanksi dan pengawasan pulau.

Besarnya sewa bervariasi US\$ 3,000 - 7,500/ tempat tidur

Pajak untuk pemakai sebesar US\$ 6/orang/hari

STRATEGI PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL (PPK)

Pengembangan akses gugus pulau ke pusat kegiatan kedaulatan terdekat

- Pusat kegiatan utama menurut RTRW kelautan nasional
- Pusat kegiatan ekonomi di negara tetangga terdekat. ■ **RH**

JUMLAH PPK TERLUAR BERBATASAN LANGSUNG DENGAN NEGARA TETANGGA

Negara	Jumlah Pulau
Malaysia	21
Vietnam	2
Filipina	12
Palau	7
PNG	1

Negara	Jumlah Pulau
Australia	26
Timor Leste	5
India	11
Singapura	4
Total	92 Pulau Terluar

Membenahi Natuna

Kalau di sana didirikan sebuah sentra pendidikan, maka dapat berfungsi sebagai penjaga negara.

Dalam sebuah pertemuan dengan Aisyah Amini, politikus perempuan senior yang kala itu tengah berkunjung ke Ma'had Al-Zaytun (MAZ), Syaykh AS Panji Gumilang menjelaskan, bahwa MAZ sedang membangun sentra pendidikan di pulau Rupert, Bengkalis, Riau, dengan luas lahan sekitar 5 ribu hektar.

Sebenarnya Syaykh lebih melirik kepada pulau Natuna yang masih kosong. Hal itu sudah pernah dibincangkan dengan Bupati Bengkalis, Bapak Syamsul Rizal.

Menurut Syaykh, Natuna lebih dekat ke Vietnam. Bisa dicapai hanya dengan menumpang *motorboat*. Sayangnya, pertahanan wilayah di sana sangat minim. Jadi, jika di sana didirikan sentra pendidikan, maka dapat berfungsi sebagai penjaga negara. Aset negara akan aman.

Di peta, wilayah itu seolah tak memiliki keistimewaan. Tetapi bila kita menginjakkan kaki ke sana, akan kita ketahui bahwa pulau itu sangat kaya. Berbeda dengan Rupert, Natuna adalah pulau yang kokoh, karena punya akar. Bukan yang muncul tanpa akar. Jadi tak mudah diserang ombak akibat diguncang gempa.

Aisyah sangat terkesan dengan ide mendirikan sekolah di pulau Natuna itu. Dia mengaku belum pernah mendengar, ada orang yang punya ide membangun sebuah pesantren di wilayah Natuna. Kalau itu terjadi, menurutnya, pasti sangat membantu negara kita.

“Karena sebetulnya, pengawasan terhadap wilayah negara kita yang cukup luas ini, sangat kurang. Selama ini, kita sangat mengandalkan tentara. Akan jauh lebih efektif, bila ada pesantren, di wilayah itu. Saya berharap, mudah-mudahan hal ini akan menjadi kenyataan. Saya akan mengembangkan ide ini. Mudah-mudahan, hal itu dapat terlaksana,” kata politisi perempuan yang telah aktif di parlemen sejak akhir tahun 1960-an ini.

“Natuna itu pulau, sekaligus menjadi penjaga batas wilayah. Angkatan laut kita tidak punya kapal untuk menjaga. Kasus Ambalat muncul juga karena pengalaman Sipadan dan Ligitan,” ujarnya.

Menurutnya, hakekat kedaulatan itu harus dihayati. Dan tugas menjaga ke-

daulatan wilayah adalah di tangan TNI. Aisyah sangat prihatin ketika masalah Blok Ambalat mengemuka. Sebagai penjaga perbatasan, TNI mestinya diberi fasilitas yang baik dan memadai. Saat ini, jumlah kapal TNI Angkatan Laut sangat minim. Bahkan kapal-kapal asing jauh lebih modern dan lebih cepat dari KRI yang berpatroli di wilayah lautan kita.

Di sisi lain, negara kita adalah negara yang kaya dengan sumber alamnya, termasuk laut. Khususnya kekayaan laut, Indonesia belum mengeksplorasinya secara

maksimal. Yang lebih banyak mengambil malah negara-negara lain seperti Thailand, Jepang, India dan sebagainya.

Dalam rapat-rapat kerja, Aisyah sering mengemukakan saran untuk memaksimalkan eksplorasi kekayaan laut. Kalau hanya dijaga, tentu akan mengeluarkan biaya operasional yang besar. Sebaliknya, jika pemerintah memberi peluang bagi para pengusaha dalam negeri untuk menggali kekayaan laut dan memberikan insentif, maka para penjarah itu tidak akan berani datang lagi. Sebab, para pengusaha dalam negeri itu akan ikut berperan serta menjaga wilayah laut yang menjadi konsesi mereka.

Bahkan Aisyah mengungkapkan ide untuk mendorong para pensiunan AL untuk menjadi pengusaha kekayaan laut, karena mereka yang sehari-hari berada di laut tentu sangat mengenal medan. ■ MAZ, RH



AISYAH AMINI

STRATEGI PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL

Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc, Ph.D *

Spektrum isu pulau-pulau kecil begitu luas dan sangat membutuhkan dukungan lintas sektoral. Sasaran pengelolaan pulau kecil, baik pulau kecil terluar maupun pulau kecil pedalaman adalah sama, yakni manusia dan sumberdaya alamnya.

Di pulau-pulau kecil itu nyata terlihat sentuhan pembangunan begitu rendah, terlebih di pulau terluar atau perbatasan yang lalu dibumbui pula dengan aneka persoalan politis, sebab terkait dengan penjagaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bila diidentifikasi, terdapat sejumlah akar persoalan yang membelenggu pulau-pulau kecil. Seperti, belum dicapainya kesepakatan bersama tentang perbatasan wilayah laut dengan negara tetangga, padahal kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga semakin tajam. Kemudian, masih kurang terkendali kegiatan *illegal economic*, tingkat keterisolasian pulau-pulau kecil yang relatif tinggi, minimnya kualitas sumberdaya manusia yang ada di sekitar pulau, serta kekosongan hukum atau belum adanya peraturan yang jelas untuk mengelola pulau-pulau kecil.

Karena itu, belajar dari pengalaman selama ini maka upaya pembangunan yang pemerintah lakukan di pulau-pulau kecil terluar haruslah menyentuh bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, perumahan, energi alternatif untuk penerangan, pemberdayaan ekonomi misalnya melalui pariwisata bahari, yang disertai dengan melakukan sejumlah penelitian.

Pemberdayaan pulau-pulau kecil juga harus dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan kedaulatan (*sovereignty approach*) dan pendekatan ekonomi (*prosperity approach*). Kedua pendekatan dilakukan dalam tiga kepedulian, ini hasil dari pelajaran berharga lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan di pengadilan Mahkamah Internasional Den Haag 17 Desember tahun 2002, yaitu *effective occupation*, *continuous presence*, dan *preservation and conservation*.

Kepedulian *effective occupation*, ditandai misalnya dengan melakukan reklamasi (contoh di pulau Nipa), relokasi (pulau Wetar), dan pembangunan infrastruktur (pulau Batek, Mafia). *Continuous presence* ditandai dengan melakukan administrasi yang baik (sebagai contoh, pulau Batek belum tercatat di Provinsi NTT), mendata pulau-pulau yang belum teregister dan terdeposit di PBB, mendirikan pos TNI AL, dan mendirikan alat bantu navigasi seperti suar, menara suar, dan rambu suar.

Preservation and conservation terkait dengan pemeliharaan dan ekologi pulau. Seperti, melakukan konservasi di pulau Rondo dan pulau Batek, membuat peraturan Sulu Sulawesi Ecoregion (di pulau Miangas, pulau Marore), atau menerapkan aturan Solomon Bismarck Marine Ecoregion (pulau Mafia).

Untuk mengisi kekosongan hukum dalam mengelola pulau-



pulau kecil maka dilahirkanlah Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2005, berisi tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar yang masuk dalam cakupan Perpres ini. Kondisi kekinian ke-92 pulau kecil terluar itu adalah, terdapat 36 pulau yang berpenghuni, kisaran luasnya antara 0,05-200 km persegi panjang, dan pada umumnya masih berupa pulau alami. Diantara ke-92 pulau kecil terluar yang mengelilingi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, itu terdapat 12 pulau yang membutuhkan perhatian khusus sebab berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni pulau Rondo, pulau Berhala, pulau Nipa, pulau Sekatung, pulau Marore, pulau Miangas, pulau Dana, pulau Batek, pulau Marampit, pulau Fani, pulau Fanildo, dan pulau Bras.

Batek, pulau Marampit, pulau Fani, pulau Fanildo, dan pulau Bras.

Perpres 78 mempunyai tujuan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan. Juga untuk memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, dan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, fokus Perpres 78 adalah meliputi bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, pertahanan keamanan, serta meliputi bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Bila disimpulkan strategi pengembangan pulau-pulau kecil terluar haruslah menjadikan pulau-pulau itu sebagai beranda depan negara yang memiliki tingkat keamanan, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Caranya dengan mempercepat pembangunan kawasan sebagai pusat pertumbuhan, membuka keterisolasian wilayah, dan mengembangkan kerjasama ekonomi perwilayahan (subregional) yang sinergis dan seimbang.

Percepatan pembangunan harus pula menganut pola keserasian antara pendekatan keamanan (*sovereignty*), dan pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity*) yang berbasis karakteristik adat-istiadat lokal.

Strategi pengembangan pulau-pulau kecil terluar itu sudah memiliki instrumen hukum yang lengkap, terdiri Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, dan yang terbaru Peraturan Presiden No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar.

*Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc, Ph.D, adalah Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Guru Besar Fakultas Teknik Kelautan ITS Surabaya.

● **PROF. DR. IR. ROKHMİN DAHURI, MS**

(Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan RI)

EKONOMI PERLU DIKEDEPANKAN

Framework pembangunan bangsa yang dipraktekkan selama ini mengakibatkan pulau-pulau besar saja yang dikenal, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan lain-lain. Maka, pulau-pulau besar itu saja yang menjadi pusat-pusat aktivitas utama dalam pembangunan. Akibatnya, pulau-pulau kecil atau gugusan pulau kecil lainnya tidak dikenal bahkan kawasan ini terlantar dan tidak dikelola dengan baik. Padahal konsekuensi logisnya banyak. Bukan saja daerah tersebut tertinggal dalam pembangunan, tapi bahkan bisa menjadi 'ancaman' yang lebih serius. Maka, menurut **Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS**, paradigma pembangunannya harus diubah. Berikut hasil petikan wawancara *Berita Indonesia* bersama mantan Menteri Kelautan RI, Rokhmin Dahuri, yang kini sebagai Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor:

Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Pulau itu terpisah oleh laut. Masalahnya, pembangunan pulau-pulau kecil tampaknya tidak begitu terdengar. Bagaimana penanganan keberadaan pulau-pulau kecil ini?

Sebagai negara kepulauan, Indonesia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, telah menjadikan bangsa ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, *framework* pembangunan bangsa yang dipraktekkan selama ini mengakibatkan kita hanya mengenal pulau-pulau besar yang menjadi pusat-pusat aktivitas utama dalam pembangunan. Akibatnya banyak yang kurang mengenal pulau-pulau kecil atau gugusan pulau kecil lainnya sehingga kawasan ini menjadi telantar atau tidak dikelola dengan baik.

Jika pulau-pulau kecil tersebut telantar, tentu akan berdampak buruk?

Tentu, konsekuensi logis dari keadaan ini menimbulkan kesenjangan pertumbuhan dan kurangnya sinkronisasi pengembangan antar wilayah. Pada gilirannya, hal ini akan membawa kepada munculnya kerawanan baru terutama pada pulau-pulau di kawasan perbatasan. Contoh paling nyata yang belum lama kita rasakan adalah Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 di Den Haag, Belanda yang memutuskan bahwa Pulau Sipadan - Ligitan berada dalam kedaulatan Malaysia.

Alasan utama keputusan

itu dilandasi oleh adanya tindakan administratif secara nyata oleh Pemerintah Inggris pada kedua pulau tersebut sejak tahun 1917. Dengan perkataan lain dari pengalaman ini dapat kita simpulkan bahwa tanpa adanya perhatian terhadap pemberdayaan pulau-pulau kecil, terutama yang berbatasan dengan negara asing, maka kedaulatan bangsa Indonesia sesungguhnya dalam ancaman besar. Bukan itu saja, bayangkan, jika 15 ribu pulau itu tidak ditempati, justru akan menjadi beban. Di sana akan ada migran gelap, sarang narkoba, sarang perompak dan lain-lain.



PROF. DR. IR. ROKHMİN DAHURI, MS

Jadi, bagaimana mestinya?

Ya, oleh sebab itu sentuhan pembangunan pada pulau-pulau serupa perlu dilakukan meskipun memiliki tingkat keisolasian yang tinggi. Sentuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara menarik investasi ke pulau-pulau tersebut, mendeklarasikan pulau yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi sebagai kawasan konservasi, melakukan penataan ruang, mendorong nelayan melakukan aktivitas penangkapan di perairan sekitar pulau, juga merangsang aktivitas ekonomi masyarakat penghuni pulau melalui praktek-praktek tertentu.

Lalu, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil tersebut?

Pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil tersebut memang masih dihadapkan pada berbagai masalah antara lain letaknya yang terpencil, terbatasnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia. Namun demikian yang juga perlu diperhatikan adalah daya dukung pulau mengingat sifatnya yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di kawasan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat. Sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan potensi sumberdaya pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Tadi Bapak katakan bahwa paradigma dalam mengelola pulau-pulau kecil tersebut harus diganti?

Ya, ide saya sejak menjadi Dirjen, Menteri Perikanan dan Kelautan hingga sekarang, bahwa seharusnya kegiatan ekonomi dan pendekatan kesejahteraan masyarakat perlu dikedepankan. Lalu pendekatan yang lain-lain, termasuk keamanan itu mengiringi.

Mengelola apalagi membangun kan perlu dana Pak. Menurut Bapak, dananya dari mana?

Dari dua sumber, APBN atau APBD dan dari swasta. Toh negara lain yang jauh lebih kecil dalam arti potensi sumber daya alamnya, bisa makmur. Seperti contohnya, Maret lalu saya ke Mauritius, dekat Afrika Selatan, menghadiri *International Meeting In Small Island*. Saya kagum, kepulauan itu makmur sekali. Mereka sudah mencapai pendapatan 4000 GNP/kapita. Kalau negara kita baru 800 GNP/kapita. Padahal setelah ditelusuri,

kekuatan di sana itu hanya dari 3 sumber. Yaitu, Ekotourism, Perikanan dan Perkebunan Tebu. Mauritius ini berhasil mengekspor 800 ribu ton gula tebu, terutama ke Perancis dan Uni Eropa lain. Padahal pulaunya itu lebih tandus, sebagian batu-batuan besar. Tapi dengan tenaga sukarela sejak tahun 40-an dibantu Perancis mereka menyingkirkan batu-batuan, kemudian *top soil*-nya ditanami tebu. Tata ruangnya pun diatur dengan baik.

Jadi, tata ruang juga mesti diperhatikan Pak?

Pengaturan tata ruang juga perlu

diperhatikan. Ini berkaitan dengan Pedoman Pengelolaan dan Pedoman Investasi. Dalam pedoman itu diatur, misalnya maksimal yang boleh dibuka hanya 40%, yang 60% tetap sebagai kawasan lindung. Pinggir pantai atau *green belt* harus dipertahankan. Kemudian daerah-daerah yang kelerengannya lebih besar dan sama dengan 45%, harus tetap dibiarkan menjadi hutan. Sebab bahaya jika diolah. Jadi, paradigma dalam menggarap pulau-pulau kecil tersebut harus memperhatikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kemudian keamanan dan tata ruang.

Mulai sekarang, pulau-pulau kecil itu harus mulai dibangun ya Pak?

Ya, kita bisa bayangkan jika pulau-pulau kecil, terutama pulau terdepan itu dibangun untuk industri perikanan, tourism, industri-industri yang tidak mencemari. Sehingga menjadi gemerlap, menjadi makmur sekaligus berfungsi sebagai fungsi keamanan, juga *security belt*. Yang bekerja di sana, bisa didanai oleh pembangunan daerah tersebut.

Bagaimana dengan investor asing?

Saya sedih, jika ada investor asing yang datang kok malah dicurigai. Padahal mestinya justru kita berupaya agar investor asing bisa masuk ke pulau-pulau kecil ini. Coba kita berkaca pada negara lain, yang mau menggarap pulau dengan memanfaatkan investor asing, kemudian bisa menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Seperti Mauritius, Maldives, investornya datang dari Australia, Prancis dan lain-lain.

Bagaimana dengan kasus Pulau Bidadari?

Itulah. Pengelolaan Pulau bidadari oleh tangan asing itu sudah melalui prosedur yang benar. Jadi tak ada masalah lagi. Tapi, kalau ada berita bahwa nelayan tidak boleh masuk ke perairan itu. Menurut saya itu hanya soal komunikasi saja. Seharusnya dijelaskan, kenapa tidak boleh? Mungkin boleh tetapi dengan syarat perahunya dicat dengan indah, jangan merusak terumbu karang, karena menjadi daya tarik wisatawan. Nah, kalau terumbu karangnya rusak akibat penangkapan ikan yang salah, misalnya karena dibom atau diracun, wajar jika nelayan tidak diperbolehkan mengambil ikan di sekitar situ.

Menurut Bapak, model investasinya seperti apa?

Saya pernah bicara dengan Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada masa Kabinet Gotong Royong. Investasi ini dengan sistem BOT atau *Built Operational Transfer*. Jadi, orang asing yang akan membangun dan memekerjakan tenaga kita, lalu kita mendapat keuntungan pajak. Bahkan dalam Kepmen sudah diatur juga ada semacam *DP (down payment)*. Maka, kalau ada orang asing yang ingin mengelola bagian pulau kita, kita pakai aturan yang jelas, termasuk statusnya apakah hak guna dan lain-lain. Kedaulatan tetap di tangan kita. Tetapi berkah ekonomi dapat kita nikmati. Sistem ini sudah saya usulkan sejak saya menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Saya berharap, ini dapat menambah sumber pendapatan negara. Selain dari pajak, aset-aset negara, juga dari berkah pulau-pulau kecil ini.

Tapi, apakah peraturan hukum kita sudah siap dengan masuknya investor asing ini?

Sudah. Tinggal mengoordinir saja. Ada UU Pokok Agraria, soal aturan investasi ada di BKPM, kalau PMA bagaimana, detail aturan pulau ada di Menteri Perikanan dan Kelautan. Tinggal dilihat lagi apakah ada hal-hal yang perlu disempurnakan, dan lain-lain. ■ RD



Berbagai masalah silih berganti muncul di tanah Papua. Akar permasalahan yang multi dimensional ini bermula dari rasa kecewa. Munculnya isu gerakan separatis makin memperumit keadaan. Penyelesaiannya perlu melibatkan seluruh stakeholder.

Persoalan Papua datang bertubi-tubi. Belum lagi satu selesai, muncul persoalan baru. Mulai dari soal pemekaran wilayah, Pilkada di Papua dan Irian Jaya Barat, gugatan atas keberadaan PT Freeport Indonesia, hingga permintaan suaka 43 warga Papua di Australia.

Semuanya ini menunjukkan permasalahan yang timbul di Papua sudah bersifat multidimensional. Paling tidak, itu yang dikemukakan Menhan Juwono Sudarsono. Mantan Menteri Pendidikan dan mantan Wagub Lemhannas ini memang sangat *concern* dengan persoalan yang terjadi di bumi Cendrawasih itu.

Karena sifatnya yang multidimensi, menyebabkan hampir setiap peristiwa yang terjadi cenderung mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di Papua. Bahkan tidak sedikit yang menjadi sorotan dunia internasional.



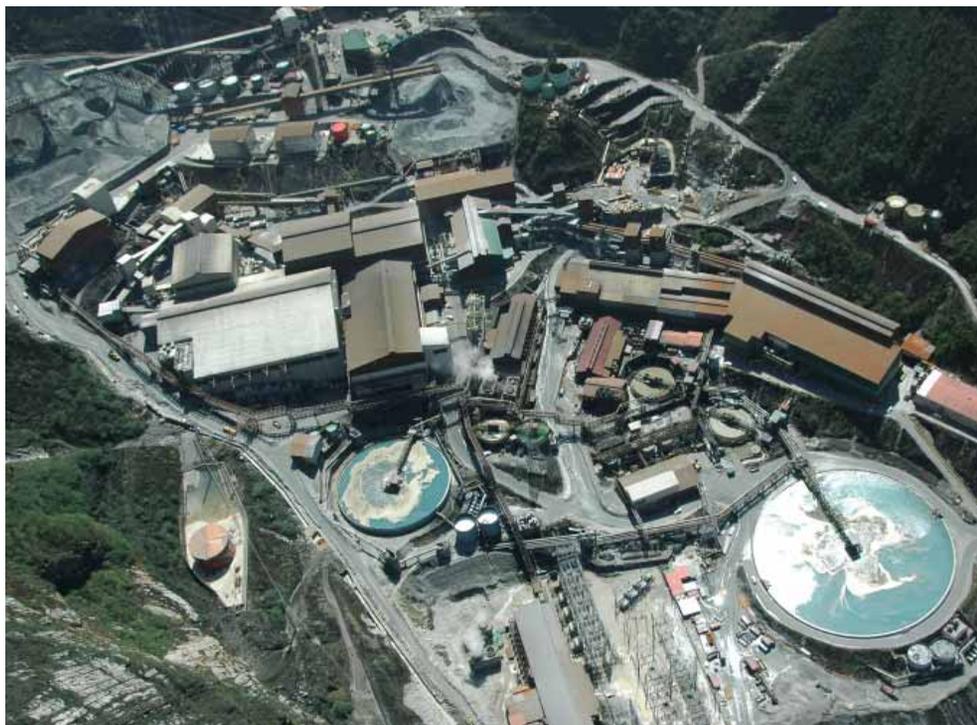
semua instansi terkait. Hal ini bertujuan agar berbagai gejolak politik dan keamanan di Papua dapat diredam. Selain itu upaya internasionalisasi isu Papua oleh pihak-pihak yang menghendaki campur tangan kekuatan asing juga dapat dihindari.

Soal PT Freeport Indonesia, Juwono menegaskan kembali bahwa Pemerintah

tingkan kondisi alam, sumber daya alam di Papua.

Berbicara soal Freeport, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi berpendapat aksi penolakan itu merupakan ungkapan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap perusahaan tambang emas ini. Masyarakat Papua tidak merasakan manfaat keberadaan PT FI. Sebab sejak perusahaan itu beroperasi di Papua tidak ada kemajuan signifikan baik di Timika maupun di seluruh wilayah Papua.

Freddy Numberi yang mantan Gubernur Irian Jaya (Papua) ini menyatakan, kedepan PT FI harus mengintrospeksi diri.



Multidimensi Masalah di Papua

Berkaitan dengan itu, Juwono berpendapat, penanganannya pun harus bersifat integral dengan melibatkan semua *stakeholder*. “Kebijakan penanganan masalah di Papua harus mampu menghilangkan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengatasi keterasingan,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR yang dipimpin ketuanya, Theo L Sambuaga di gedung DPR Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Papua memerlukan penanganan terpadu dan terintegrasi dari

tetap melanjutkan perjanjian dengan FI untuk mengelola penambangan emas dan tembaga di Papua. “Penambangan tak mungkin dihentikan pemerintah karena sudah terikat kontrak jangka panjang. Apabila terjadi masalah harus dibahas bersama dan tidak bisa seenaknya memberhentikan mereka berproduksi,” paparnya.

Solusi yang tepat, menurutnya, memperlakukan PT FI tetap beroperasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Salah satu dari isi perjanjian itu tentang lingkungan hidup, kesejahteraan penduduk serta memen-

“Bila perlu dengan mengubah manajemen dari orang yang tidak punya hati untuk orang-orang Papua dengan orang-orang yang memiliki niat untuk membangun Papua,” ujarnya seperti diberitakan *Suara Pembaruan* (18/3).

Purnawirawan Laksamana Muda TNI ini berpendapat PT FI seharusnya lebih banyak lagi merekrut orang-orang Papua. Apalagi banyak anak-anak Papua yang sudah menjadi sarjana. Saat ini dari sekitar 18.000 karyawan PT FI, hanya sekitar 4.500 orang yang penduduk asli Papua. Selebihnya berasal dari luar Papua dan bahkan warga negara asing.

Dia pun tidak setuju kalau PT FI ditutup. Karena tuntutan itu pada akhirnya terkait dengan investasi di Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Apalagi kalau penolakan terhadap perusahaan ini dikaitkan dengan isu merdeka di Papua.

Lebih Berat

Gubernur Lemhannas Muladi sependapat dengan Juwono. Dia bahkan menilai permasalahan di Papua yang demikian kompleks, lebih berat ketimbang daerah lain di Indonesia (*Kompas*, 24/3). Dia juga berpendapat pendekatan agama dan adat budaya tetap menjadi faktor penting dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Akar masalah Papua adalah problem kesejahteraan dan ketidakadilan. Potensi sumberdaya alam dan juga keterlibatan perusahaan multinasional juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Munculnya gerakan separatis Papua juga memperumit keadaan.

Soal gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan dinilai anggota DPD Muspani sebagai isu lama. "Kemerdekaan bukan isu baru, melainkan karena akumulasi kekecewaan. Ini problema sosial yang berubah menjadi problema politik. Karenanya, pendekatan keamanan semata tidak akan menyelesaikan masalah."

Di sisi lain, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional menengarai gerakan separatis Papua menggunakan jalur agama dan organisasi masyarakat seperti Dewan Adat Papua (DAP) untuk melaksanakan kegiatan politik praktis. Termasuk untuk mencari dukungan dari masyarakat Papua maupun dunia internasional.

Namun pendapat ini disanggah Koordinator Umum Advokasi Papua Tanah Damai, Pendeta Herman Saud. Menurutnya, sinyalemen gereja digunakan sebagai media komunikasi gerakan separatis di Papua terlalu berlebihan. "Sejak awal kami berjuang dengan azas kemanusiaan, tak ada niat gereja mau bentuk politik-politik," tuturnya.

Lebih dari itu, justru gereja dan berbagai pemuka serta kelompok agama lainnya bersama-sama menyerukan dan memperjuangkan perwujudan Papua sebagai tanah damai.

Ketua Presidium Solidaritas Nasional untuk Papua, Bonar Tigor Naipospos, mengimbau masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi apapun dengan cara damai, termasuk dengan aksi unjuk rasa sekalipun. Karena cara-cara seperti itu akan menambah simpati masyarakat. Apalagi para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh Papua lainnya sudah menyerukan bahwa tanah Papua adalah zona damai. ■ SP

Longsor itu Meminta Korban



PT Freeport Indonesia dilanda musibah. Tiga karyawan tewas, lima luka berat dan puluhan luka ringan. Mereka tertimpa longsor di lereng Grasberg, Mimika.

Musibah itu terjadi Kamis (23/3) dinihari. Diawali hujan lebat yang turun sejak Rabu sore. Guyuran air hujan yang meresap di lereng gunung di kawasan tambang emas terbuka PT Freeport Indonesia (PT FI) di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua itu pun berbuah bencana longsor.

Tak ayal tanah dan bebatuan dari lereng gunung di ketinggian sekitar 2.500 m dari permukaan laut itu menerjang "Mess Edelweis", mess karyawan perusahaan tambang emas yang berada di bawahnya. Sejumlah karyawan yang baru pulang tugas, saat itu tengah istirahat dan berada di ruang makan. Mereka pun menjadi korban. Tiga orang tewas, lima orang luka berat dan 26 lainnya mengalami luka ringan.

Kepala Humas PT FI, Sidarta Moersyid menjelaskan, tanah yang longsor itu berada di wilayah fasilitas penunjang, bukan di areal produksi (*Kompas*, 24/3).

Kejadian ini menunjukkan betapa masalah lingkungan kurang mendapat perhatian dari perusahaan yang mengelola kawasan pegunungan emas tersebut. Setidaknya, kondisi ini seharusnya sudah diantisipasi. Dengan cara tidak mendirikan bangunan di lereng tebing. Apalagi jika bangunan itu merupakan mess atau tempat tinggal bagi para karyawan.

Hasil Tim KLH

Abainya perusahaan ini terhadap masalah lingkungan juga diungkapkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Lembaga yang dipimpin Rachmat Witoelar, mantan Dubes RI di Rusia, sejak 10 - 24 Februari lalu mengirimkan tim investigasi ke wilayah penambangan PT Freeport Indonesia di Papua.

Lokasi pemantauan yang dilakukan tim berjumlah 24 orang ini mencakup

daerah penambangan di Grassberg, pabrik pengolahan bijih, pengelolaan tailing di Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA), pabrik pengeringan konsentrat (*dewatering*) di Amamapare dan pemantauan kualitas air laut di Estuari. Selain itu tim juga memantau pengelolaan lingkungan PLTU oleh PT Puncak Jaya Tower, manajemen PLTU di Amamapare yang terpisah dari PT FI.

Dari hasil pemantauan itu, tim menemukan pengelolaan air asam tambang dari sisi barat Grasberg belum memenuhi ketentuan baku mutu air limbah untuk pertambangan emas dan tembaga. Demikian juga air buangan yang keluar dari ModADA ke Estuari belum memenuhi baku mutu untuk parameter Total Suspended Solid (TSS).

Khusus mengenai PLTU PT Puncak Jaya Tower, emisi udara untuk parameter SO₂ di atas baku mutu dan pengelolaan *fly ash* dilakukan secara *open dumping* sehingga tidak memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan temuan itu, Meneg LH Rachmat Witoelar memerintahkan PT FI untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan air asam tambang agar memenuhi ketentuan yang berlaku dan mengelola dampak lingkungan dari penempatan *tailing* di ModADA agar dapat meminimalkan dampak lingkungan yang akan terjadi, terutama untuk mengurangi padatan tersuspensi (TSS) yang masuk ke Estuari. Menurut Rachmat, minimisasi dampak *tailing* ini dapat dilakukan melalui penerapan teknologi dan pemanfaatan *tailing* semaksimal mungkin.

Rachmat mengakui, saat ini pihaknya bersama Pemprov Papua dan Kabupaten Mimika tengah melakukan pembicaraan intensif dengan pihak PT FI mengenai upaya efisiensi pengendapan *tailing* di ModeADA. Pihak KLH akan menerapkan berbagai persyaratan tambahan agar dampak lingkungan yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. ■ SP, AM

♦ IRWAN HIDAYAT, PRES DIR PT SIDO MUNCUL

KOMITMEN YANG TAK PER

Berbasis inovasi dengan visi membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, ia menjadikan perusahaannya salah satu pemain besar dalam industri jamu modern.



IRWAN HIDAYAT

ISTIMEWA

ngat Sido Muncul, ingat mudik gratis. Perusahaan jamu asal Semarang, Jawa Tengah ini bisa dibilang salah satu pelopor acara mudik yang setiap tahun selalu dibanjiri sekitar 140.000 pedagang jamu dengan melibatkan ratusan armada bus.

Adalah Irwan Hidayat, Presiden Direktur PT Sido Muncul, penggagas hajatan yang dilakukan sejak tahun 1990 itu. Berkat tangan dinginnya pula ia berhasil menjadikan perusahaannya berbasis inovasi dan tampil sebagai *benchmark* atau standar di industri jamu nasional.

Irwan dan empat adiknya adalah generasi ketiga yang mewarisi perusahaan jamu ini dari almarhum neneknya, Ny Rakhmat Sulistyo. Awalnya, pada tahun 1940, hanya berupa usaha kecil dengan tiga orang karyawan. Neneknya pun mengawalnya saat sudah berusia 55 tahun. Jamu yang diproduksinya kala itu ditumbuk dan dibungkus sendiri.

Pada tahun 1973, Irwan mulai bekerja di PT Sido Muncul. Ia langsung diangkat sebagai direktur. Prinsipnya yang selalu dipegang teguh dalam memimpin 2000-an karyawannya adalah lebih menghargai proses daripada hasil.

Ia lebih menghargai cara-caranya, rasionalnya, komitmennya, daripada hasilnya. Ia tidak pernah bersikap lebih menghargai staf yang berhasil mencapai omset besar daripada yang omsetnya kecil. Yang ia hargai adalah apakah pencapaian itu sudah dilakukan dengan benar.

Kepada dirinya sendiri, prinsip itu juga ia terapkan. Semua pekerjaan ia lakukan dengan sebaik mungkin, penuh komitmen, dan melakukannya dengan rasional.

Tak banyak memang perusahaan yang menerapkan prinsip demikian. Yang lebih menarik lagi, bukan profit yang menjadi ukuran sukses melainkan seberapa banyak Sido Muncul memberi manfaat. Maka tak aneh jika berbagai penghargaan telah diterima sebagai wujud sumbangsih Sido Muncul bagi masyarakat dan lingkungan.

"Saya punya keyakinan, kalau bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, kami seperti memberi pagar kepada diri kami sendiri supaya kami tidak melenceng. Dan saya juga yakin kalau bermanfaat dan berguna bagi siapa saja maka Sido Muncul pasti untung," ujar Irwan.

Visi tersebut oleh manajemen PT Sido Muncul diterapkan pertama kali pada tahun 1994.

Alasan Irwan memilih visi tersebut adalah karena memang visi tersebut dinilai paling cocok untuk situasi di Indonesia. Ia melihat dewasa ini setiap orang gampang melakukan kesalahan.

NAH LUNTUR

Misalnya mencemari lingkungan, atau yang lebih berat lagi merugikan konsumen. Padahal konsumen kita dikenal sebagai konsumen yang bisanya cuma menerima saja dan seringkali menjadi korban tetapi tidak pernah menuntut.

Inovator

Untuk industri jamu, Sido Muncul tergolong salah satu pemain besar. Sido Muncul tumbuh rata-rata sebesar 30-40 persen setiap tahunnya. Perusahaan jamu ini memiliki serangkaian produk dengan jumlah keseluruhan tidak kurang dari 150 produk yang dapat dibagi atas produk jamu generik dan *branded* (bermerek).

Irwan juga bertekad untuk terus mengembangkan produk jamu yang dapat menyembuhkan penyakit degeneratif seperti darah tinggi, kencing manis, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan lain-lain.

Berkat visi 'membawa manfaat bagi semua', Sido Muncul mendapat berbagai penghargaan.

Sido Muncul meletakkan basis performa perusahaan kepada inovasi. Menurut Irwan, urutannya yang pertama adalah komitmen. Kalau orang memiliki komitmen, dia akan menghasilkan konsentrasi dan kreativitas. Dan kalau kreatif dirinya akan inovatif. Dan jika inovatif akan menghasilkan perbaikan (*improvement*).

Tak mengherankan manajemen menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk riset dan pengembangan. Irwan mengaku bahwa Sido Muncul banyak menggantungkan hidup perusahaan terhadap penelitian. Anggaran penelitian bisa mencapai miliaran rupiah. Cukup besar untuk ukuran industri jamu saat ini.

"Itu kami lakukan karena kami melihat itu untuk kepentingan konsumen. Bagaimana kami membuat konsumen percaya kepada kami melalui penelitian. Sekaligus juga membantu memberi kontribusi bagi masyarakat," katanya.

Meningkatkan Citra Jamu

Salah satu keinginan Irwan adalah meningkatkan citra industri jamu. Ia sepenuhnya sadar bahwa industri jamu sering disebut industri tradisional. Citra di mata masyarakat jamu itu tidak ilmiah.

Itu sebabnya Sido Muncul tampil dengan promosi yang menarik. Salah satunya adalah menghadirkan pakar marketing Rhenald Kasali dalam iklan mereka.

Siapa sangka jika sebagian besar produk jamu Sido Muncul merupakan hasil dari konsentrasi, kreativitas dan inovasi dari seorang Irwan Hidayat. Ia mengaku seringkali mendapat ide di pagi hari saat senam Oriba.

Laki-laki kelahiran Yogya, 23 April 1947 ini mengaku tidak suka membaca. Bahkan, setiap hari yang dipikirkannya hanyalah jamu saja. Ia tidak mau memikirkan hal lain. Selama ini, ia juga tidak mau membebani diri dengan target yang muluk-muluk. Yang penting semua dilakukan dengan rasional dan penuh komitmen.

Irwan mengaku tak pernah membayangkan Sido Muncul akan menjadi sebesar sekarang. Ketika pindah ke Jakarta tahun 1976,

Sido Muncul masih merek kecil yang dianggap tidak penting. Kala itu, ia sendiri yang merangkap menjadi distributornya.

Masa-masa sulit pun dijalaninya. Irwan tinggal di sebuah rumah yang merangkap gudang di sebuah kampung di daerah Cawang. Setiap hari ia pergi ke toko-toko yang menjual produk jamunya. Ternyata banyak yang tidak laku. Lama-lama rusak, dikembalikan dan minta diganti yang baru. Demikian terus menerus.

Sampai kemudian, Irwan menemukan bahwa faktor kepercayaan menentukan hubungan dengan konsumen. Produknya harus bagus dan aman bagi konsumen. Karena itu, ia melakukan uji toksisitas (racun) untuk produk-produknya.

Tahun 1997, Sido Muncul mendirikan pabrik seluas 29 hektar di Ungaran, Jawa Tengah. Irwan sekaligus membangun laboratorium seluas 2.000 meter persegi dengan fasilitas lengkap. Ia menyadari bahwa nyawa sebuah usaha adalah riset.

Kalimat bijak Bunda Teresa menjadi sumber inspirasinya, "*if life is not lived for others, it is not worthwhile*". Diterapkan untuk perusahaannya, diganti menjadi "*if a company is not lived for others, it is not worthwhile*". ■ RH/dari berbagai sumber

BIODATA

Nama : J. Irwan Hidayat
 Alamat : Jl. Cipete Raya 81, Jakarta 12410
 Lahir : Yogyakarta, 23 April 1947
 Isteri : M. Shinta Ekoputri Sujarwo
 Anak : Y. Maria Reviani Hidayat, M. Mario Arnaz Hidayat, J. Marco Jonathan Hidayat

PENGALAMAN KERJA:

1. Direktur PT Sido Muncul 1972 – sekarang
2. Sales Department PT Ireco Pharmaceutical Semarang, 1969 – 1972

PENDIDIKAN FORMAL:

- SD Kristen 2, Ligu, Semarang
- SMP Masehi, Sidodadi, Semarang
- SMA (lulus 1965)

PENGHARGAAN:

1. Jamu Kuku Bima raih Golden Brand Award versi majalah SWA dan MARS, Juli 2005.
2. Sido Muncul terima ISO 17025, Oktober 2004 untuk Laboratorium Analisa.
3. Sido Muncul mendapat SCSi (Solo Customer Satisfaction Indonesia), Oktober 2004.
4. Jamu Kuku Bima raih Indonesian Best Brand Award (IBBA), Juli 2004.
5. Jamu Kunyit Asam (Turmeric Natural Drink) sebagai Best Product Encouragement, November 2003.
6. Sido Muncul mendapatkan SCSi, Oktober 2003.
7. Sido Muncul sebagai Merek Dagang Unggulan Indonesia dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian RI, Mei 2003.
8. Sido Muncul menerima Cakram Award Kategori Pengiklan Terbaik 2002 (iklan Tolak Angin versi Rhenald Kasali dan Sophia Latjuba), Maret 2003.
9. Kuku Bima raih ICSA (Indonesian Customer Satisfaction Award) Kategori Jamu dan Obat Kuat Pria versi majalah SWA dan Frontier, Agustus 2002.
10. Sido Muncul raih Penghargaan Satu Abad Bung Hatta sebagai Perusahaan Teladan Cara Baik Bung Hatta, Agustus 2002.
11. Sido Muncul raih Kehati Award kategori Pelaku Bisnis Peduli Lingkungan dari Yayasan Kehati, Maret 2001.
12. Sido Muncul menjadi perusahaan jamu pertama di Indonesia yang menerima Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dari Dirjen POM Depkes serta pabrik jamu pertama yang diresmikan Menkes. Merupakan pengakuan standarisasi farmasi yang diterapkan Sido Muncul, November 2000.
13. Irwan Hidayat mendapat penghargaan 20 Pemasar terbaik versi majalah SWA 2000.
14. Kuku Bima sebagai merek terpopuler Februari 2000 kategori Obat Tradisional versi majalah Swasembada, Frontier dan MARS.
15. Irwan mendapat penghargaan Pengusaha Berpotensi se-Jawa-Bali versi Persatuan Wartawan Indonesia, Juni 1999.

KEGIATAN:

1. Pendiri dan pengurus Yayasan Prestasi Anak Bangsa yang didirikan bersama Prof. Dr. Thoby Mutis, Enny Hardjanto, Lukman Niode, Rudy Hartono dan Ferry Soneville yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para mantan atlet berprestasi di masa tuanya, 2000.
2. Ketua II Bidang Industri dan Niaga Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia, Periode 1999-2008.
3. Pembicara Seminar "Herb International Forum" diselenggarakan oleh Jetro di Tokyo, Jepang. Sido Muncul terpilih sebagai delegasi yang mewakili Indonesia, November 2000.

Oleh: Dr Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang*

Syaykh Al-Zaytun

BAGIAN SATU
DARI DUA TULISAN



Pada era globalisasi ini, kemandirian sangat mutlak diperlukan dalam menentukan arah perjalanan sebuah negara. Dalam kaitan ini, Indonesia harus mereformasi pendidikan yang hingga hari ini belum mampu membangkitkan bangsa Indonesia dari ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain. Bila bangsa Indonesia tidak mengantisipasi faktor pendidikan di era globalisasi ini, akan menjadi ancaman yang mengerikan berupa runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas.

Fenomena globalisasi, yang telah mengubah sedemikian rupa pola perdagangan dunia, informasi dan komunikasi, serta hubungan perekonomian di akhir abad kedua puluh, membawa pengaruh perubahan yang sama di bidang pendidikan di awal abad kedua puluh satu.

Pilihan pendidikan saat ini, sudah tidak lagi tersekat pada batasan-batasan teritorial sebuah negara. Perubahan-perubahan sistem pembelajaran seperti *transnational education*, *internet based learning*, *distance learning*, kampus-kampus jarak jauh (*offshore campus*), *franchise institution*, telah berkembang sedemikian rupa pesatnya di berbagai negara. Hal ini memberi kesempatan kepada pelajar mahasiswa dan masyarakat pada umumnya untuk memilih lembaga pendidikan dan atau sistem pembelajaran yang diinginkannya, baik di negara asal maupun di luar negeri.

Persaingan global pun sangat terbuka bagi pelajar mahasiswa yang “berprestasi dan cemerlang”, karena di era global ini banyak negara yang menjadikan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagai salah satu komoditi ekspor. Sepanjang sejarah kemanusiaan baru di era inilah masyarakat pendidikan, pelajar, mahasiswa, pengajar, dan civitas akademika lainnya mempunyai kesempatan untuk masuk dalam apa yang disebut sebagai “pasar dunia” atau *global market*.

Bagi para pendidik dan pimpinan lembaga pendidikan di Indonesia, era ini tentu saja memberikan banyak kesempatan sekaligus sebagai sebuah ancaman, atau setidaknya tantangan atau bahkan era ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk bangkit menyejajarkan dirinya dengan negara-negara lain di dunia.

Ancaman yang sangat mengerikan bila bangsa



GLOBALISASI APA ARTINYA

Indonesia tidak mengantisipasi faktor pendidikan di era globalisasi ini adalah runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas. Sumber daya manusia yang dimiliki tidak mampu bersaing dalam berbagai sektor kehidupan membuat Indonesia semakin terdesak mundur dan kalah dalam persaingan menata kehidupan sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan lainnya.

Ketergantungan yang terus-menerus terhadap orang, institusi dan negara lain membuat ketidakpercayaan terhadap diri sendiri yang semakin dalam sehingga banyak hal harus ditentukan oleh orang, institusi dan negara lain. Sementara pada era globalisasi kemandirian sangat mutlak diperlukan dalam menentukan arah perjalanan sebuah negara. Indonesia harus mereformasi kembali pendidikan yang hingga hari ini belum mampu membangkitkan bangsa Indonesia dari ketertinggalannya dengan bangsa-bangsa lain.

Ancaman yang disebutkan di atas adalah tantangan yang harus dihadapi dengan keseriusan dan penuh keyakinan, karena untuk kembali menata pendidikan sebagai kunci keberhasilan sebuah negara kita menghadapi berbagai tantangan yang sifatnya intern maupun ekstern.

Tantangan secara intern yang jelas adalah, bahwa banyak di antara pelajar, mahasiswa bahkan orang tua palajar Indonesia, masih melihat Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat untuk tujuan belajar, baik itu untuk



DAN PENDIDIKAN: BAGI INDONESIA?

tingkat sarjana ataupun pascasarjana. Hal ini disebabkan mutu pendidikan di negeri ini terus dan terus menurun, juga masih saja kekurangan fasilitas, termasuk di dalamnya kurangnya fasilitas komputer dan akses internet, dan alat bantu modern lain yang dibutuhkan.

Kekurangan tersebut tidak saja monopoli lembaga-lembaga pendidikan tinggi daerah, baik milik pemerintah maupun swasta, tetapi juga berlaku pada lembaga pendidikan di kota-kota besar. Hanya sedikit saja di antaranya yang memiliki kemampuan berupa kecukupan alat bantu modern. Mereka masih belum mampu menarik minat masyarakat menengah atas, karena berbagai sebab, di antaranya adalah kurangnya tenaga pengajar internasional, diragukannya pengakuan internasional, dan kurikulum yang masih mengacu pada aturan lama yang tidak seiring dengan permintaan internasional. Bagaimanapun sampai saat ini lembaga pendidikan Indonesia, masih belum mampu bersaing dalam kompetisi internasional yang amat ketat di era globalisasi ini.

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang bukan menjadi prioritas utama dalam pembangunan menyebabkan dunia pendidikan Indonesia tertinggal jauh secara kualitas. Anggaran pendidikan yang minim, profesionalitas tenaga pengajar yang rendah, sarana dan prasarana yang tidak memadai membuat Indonesia semakin tertinggal jauh.

Secara ekstern, pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan dengan dunia industri terutama yang berkaitan dengan informasi dan teknologi komunikasi belum mampu diikuti dengan cermat oleh bangsa Indonesia. Persaingan kualitas output pendidikan merupakan indikator yang jelas akan lemahnya output yang dihasilkan oleh Indonesia. Untuk itu kehandalan *sense of entrepreneurship* para pimpinan dan tenaga-tenaga manajemen pendidikan sangat dibutuhkan oleh

bangsa Indonesia, sehingga mampu membawa lembaga pendidikan Indonesia ke arah *global oriented* dalam arti sepenuhnya.

Dengan tradisi belajar dan mengajar yang sudah cukup tua, sesungguhnya Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan globalisasi ini, jauh dari apa yang saat ini diperoleh oleh negara tetangga kita Malaysia, yang tak seberapa tahun yang lalu masih mendatangkan guru-guru dari Indonesia. Kini dengan upaya intensif, Malaysia sudah dikenal sebagai *Center of Excellent*, dan telah terjadi ketimpangan antara jumlah mahasiswa/pelajar yang dikirim oleh Indonesia, dengan pelajar/mahasiswa yang dikirim oleh Malaysia ke Indonesia.

Saat ini hanya kurang lebih 8.000 orang pelajar dan mahasiswa Malaysia di seluruh Indonesia, dan institusi pendidikan internasional yang terbanyak mendapatkan kepercayaan dari Malaysia adalah Al-Zaytun. Sementara jumlah pelajar Indonesia di negeri jiran ini lebih dari 28.000 orang.

Kemudian dalam kondisi ini bagaimanakah Indonesia mengambil peran? Inilah pertanyaan yang sering didiskusikan tentang upaya-upaya praktis oleh para pelaku didik di Al-Zaytun. Bagi pelaku didik Al-Zaytun, globalisasi disadari sepenuhnya sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, namun juga menjadi tantangan dan harapan untuk berkiprah di jagat raya, mengukir kebesaran potensi yang dimiliki bangsa Indonesia melalui pendidikan.

Beruntunglah bahwa untuk itu semua, Indonesia telah memiliki Undang Undang Pendidikan baru, yang tentu saja lebih terbuka dan lebih akomodatif untuk segala bentuk inovasi dan reformasi pendidikan, sehingga memudahkan pendidik, dan peserta didik memperoleh kesempatan di era globalisasi ini.

Masa Lalu: Pengaruh Internasional pada Pendidikan Indonesia

Tidak seperti negara-negara lain, Indonesia mempunyai latar belakang sejarah pendidikan modern yang berbeda, dan mempunyai kekhasan tersendiri, yang sangat memengaruhi perkembangan dan persepsi terhadap globalisasi atau internasionalisasi pendidikan di negeri ini.

Malaysia misalnya, walau sempat tertinggal jauh dari Indonesia, tetapi negeri ini mempunyai tradisi pendidikan internasional yang diwariskan oleh penjajah Inggris, yang mempunyai kebiasaan sejarah selalu membawa pelaku-pelaku didik di tengah bangsa yang dijajahnya, walau pada mulanya hanya untuk mengakomodasi kepentingannya sendiri. Sehingga di negara-negara jajahannya selalu terdapat lembaga-lembaga pendidikan bertaraf internasional, yang pada gilirannya memengaruhi tradisi belajar dan mengajar di negeri jajahannya.

Stanford, dan banyak institusi *excellent* lainnya telah ada di Malaysia sejak lama, begitu juga St. Stephen College, Presidency College, St. Joseph's College, St. Xavier's, Christian Medical College, CMC Vellore, Isabella Thoburn College dan banyak lagi institusi ternama, terdapat di India sejak lama, tempat sebagian besar elite negeri ini belajar, banyak lagi di Pakistan dan Bangladesh, serta negara-negara jajahan Inggris lainnya.

Berbeda dengan negara-negara tersebut di atas, Indonesia mempunyai latar belakang sejarah pendidikan yang amat unik, yang sekalipun pendidikan modern sudah merambah sedemikian luasnya, tetapi akar pendidikan Indonesia, yakni "pesantren", masih tetap berdiri kokoh dan memberikan kontribusi aktif bahkan lebih dibanding dengan apa yang disebut sebagai lembaga pendidikan modern (Baca artikel Syaykh Al-Zaytun pada *Berita Indonesia* Edisi 09 dan 10).

Sedangkan pendidikan modern baru diperkenalkan oleh



Kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang bukan menjadi prioritas utama dalam pembangunan menyebabkan dunia pendidikan Indonesia tertinggal jauh secara kualitas.

penjajah Belanda pada tahun 1892, dimulai dengan pendidikan dasar yang kemudian dikembangkan sampai ke perguruan tinggi pada tahun 1920, dengan berdirinya sekolah tinggi teknik Bandung, disusul dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi di kawasan lain di Pulau Jawa, yang kesemuanya merupakan lembaga pendidikan yang amat *exclusive*, sehingga tidak setiap warga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan tinggi. Di masa itu terdapat pembagian peringkat sekolah, sehingga menyulitkan masyarakat kebanyakan untuk mengikutinya, bahkan untuk sekolah peringkat dasar sekalipun.

Hampir bersamaan dengan itu, para tokoh pendidikan pesantren pun, berupaya untuk memertahankan eksistensi pendidikan Islam, dengan mendirikan pesantren modern sesuai dengan jaman-nya, Pondok Tebuireng didirikan, begitu juga Pondok Modern Gontor Ponorogo. Di lain pihak Muhammadiyah pun melakukan hal yang sama, sekalipun orientasinya sedikit berbeda, karena lebih mendekati upaya pendidikan yang dilakukan oleh pihak penjajah Belanda, dengan muatan keislaman.

Tidak seperti Malaysia dan negara-negara jajahan Inggris lainnya, yang begitu mudah diarahkan dan mengikuti jejak penjajahnya, terutama dalam kaitan dengan penggunaan bahasa. Belanda tidak mampu melakukan hal yang sama, karena benteng kokoh pendidikan bangsa Indonesia tersebut di atas. 350 tahun lebih tidak memberikan bekas budaya bahasa sekecil apapun kepada bangsa Indonesia, dan sepinggal mereka, terasa begitu mudah dan cepatnya bangsa ini menemukan jati diri, begitu juga dalam kaitan dengan pendidikan.

Dengan demikian sentuhan-sentuhan internasional terhadap pola pendidikan di Indonesia, sangatlah terbatas di awal pengenalan pendidikan modern tersebut, diiringi dengan berbagai tantangan, yang tujuannya adalah kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Sangat besar manfaat pengenalan pendidikan modern bagi perkembangan pendidikan di negeri ini, tetapi juga mempunyai dampak yang cukup serius, saat tantangan yang sama dengan pola yang berbeda kembali dihadapi oleh bangsa besar ini, yaitu globalisasi.

Pasca kemerdekaan, Indonesia bergerak menata dunia pendidikannya, namun masih dengan perhatian yang amat kecil dibandingkan perhatian pemerintah terhadap bidang-bidang lain. Sejak awal kemerdekaan sampai masa-masa refor-



masi, pada saat kepemimpinan negara dipegang oleh mereka yang lebih *educated*, namun belum memberi perhatian lebih terhadap dunia pendidikan di negeri ini.

Harapan akan munculnya gembong pendidikan Indonesia, sirna saat pendidikan Indonesia masih tetap seperti sedia kala (tidak bergerak maju), dan berbagai kebijakan masih jauh panggang dari api, dalam kaitan dengan derasnya arus globalisasi yang tak terelakkan. Walau saat ini bermunculan di sana-sini lembaga pendidikan tinggi, dari yang terbaik menurut ukuran Indonesia, sampai pada yang hanya dipergunakan untuk memperoleh formalitas kualifikasi.

Banyak sudah tenaga-tenaga pendidikan yang dikirim ke luar negeri untuk menyelesaikan program master dan atau doktoralnya, akan tetapi sekembalinya mereka ke negeri ini, tak banyak yang bisa mereka lakukan, hal ini karena adanya perbedaan antara yang harus mereka lakukan dengan kebijakan yang ada, walau di antara mereka ada yang menduduki posisi kunci dalam kementerian pendidikan.

Pesantren sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dunia pendidikan Indonesia, ternyata dalam keterbatasannya, mampu melebihi lembaga-lembaga pendidikan sekuler, dalam kaitan dengan pengakuan internasionalnya, sebagai



misal Pondok Modern Gontor, dan banyak lagi pesantren telah mendapatkan pengakuan dari Mesir atau negara Arab lainnya. Sementara sampai saat ini belum satu pun universitas di luar negeri, yang meluluskan ijazah SMU sebagai persyaratan masuk langsung ke universitas.

Universitas di Inggris, New Zealand, Australia dan banyak negara maju lainnya, mempersyaratkan dua semester di perguruan tinggi untuk bisa diterima langsung, belum termasuk penilaian kecakapan berbahasa Inggris, yang rata-rata harus memperoleh skor 550 untuk TOEFL dan 650 untuk IELTS, dan untuk itu dibutuhkan tambahan waktu antara enam bulan sampai dengan satu tahun.

Masih banyak lagi hal-hal penting, yang sama sekali belum tersentuh oleh sentuhan internasional, terutama dalam kaitan dengan perubahan kurikulum pendidikan menengah maupun tinggi, yang kesemuanya sangat erat kaitannya dengan rekognisi dan akreditasi internasional.

Al-Zaytun sebagai salah satu pelaku aktivitas pendidikan, sangat menyadari hal tersebut di atas, dan oleh sebab itu sejak berdirinya sampai pada usianya yang kelima, berupaya untuk memberikan sentuhan-sentuhan internasional, dengan harapan jika tiba saatnya nanti, lembaga pendidikan ini benar-benar menjadi lembaga pendidikan internasional, sekaligus sebagai “Center of Excellence”.

Al-Zaytun dan Eksistensinya

Al-Zaytun didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), bukan oleh perorangan, atau keluarga (dinasti). Ini bermakna kampus ini didirikan oleh kebersamaan berbagai *person* yang bergabung di dalam Yayasan Pesantren Indonesia.

Yayasan pendiri, selalu bersikap antipatif terhadap perkembangan zaman, khususnya terhadap berbagai perkembangan pendidikan. Karenanya, yayasan ini selalu menata dan *manage* perjalanan pendidikan di Al-Zaytun dengan kaidah-kaidah pendidikan modern. Al-Zaytun dicetuskan, digagas, dan didirikan oleh umat Islam bangsa Indonesia, diperuntukkan bagi umat dan bangsa secara keseluruhan, dan juga merupakan hadiah umat Islam bangsa Indonesia untuk umat manusia sedunia, karenanya, Al-Zaytun adalah milik semua umat manusia.

a. Filosofi Al-Zaytun

Arah dan tujuan pendidikan Al-Zaytun adalah “Mempersiapkan peserta didik agar berakidah kokoh-kuat kepada Allah dan syariat-Nya, menyatu di dalam tau-

hid, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *Basthotan fi al-ilmu wa al-jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi”.

Al-Zaytun akan selalu menampilkan spesifikasi atau ciri khas, bagi upaya persiapan sumber daya manusia berkualitas dalam penguasaan Alquran secara mendalam, terampil berkomunikasi menggunakan berbagai bahasa dominan antarbangsa, berpendekatan ilmu pengetahuan, berketerampilan teknologi dan fisik, berjiwa mandiri, penuh perhatian terhadap aspek dinamika kelompok dan bangsa, berdisiplin tinggi, serta berkesenian yang memadai.

Adapun kurikulum yang dianut oleh Al-Zaytun adalah kurikulum yang komprehensif dan modern yang selalu sensitif dan tanggap terhadap perkembangan zaman, selalu *up to date* (*ashry*) dan kampus ini akan menitikberatkan kurikulumnya kepada pencapaian ilmu dan teknologi yang dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah SWT.

Dari aksentuasi kurikulum yang memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan takwa kepada Allah SWT, maka Kampus ini terus berusaha dengan segala kemampuannya berjalan di atas sistem. Yakni segala langkahnya dilandasi dengan persiapan (moral-material) program yang jelas dan kontrol yang pasti. Tiga *item* ini selalu berjalan menyatu menjadi satu kesatuan.

Para tokoh pendidikan pesantren pun, berupaya untuk memertahankan eksistensi pendidikan Islam, dengan mendirikan pesantren modern sesuai dengan jamannya.

Tidak ada yang lebih utama dan terutama dari semua itu, yakni semuanya menjadi sesuatu yang utama dan terutama, tidak ada yang dikesampingkan.

Untuk itu semua, Al-Zaytun tidak berdiri sendiri atau tidak bekerja sendiri, melainkan selalu bekerja sama dengan ber-

bagai lembaga pendidikan yang telah terlebih dahulu mencapai kemajuan, dalam negeri maupun luar negeri (seperti apa yang telah dilakukan dengan lembaga-lembaga pendidikan: ICDL, IMCA dsb. Dengan selalu mengacu kepada bimbingan instansi terkait, diharapkan secepatnya dapat terwujud kesamaan dan kebersamaan dalam menyikapi pencapaian perbaikan mutu pendidikan umat dan bangsa.



Kita akan mendapatkan kader-kader bangsa yang terdidik secara formal yang terprogram dengan baik, tidak terputus masa pembelajarannya, mereka dapat diabdikan kepada nusa dan bangsanya serta umat manusia pada umumnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.

b. Sistem Pendidikan Al-Zaytun

Sebelum Indonesia lahir sebagai bangsa dan negara, selama 350 tahun bangsa dan negara ini dijajah oleh Belanda dan berbagai negara penjajah lainnya. Penjajahan memporak-porandakan eksistensi bangsa penghuni negara kepulauan ini dalam segala aspek dan dimensi kehidupan, yang paling mendasar adalah porak-porandanya bidang pendidikan. Keporak-porandaan pendidikan ini sangat dirasakan oleh seluruh penduduk negeri khususnya umat Islam.

Penjajahan asing atas negeri ini baru berakhir pada tahun 1949, sekalipun kemerdekaan telah diproklamasikan pada tahun 1945. Umur kemerdekaan bangsa Indonesia telah mencapai lebih dari 50 tahun namun kemajuan pendidikan di negeri ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti jika dibandingkan dengan negara bekas jajahan lainnya.

Dengan berbagai pengalaman pahit tentang *output* pendidikan nasional yang kita rasakan bersama, kiranya kita semua memiliki keberanian melakukan terobosan positif membenahi pendidikan Indonesia tanpa saling menunggu dan saling mengandalkan satu sama lain, agar kita sebagai bangsa tidak tertinggal lebih jauh.

Dalam kondisi seperti ini, Al-Zaytun tampil bersama lembaga pendidikan lainnya memberikan penanggulangan terhadap berbagai permasalahan pendidikan Indonesia. Mencoba menawarkan konsep pendidikan mandiri dalam pelaksanaan dan upaya penanaman kemandirian itu pada setiap peserta didik dan para pamong serta pelaku didik.

Diharapkan dengan bimbingan dan pembiasaan terhadap peserta didik menuju proses kemandirian dan perkembangan positif intelektual, psikologi, fisik, moral-etika, disiplin dan berbagai perkembangan positif lainnya, kiranya dapat mengarah kepada *output* sebagai

wujud manusia yang mandiri, berilmu dan berperadaban (berkemajuan tingkat ilmu dan budaya).

Al-Zaytun menetapkan sistem pendidikan yang tak terputus dalam melaksanakan pendidikan formal yang mesti ditempuh. Untuk mencapai arah dan tujuan *one pipe system education*, yang diwujudkan dalam pelaksanaan pendidikan dari kelas satu hingga kelas dua puluh. Yang terbagi dalam beberapa tingkatan: Pertama, tingkat Dasar (*Elementary*) tahun pertama hingga tahun keenam, umur 6-12 tahun. Kedua, tingkat Menengah (*Secondary and Senior High School*) tahun ketujuh hingga tahun ke-12, umur 13-18 tahun. Ketiga, S1 tahun ke-13 hingga tahun ke-15, umur 19-21 tahun. Keempat, S2 tahun ke-16 hingga tahun ke-17, umur 21-23 tahun. Kelima, S3 tahun ke-18 hingga tahun ke-19, umur 24-26 tahun.

Diharapkan dengan menempuh sistem pendidikan seperti ini kita akan mendapatkan kader-kader bangsa yang terdidik secara formal yang terprogram dengan baik, tidak terputus masa pembelajaran dan pendidikannya, sehingga dalam umur emasnya mereka telah mampu menyelesaikan pendidikan formal, dan karenanya usia produktif mereka dapat diabdikan kepada nusa dan bangsanya serta umat manusia pada umumnya dengan penuh tanggung jawab, karena mereka telah memiliki kecerdasan yang terlatih, kebajikan dan kebijakan yang tinggi serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.

Sementara ini, yang sudah dapat ditempuh oleh Al-Zaytun adalah pelaksanaan mulai tingkat Dasar (*Elementary*), tingkat menengah pertama (*secondary school*), tingkat menengah atas (*senior high school*), serta tingkat S1. Setelah itu akan menyusul tingkat S2 dan S3.

(BERSAMBUNG BAGIAN KEDUA: PELUANG AL-ZAYTUN DI TENGAH PASAR DUNIA)



Mereka Sakit Karena Air

Di seantero dunia, lebih dari tiga juta nyawa melayang setiap tahun akibat penyakit yang berhubungan dengan keterbatasan air bersih. Air bersih nyaris tak terakses di Indonesia.

Pembunuh anak-anak Balita di Indonesia adalah muntaber dan ISPA (infeksi Saluran Pernafasan Atas), ini disebabkan oleh air kotor dan kualitas udara yang buruk. Berbagai kasus diare dan muntaber akibat kurangnya sanitasi air diliput media dari tahun ke tahun.

Oktober tahun lalu, sebanyak 134 warga Kecamatan Leti, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, terserang penyakit muntaber pada pertengahan Oktober tahun lalu. Di antara penderita itu, lima orang meninggal dunia. Demikian dilaporkan *Kompas*.

Penyakit muntaber juga mewabah di wilayah Kabupaten Indramayu, Januari lalu, seperti dilaporkan harian *Pikiran Rakyat*. Tercatat, RSUD Indramayu telah merawat sebanyak 72 penderita muntaber.

Selain muntaber, penyakit diare juga kerap menyerang Papua. Januari 2004, tercatat 38 orang meninggal akibat penya-

kit ini di Kecamatan Borme di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Selain karena makanan kadaluarsa yang mereka konsumsi, kasus itu juga diduga disebabkan air minum yang terkontaminasi bakteri. Ini karena masyarakat mengonsumsi air mentah dari sungai yang membawa berbagai jenis limbah, termasuk kotoran manusia dan ternak babi.

Juli 2005, penyakit diare kembali mewabah di Distrik Mimika Timur Tengah, Mimika, Papua. Ada sekitar 70 penderita diare. Lima puluh penderita adalah bocah di bawah usia lima tahun. Adapun data Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mencatat, 12 penderita diare meninggal. Delapan di antaranya adalah anak-anak.

Memperingati Hari Air Sedunia tanggal 22 Maret lalu, kenyataan yang ada justru bertambah memprihatinkan. Harian *Kompas*, 21 Maret 2006, menurunkan laporannya tentang persoalan air bersih yang masih menjadi kendala terbesar dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Menurut harian ini, sedikitnya 100 juta penduduk Indonesia sampai sekarang masih kesulitan mengakses air bersih. Sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia masih mengonsumsi air yang terkontaminasi.

Ada beberapa sungai yang menurut harian ini sudah sulit dijadikan sumber air bersih tanpa pengolahan yang sesuai standar kesehatan. Diantaranya Sungai Citarum (Kali Malang/Bekasi), Sungai

Siak, Riau; Sungai Belawan, Medan; Sungai Ciliwung, Jakarta dan Sungai Musi, Palembang.

Perlu Keseriusan

Diakui Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, selain akses terhadap air bersih yang masih rendah, kualitas air minum di Indonesia juga masih tergolong rendah. Lebih lanjut ia menjelaskan, menurut survei tentang kualitas bakteriologis air yang dilakukan WHO di 343 kabupaten pada tahun 2004, 42,5 persen air minum yang dikonsumsi oleh penduduk tidak memenuhi syarat kesehatan. Sehingga menyebabkan penyakit diare dan muntaber.

Menurut data yang dihimpun Depkes sendiri, diare walau selintas terkesan sebagai penyakit ringan, kadang bisa terjadi secara sporadis. Ada beberapa kasus diare luar biasa, yakni yang terjadi secara tiba-tiba menyerang banyak orang sekaligus. Namun telah terjadi penurunan kasus semacam ini di sejumlah wilayah di Indonesia.

Depkes mencatat pada 1996, kasus luar biasa diare terjadi sebanyak 86 kali dengan jumlah kasus 4.898 orang dan kematian 120 orang. Pada tahun 2000, telah terjadi penurunan menjadi 30 kali yakni 920 kasus dan kematian 19 orang.

Sementara menurut catatan *Sinar Harapan*, berdasar survei yang dilakukan Depkes melalui survei kesehatan rumah tangga, ternyata penderita diare berjumlah 300 per 1.000 penduduk, bahkan lebih. Fakta ini seolah mengatakan bahwa kesadaran penduduk Indonesia akan kesehatan masih teramat minim.

Depkes sudah berupaya membangun sarana air minum dan sanitasi yang dimulai pada era 1970-1980 melalui Proyek Inpres Sarana Kesehatan. Proyek ini meliputi juga sarana air bersih dan pengadaan jamban keluarga. Namun lingkupnya sangat terbatas pada daerah pedesaan.

Hasil studi dari lembaga penelitian Universitas Indonesia (UI) tahun 1977 di sejumlah wilayah membuktikan, diare bisa dicegah hingga 35 persen dengan menyediakan air minum bersih. Sedangkan penyediaan jamban mampu mencegah diare sampai 28 persen. Kalau saja perbaikan sanitasi dan pengadaan air bersih bisa dilakukan secara berkesinambungan, maka penduduk yang menderita akibat diare bisa ditekan jumlahnya. ■ RH



Kebanyakan korban diare dan muntaber adalah anak-anak



JAMU SIDO MUNCUL

Warisan Tradisi Untuk Menjaga Kesehatan

Kesehatan masyarakat banyak ditopang oleh industri jamu. PT. Sido Muncul berupaya memproses produksinya sama seperti industri farmasi.

Industri jamu tidak lagi dipandang sebelah mata. Berbagai jenis produk jamu terbukti memberi andil besar dalam peningkatan kesehatan nasional. Jamu tradisional menjadi pilihan ketika obat-obatan pabrikan semakin tak terjangkau kantong masyarakat. Jamu dipilih sebagai salah satu obat alternatif lantaran harganya murah dan mudah terjangkau. Apalagi ketika dihadapkan pada kesulitan ekonomi, masyarakat membutuhkan obat-obatan yang murah tetapi aman.

Di antara pilihan tersebut termasuk jamu-jamu yang diproduksi oleh PT. Sido Muncul, sebuah industri jamu yang

berada di Ungaran, Semarang, sejak tahun 1930. Perusahaan ini menjadi salah satu pemain besar dalam industri jamu. Pertumbuhannya rata-rata mencapai 30-40% setiap tahunnya. Jumlah tersebut hanya 10 persen dari omset industri farmasi. Namun, Presdir PT. Sido Muncul Irwan Hidayat optimis, pasar industri jamu masih bisa dikembangkan. Apalagi jika bahan baku jamu masih bisa didapat di dalam negeri.

Sebagai industri jamu yang keberadaannya mulai diperhitungkan, Sido Muncul berupaya menghadirkan produk-produk

berkelas yang aman dan berkhasiat. Selain itu, perusahaan warisan keluarga ini senantiasa berupaya menjaga kualitas produk dan melahirkan berbagai inovasi, guna mengakomodir kebutuhan kesehatan masyarakat.

Macam-Macam Produk

PT. Sido Muncul kini memiliki serangkaian produk dengan jumlah keseluruhan tidak kurang dari 150 jenis yang dapat dibagi atas produk jamu generik dan *branded* (bermerek). Untuk jamu generik jumlahnya lebih dari 100 produk. Sedangkan yang *branded* diantaranya Kuku Bima, Tolak Angin, Kunyit Asam, Jamu Komplet, Jamu Instan, STMJ, Anak Sehat dan lain-lain.

Penyebaran produk-produk Sido Muncul telah merambah berbagai kota dan diedarkan oleh kurang lebih 60 distributor. Untuk meningkatkan kepercayaan dan melayani kebutuhan konsumen, Sido Muncul terus berupaya menciptakan inovasi produk. Misalnya, ketika orang merasa kerepotan dalam meminum jamu karena harus menyedunya dengan

produk-produk berkualitas dan dipercaya konsumen, maka Sido Muncul berhasil meraih berbagai penghargaan. Seperti misalnya, penghargaan Merek Unggulan tahun 2003. Kemudian penghargaan atas perusahaan yang telah memakai sistem Cara Pembuatan Obat yang Benar (CPOB). Bahkan penghargaan ini sebagai penghargaan perusahaan jamu pertama yang telah memakai sistem ini. Lalu, penghargaan Kehati Award di tahun 2000, Proper dari kantor Menteri Lingkungan Hidup, sebagai perusahaan yang ramah lingkungan, The Best Brand Award tahun 2000, lalu pada tahun 2002 mendapat predikat perusahaan teladan serta mendapat penghargaan ICSA (Indonesian Customer Satisfaction Award). Kemudian produk Kuku Bima telah memiliki Golden Brand bahkan tiga kali berturut-turut.

Berbagai penghargaan tersebut menunjukkan bahwa produk-produk Sido Muncul telah dipercaya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kepercayaan inilah yang dipegang oleh Presdir PT. Sido Muncul, Irwan Hidayat. "Salah satu yang membuat kita sukses adalah



IRWAN HIDAYAT

menyamai industri farmasi, dibarengi dengan uji-uji ilmiah.

Seluruh proses produksinya dijalankan berdasarkan *Standard Operation Procedure* (SOP) / CPOB (Cara Pembuatan Obat Yang Benar). Ini setara dalam proses produksi farmasi. Jadi, seluruh produk Sido Muncul telah melalui uji toksinitas hingga uji khasiat. Maka terjamin *quality control*-nya.

"Kita bisa sebutkan bahwa jamu itu aman dikonsumsi. Tapi, keamanannya harus dibuktikan secara ilmiah. Kami memakai uji toksinitas dengan hewan, untuk menguji apakah produk ini benar-benar aman, tidak merusak organ tubuh dan efek samping lainnya," jelas Irwan. Maka, PT. Sido Muncul juga didukung oleh serangkaian fasilitas laboratorium lengkap dan peranan *Research Development Department*.

Dalam perkembangannya Sido Muncul bukan saja menguji produknya sebelum dipasarkan. Tetapi juga beberapa produk yang telah dipasarkan masih dilakukan pengujian dan penelitian. Seperti produk unggulan yang kini sedang 'merajai' produk-produk Sido Muncul lainnya, yaitu Tolak Angin cair. Beberapa waktu lalu produk herbal sekali teguk ini diteliti oleh beberapa dokter rumah sakit di Semarang, karena ternyata memiliki khasiat selain mengobati masuk angin juga meningkatkan daya tahan tubuh. (Cermati pula: *Tolak Angin Meningkatkan Daya Tahan Tubuh*). ■ **AD, SH**



air panas, Sido Muncul kemudian mengeluarkan produk jamu yang bisa langsung diteguk seperti pil. Namun, ini pun dianggap masih belum praktis, hingga akhirnya muncul produk seperti Tolak Angin cair, dengan kemasan sekali teguk. Ada juga kemasan hisap seperti permen. Inovasi-inovasi produk jamu ini bukan saja dalam hal kemasan, tapi juga jenis dan macamnya.

Bermodalkan kepercayaan dengan

kalau kita mendapat kepercayaan dari berbagai pihak. Apa pun bentuk kepercayaan itu," ujarnya suatu ketika.

Uji Ilmiah

Sebagai produsen jamu, Sido Muncul dianggap sangat progresif. Banyak upaya yang ditempuh perusahaan ini demi meningkatkan citra jamu. Sido Muncul berupaya menampilkan produk jamu yang lebih baik. Dalam hal proses produksinya

Berdasarkan hasil penelitian, Tolak Angin Sido Muncul dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga cocok dikonsumsi oleh orang sehat. Ditemukan secara kebetulan.

Tolak Angin pertama kali diresepkan tahun 1930 oleh pendiri PT Sido Muncul, Ibu Rahmat Sulisyo dan mulai diproduksi skala pabrik tahun 1951. Obat tradisional ini dibuat dari tumbuh-tumbuhan berkhasiat yang dibudidayakan dengan kontrol kualitas yang ketat, diproses dengan cara produksi yang baik dan benar dan telah melewati tahapan pengujian ilmiah. Tolak Angin adalah produk yang telah terstandarisasi.

Khasiat dan kegunaan: meningkatkan daya tahan tubuh; mengatasi masuk angin; mengobati sakit perut/diare, misalnya karena salah makan, kecapaian karena aktivitas fisik yang berat, kurang tidur dan mabuk perjalanan.

Apakah masuk angin? Gejala awal, menurunnya daya tahan tubuh yang ditandai oleh badan meriang, badan lemas, perut kembung, mual, pusing, mata berair, dan tenggorokan kering. Di dunia kedokteran pada umumnya disebut *common cold* atau semacam flu ringan. Adapun penyebab daya tahan tubuh menurun antara lain: kecapaian, kurang tidur, stres, dan pembawaan genetik.

Bagaimana cara mengatasi masuk angin? Ada beberapa cara yang biasanya digunakan untuk mengatasi masuk angin: istirahat; melakukan aktivitas relaksasi seperti dipijat, kerokan, akupuntur dan minum Tolak Angin.

Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, minum 2 sachet x 1 selama 7 hari dan diulang 1 bulan; bagi penderita masuk angin, sakit perut/diare minum 3-5 sachet perhari; untuk mabuk perjalanan, minum 1 sachet sebelum melakukan perjalanan atau 1-3 sachet pada waktu mabuk perjalanan.

Formula Tolak Angin yang mengandung, antara lain, jahe, daun mint, kayu angin, kayu ulet, cengkeh, terbukti mampu meningkatkan kekebalan tubuh melalui parameter kenaikan sel T yang merupakan indikator meningkatkan daya tahan tubuh.



TOLAK ANGIN

MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH

Penelitian

Baru-baru ini, PT. Jamu Sido Muncul melakukan penelitian salah satu produknya, yaitu jamu cair Tolak Angin. Dengan judul penelitian. "Apakah Tolak Angin dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dengan bukti meningkatnya sel darah putih T?" Penelitian tersebut menurut Irwan Hidayat, dilatarbelakangi bahwa masuk angin adalah salah satu gejala sakit.

"Kami ingin membuktikan secara ilmiah, apakah Tolak Angin benar-benar bisa menyembuhkan atau tidak. Maka, indikatornya, setelah minum Tolak Angin, maka sel darah putih (sebagai sel kekebalan tubuh) meningkat," kata Irwan.

Penelitian dilakukan terhadap beberapa

orang dan beberapa dokter di rumah sakit di Semarang. Responden yang dipilih rata-rata sedang dalam kondisi sehat. Mereka dianjurkan meminum 2x sehari jamu cair Tolak Angin selama 1 minggu. Setelah 6 hari hasilnya, 70% responden diteliti limfosit-T nya meningkat. Limfosit-T memiliki tugas penting mengenal antigen seperti bakteri, virus, toksin, radikal bebas dan polusi, yang masuk dan memberi isyarat kepada sel-sel lain agar membunuhnya serta membentuk antibodi.

Sistem kekebalan tubuh ini sangat mendasar peranannya bagi kesehatan. Tentunya harus disertai dengan pola makan sehat, cukup berolah raga dan terhindar dari masuknya senyawa beracun ke dalam tubuh. Kondisi sistem kekebalan

tubuh ini menentukan kualitas hidup. Dalam tubuh yang sehat, terdapat sistem kekebalan tubuh yang kuat, sehingga daya tahan tubuh terhadap penyakit juga prima. Maka, agar kualitas hidup tetap prima, sehat dan bugar, kecukupan antibodi diperlukan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh.

Hasil penelitian tersebut kemudian menyimpulkan bahwa jamu Tolak Angin bermanfaat selain untuk menyembuhkan masuk angin, juga meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan minum Tolak Angin 2x sehari, selama satu minggu terbukti menaikkan jumlah limfosit-T dalam tubuh. Artinya, Tolak Angin juga baik dikonsumsi orang sehat, untuk menjaga daya tahan tubuh.

Irwan Hidayat mengaku, secara ke-

betulan ia menemukan ramuan yang kemudian berkhasiat menyembuhkan masuk angin. "Jamu ini biasa dikenal untuk melancarkan peredaran darah dan menguatkan badan. Namun, kemudian terpikir oleh saya, apa yang bisa menyembuhkan masuk angin," kata Irwan.

Kemudian pihaknya membuat penelitian, mengenai indikator atau ukuran seseorang bisa masuk angin. Indikatornya adalah sel darah putihnya menurun, sehingga antibodinya menurun dan menyebabkan mudah sakit. Akhirnya dibuat ramuan yang dapat meningkatkan sel darah putih. Kini, ramuan yang kemudian diberi nama Tolak Angin ini, benar-benar teruji dapat menyembuhkan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. ■ RI, WS, AD, SH



UJI KLINIS SIDO MUNCUL

Lab Bioteknologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	Pengaruh pemberian Tolak Angin Cair dan Tolak Angin Tablet pada kenaikan nilai limfosit T	Kedua produk masing-masing diberikan kepada 25 orang responden dengan dosis 2 x 1 sachet perhari selama 1 minggu. Dari hasil pemeriksaan limfosit T sebelum dan sesudah perlakuan, disimpulkan pemakaian kedua produk tersebut sama-sama dapat meningkatkan daya tahan tubuh secara bermakna melalui parameter kenaikan limfosit T
Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma	Toksinitas Subkronik Tolak Angin Cair	Hasilnya penggunaan TA cair terus menerus pada manusia selama 101 bulan tidak menimbulkan efek toksik yang berbahaya

KESUKSESAN DI BALIK PARA BINTANG TERPILIH

Orang Pintar, Minum Tolak Angin



Lula Kamal,
icon Tolak Angin terbaru

Jargon tersebut tampaknya menjadi obsesi Sido Muncul, untuk masuk ke dalam logika kaum akademisi. "Ya, kami berupaya menanamkan citra agar kaum terpelajar tidak menganggap jamu sebagai sesuatu yang tidak ilmiah," kata Iwan Hidayat, Presdir PT. Sido Muncul. Namun, bukan itu saja. Justru yang terpikir dalam ingatan bahwa pesan tersebut tidak sekedar memasukkan citra jamu dalam dunia ilmiah, namun sasaran promosi jamu ternyata juga dikonsumsi oleh para 'orang pintar' seperti Rhenald Kasali yang terkenal sebagai pakar *marketing*.

"Apa yang saya lakukan itu adalah bagian dari meningkatkan kepercayaan pada produk jamu," ujar Irwan. "Nah kalau bintang iklannya Pak Rhenald tentunya orang berpikir, *kok* dia mau ya. Ternyata, Pak Rhenald tidak salah pilih dengan membintangi salah satu perusahaan teladan," ujarnya sambil tertawa.

Terbukti, Sido Muncul menerima Cakram Award Kategori Pengiklan Terbaik 2002

untuk iklan Tolak Angin versi Rhenald Kasali dan Sophia Latjuba, pada Maret 2003.

Ternyata, meminta Setiawan Djody sebagai model iklan Tolak Angin, menurut Irwan, tidaklah gampang. Tapi waktu itu, ia punya alasan, Sido Muncul dapat penghargaan sebagai Merek Dagang Unggulan Indonesia pada 20 Mei 2003, tepat di Hari Kebangkitan Nasional. Waktu itu ia bilang pada Setiawan Djody, "Mas Djody, Tolak Angin ini produk baik. Saya kasih presentasi dulu. Kedua, Mas saya pilih karena merupakan cicit dari Dr Wahidin Sudiro Husodo (pendiri Budi Utomo)". Ternyata Setiawan Djody bersedia.

Pada intinya, menurut Irwan, untuk mengiklankan produknya, ia butuh orang-orang yang ekstra *talent*. Bukan satu orang yang dipakai oleh 20 merek. Ternyata, apa yang dilakukan Irwan membuahkan hasil. Tolak Angin berhasil mengukuhkan *brand image* sebagai 'jamunya orang pintar'.

Penjualannya bagus, meningkat dengan tajam sejak iklan Sophia, Rhenald, Wynne dan Setiawan Djody. Saat ini, Tolak Angin memakai aktris yang juga dokter, Lula Kamal, sebagai *icon*-nya. Salah satu yang membuatnya sangat bangga, etnis Tionghoa juga banyak yang minum Tolak Angin. Kini kiblat mereka sudah berubah. Dulu ke Beijing, sekarang Jakarta, minimal ke Ungaran, lokasi pabrik Sido Muncul. ■ RH, AD, SH

■ INGGARD JOSHUA: KETUA FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD DKI JAKARTA

MENGURAI PERSOAL

Sebagai ibu kota negara, tidak bisa dipungkiri bila Jakarta menyimpan banyak persoalan, mulai dari sisi kependudukan, kewilayahan, tata ruang, sampai infrastruktur dan berbagai aspek lain. Melalui revisi UU No 34 tahun 1999, diharapkan permasalahan demi permasalahan dapat diurai.

Jakarta tidak hanya berperan sebagai ibu kota negara, tetapi juga berperan sebagai pusat bagi berbagai dimensi kehidupan nasional. Peranan ini mengintrodusir besarnya beban pengelolaan kewilayahan Jakarta. Kiranya tidak terlalu berlebihan bila masyarakat Jakarta menaruh harapan besar terhadap revisi UU No 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, yang tengah digodok di DPR saat ini.

“Terlepas dari pro kontra yang menengarai revisi UU No. 34 Tahun 1999, khususnya tentang konsep megapolitan, namun harus disadari bahwa Jakarta membutuhkan strategi pembangunan yang komprehensif guna mendukung perkembangan yang akan terus berakumulasi di masa-masa mendatang,” tutur Inggard Joshua, Ketua Fraksi Partai Golkar (F.PG) DPRD DKI Jakarta, baru-baru ini.

Daya dukung ibu kota terhadap dinamika kehidupan yang berlangsung di atasnya, tentu menjadi pertarungan besar Pemerintah DKI Jakarta.

“Jakarta akan terus berkembang, bahkan semakin pesat di masa-masa mendatang. Dan kita harus memiliki strategi mengantisipasi perkembangan itu, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa pembangunan Jakarta akan *mandeg* pada satu masa yang tidak terlalu lama,” katanya.

Sistem Pengelolaan dan Penegakan Hukum

Jakarta sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, sudah barang tentu memiliki sistem pengelolaan kewilayahan yang komprehensif. Hal ini tidak terlepas dari akumulasi pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kerap menimpa Jakarta selama lebih dari 4,5 abad.

“Jakarta sudah memiliki sistem yang lengkap, baik sistem tata ruang, sistem pengelolaan perekonomian, sistem transportasi, maupun sistem kesejahteraan masyarakat, baik menyangkut pangan, kesehatan, perumahan, dan aspek-aspek lainnya. Yang menjadi permasalahan pokok berikutnya adalah pelaksanaan dari sistem itu,” tandasnya.

“Sistem yang baik tidak memberi manfaat yang maksimal, jika tidak diikuti *low enforcement*. Jadi hukum harus ditegakkan dalam menjalankan sistem itu,” kata Inggard Joshua, yang juga Sekretaris DPD I Partai Golkar DKI Jakarta ini.

Politisi yang akrab dipanggil dengan sapaan Pak Inggard ini mencontohkan keuangan pemerintah DKI Jakarta yang cukup besar. Dalam APBN 2006, Jakarta menganggarkan pembiayaan sebesar Rp 17,997 triliun. “Jika pelaksanaan anggaran sebesar itu tidak tepat sasaran, karena lemahnya penegakan hukum, maka uang sebesar itu tidak akan bermanfaat bagi pembangunan DKI Jakarta,” tandasnya. Sebaliknya, sarjana Akuntansi ini mengungkapkan, dengan adanya penegakan hukum, akan menjamin setiap rupiah yang ada dalam APBD, akan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Di sisi lain, Inggard Joshua yang juga Ketua Pemuda Pancasila DKI Jakarta mencontohkan, pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta, yang belum dilaksanakan secara maksimal karena belum optimalnya penegakan hukum. “RUTR sudah ditetapkan, namun di tingkat pelaksanaannya masih ada *bar-gaining*,” tandasnya.

Ia kembali menandatangani, *law enforcement* menjadi sangat penting dalam pengelolaan pemerintah di DKI Jakarta, sehingga upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang nyaman dapat tercapai. “Kita semua tahu, di Jakarta banyak orang pintar, orang kaya, ataupun pejabat. Tetapi

tidak kala sering mereka justru menjadi kendala penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum menjadi tidak berlaku sama, tetapi tebang pilih,” tuturnya.

Investasi dan Kepastian Berusaha

Di pihak lain, Inggard Joshua menyoroti Jakarta sebagai pusat bisnis terkemuka di Indonesia. Dalam perkembangannya, perekonomian Jakarta semakin terarah pada struktur perekonomian industri jasa. Sektor-sektor industri yang berbasis produksi maupun manufaktur, tidak lagi menjadi andalan. “Sebagai daerah yang menjadikan jasa sebagai tulang punggung perekonomian, Jakarta harus didukung dengan iklim kepastian berusaha,” katanya.

Inggard menambahkan, hingga kini iklim kepastian berusaha belum benar-benar kondusif. Ia menunjuk pada fenomena premanisme dalam penguasaan tanah, lahan, atau fisik. “Seharusnya masyarakat atau pengusaha tidak membutuhkan jasa ormas-ormas tertentu bila Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja secara maksimal,” tandasnya.

Inggard menengarai adanya oknum-oknum tertentu yang mem-*back up* ormas-ormas tersebut. “Ini merupakan kenyataan yang sangat ironis. Bagaimana tidak, di pusat pemerintahan negara, pusat kepolisian negara, kejaksaan agung, dan aparat penegak hukum lainnya, namun seperti tidak berdaya menertibkan aktivitas ormas-ormas yang mengganggu iklim bisnis,” katanya.



AN JAKARTA

Transportasi: Bus Way dan Monorel

Jakarta yang berpenduduk lebih dari 8 juta jiwa dan setiap hari didatangi lebih dari 2 juta pekerja dari daerah-daerah penyangga, tentunya harus didukung sistem transportasi yang handal. Menurut Inggard Joshua, untuk menjawab persoalan ini, Pemda DKI Jakarta telah membangun konsep Pola Transportasi Makro Jakarta. “Namun dalam pengaplikasiannya, layanan transportasi yang handal itu masih mengesampingkan kepentingan masyarakat pengguna sarana transportasi lainnya,” katanya.

Inggard mencontohkan pengoperasian bus way. Sebelum pengoperasian bus way saja, setiap jalanan di Jakarta sudah macet, apalagi setelah pengoperasiannya yang menyita jalan. “Memang benar, bus way diperuntukkan mendukung transportasi massal, tetapi perlu dikaji lebih mendalam analisis dampak lingkungannya (Amdal),” katanya seraya menghubungkan dengan pajak kendaraan bermotor yang menjadi primadona pendapatan DKI Jakarta.

Kalau pada satu sisi pajak kendaraan bermotor semakin meningkat, namun pada sisi yang lain tidak memberikan kenyamanan yang memadai dalam mengendarai kendaraannya, maka akan memicu perasaan apriori di kalangan pemilik kendaraan. Sesungguhnya, tambah Inggard, dibandingkan dengan sarana transportasi massal lainnya, tampaknya masih lebih efisien angkutan monorel, karena tidak menyita jalan yang ada.

Sayangnya, pembangunan angkutan monorel yang sudah dinanti-nantikan masyarakat Jakarta itu, hingga kini belum jelas. Bertitik tolak dari pengerjaannya yang tersendat-sendat, terlihat jelas bahwa konsorsium yang disepakati pemerintah itu kurang *credible*, baik dari sisi kemampuan teknis maupun finansial. “Kenapa pembangunan monorel tidak dilakukan secara *Government to Government* (G to G). Bukankah DKI Jakarta memiliki uang yang banyak dan APBD dapat dijadikan jaminan pembayaran kepada negara yang mendukung pembangunan monorel tersebut?” tuturnya.

Inggard mengingatkan, jika pembangunan monorel terseok-seok seperti sekarang ini, akan memicu peningkatan biaya investasi yang signifikan. “Tentunya, *cost* yang besar itu akan dibebankan kepada masyarakat yang menggunakan jasa monorel tersebut,” katanya.

Pemukiman Rumah Susun dan Penanggulangan Banjir

Kepadatan populasi penduduk di Jakarta telah memicu munculnya berbagai permasalahan sosial bagi masyarakatnya. Salah satu dampak dari peningkatan

jumlah penduduk ini adalah keterbatasan lahan untuk pemukiman. Ironisnya, jalan keluar penyediaan pemukiman yang ditempuh masyarakat, secara umum melanggar tata ruang, yakni dengan membangun rumah-rumah di tempat-tempat terlarang, seperti bantaran kali dan tempat-tempat lain yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

“Kalau kita lihat, banyak orang yang tinggal di bantaran kali. Keberadaan mereka di sana membuat bantaran kali menjadi tempat kumuh, yang memicu pencemaran air, juga menengarai terjadinya banjir. Ini harus ditertibkan dengan merelokasi penduduk,” tuturnya.

Ketika ditanya, banyaknya penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal pasca penggusuran, Inggard Joshua menyatakan agar mereka yang memenuhi syarat kependudukan DKI Jakarta diberi pemukiman di rumah-rumah susun. “Saya berharap, program kali bersih dan relokasi warga dari bantaran kali benar-benar dilaksanakan sesegera mungkin, sehingga Jakarta sebagai wajah terdepan Indonesia benar-benar layak menjadi kota metropolitan,” tuturnya.

Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Air Minum

Di pihak lain, tambah Inggard, layanan publik lain yang dinilai memberatkan masyarakat Jakarta adalah pelayanan air minum. Sejak tahun 1998, pengelolaan air minum di DKI Jakarta telah diserahkan kepada 2 (dua) perusahaan asing. Tujuannya, memberikan pelayanan yang semakin baik. Namun, harapan perbaikan layanan air minum, ternyata tidak terjadi. Para pelanggan selalu mengeluh dengan layanan air minum yang tidak berkualitas dan mahal.

“Ini merupakan konsekuensi langsung dari kerja sama Pemerintah DKI Jakarta dengan perusahaan yang tidak *qualified*. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan untuk berinvestasi, jauh lebih besar, dan hal itu akan dibebankan kepada konsumen,” tandasnya.

Menurut Inggard, DPRD sering ditempatkan pada posisi yang sulit bila menghadapi masalah seperti ini. Di satu sisi, pengikatan ataupun pengakhiran suatu perjanjian dengan pihak swasta ataupun negara lain, merupakan domain eksekutif. Di sisi lain, perjanjian itu telah disetujui DPRD periode sebelumnya. “Jadi kita hanya mendorong kinerja pemerintah agar semakin baik dan di sisi lain mendesak pemerintah meninjau kembali berbagai kerja sama yang merugikan masyarakat Jakarta,” katanya. ■



INGGARD JOSHUA

PT KA - ITS Siapkan SDM Handal

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkeretaapian terus berkembang. PT KA menggandeng ITS menyiapkan SDM yang handal dalam memberi pelayanan kepada publik.

Tak bisa dipungkiri, persaingan di moda angkutan darat, khususnya perkeretaapian ke depan akan semakin ketat. Terlebih dengan dibukanya kesempatan investor swasta untuk menanamkan modalnya di bidang perkeretaapian. Beberapa perusahaan bahkan telah mulai tertarik ikut serta mengembangkan usaha pada angkutan kereta api, terutama untuk angkutan kereta api kecepatan tinggi, kereta api perkotaan dan kereta api ringan (*light train*).

Dibukanya peluang pihak swasta untuk turut menangani pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian diharapkan bisa menciptakan iklim yang sangat menarik bagi perkembangan perkeretaapian di tanah air. Karena akan menggunakan teknologi yang lebih maju dan efisien. Sehingga dapat memacu perkembangan Iptek perkeretaapian. Hal ini sejalan pula dengan harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dan nyaman di bidang jasa angkutan kereta api. Termasuk ketepatan jadwal waktu keberangkatan maupun kedatanganannya.

Kondisi yang demikian, ditambah tantangan dan persaingan ke depan yang semakin tajam, menggugah PT KA terus mengembangkan diri dalam memberikan

pelayanan terbaik kepada para pemakai jasa angkutan kereta api. Tidak hanya terbatas pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur, sarana maupun prasarananya, namun terlebih lagi dalam hal penyiapan SDM. Sehingga mampu menerapkan suatu sistem pengoperasian di bidang perkeretaapian secara handal dan profesional.

Selama ini PT KA telah melakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan SDM melalui program kedinasan. Baik untuk jenjang Diploma III, S1 maupun S2. Namun langkah ini dirasakan masih belum mencukupi.

Bercermin dari kondisi tersebut, PT KA kembali membuat terobosan. Kali ini dengan menggandeng Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS). Kerjasama dalam mempersiapkan SDM Perkeretaapian berkualifikasi S1 melalui program Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK). Kemitraan ini secara resmi ditandatangani oleh Dirut PT KA Ronny Wahyudi dan Rektor ITS Prof. Dr. Moh Nuh di Surabaya 17 Maret lalu.

Kerjasama ini diharapkan menjadi solusi bagi pemecahan permasalahan yang ada, yang cukup kompleks. Diantaranya mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang perkeretaapian. Setidaknya mampu bersaing dengan sesama negara ASEAN

seperti Malaysia dan Singapura.

Sasaran yang ingin dicapai, sebagaimana dikemukakan Ronny Wahyudi, bagi PT KA adalah mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain, teknologi perkeretaapian di Indonesia akan cepat berkembang. Karena melalui UU Perkeretaapian yang baru, kereta api berpeluang besar untuk dikembangkan di Indonesia. Dengan demikian ITS diharapkan dapat menyiapkan SDM yang berkualitas tinggi guna memenuhi kebutuhan itu.

Ronny mengemukakan pula, dalam rangka menambah fasilitas transportasi perkotaan, saat ini di Surabaya akan dikembangkan angkutan kereta api dari Bandara Juanda ke Waru. Untuk itu ITS diharapkan dapat ikut berperan dalam proses pengembangan *airport link* tersebut.

Punya Arti Strategis

Rektor ITS Prof. Dr. Moh Nuh menilai kerjasama ini punya arti strategis. Yakni bagaimana menyatukan potensi sumber daya, baik yang dimiliki PT KA maupun ITS secara makro. Terutama dalam menyikapi perkembangan iptek, termasuk teknologi informatika di bidang perkeretaapian dengan segala permasalahannya. Karenanya, kerjasama ini tidak terbatas hanya pada penyiapan SDM saja, tapi juga mencakup banyak aspek yang saling menunjang. Termasuk memberi sumbangan pemikiran terhadap perbaikan manajemen dan infrastruktur. Diharapkan melalui kerjasama ini bisa diperoleh solusi yang sebaik-baiknya.

Sebagai ilustrasi, transportasi kereta api di negara maju merupakan kunci pemecahan masalah kemacetan lalu lintas karena mampu mengangkut penumpang secara massal. Di negeri kita, kebijakan pemerintah terhadap kereta api harus dilakukan secara memadai. Hal ini mengingat pertumbuhan jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, yang berujung dengan terjadinya kemacetan di jalan raya.

Moh Nuh optimis semua persoalan dapat diatasi melalui sinergi yang diupayakan secara optimal. Termasuk dalam hal penguasaan Iptek serta penerapan efisiensi. Dia juga menyoroti pentingnya langkah sosialisasi sehingga masyarakat luas merespon secara positif terhadap keberadaan perkeretaapian. ■ SM



Menhub Hatta Radjasa dan jajaran PT KA di gerbong kereta wisata

JALINTIM TRANS SUMATERA MAKIN MERANA

Puluhan kendaraan, Kamis (23/3) lalu, terlihat antri dan terpaksa berjalan lambat di desa Kali Berau, Sindang Marga, Senawar Jaya di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pasalnya, lajur jalan lintas timur (Jalintim) antara Jambi dan Palembang itu rusak parah sepanjang lebih dari 50 km. Sejumlah lubang menganga di jalan yang merupakan urat nadi lalulintas ekonomi di kawasan tersebut. Kerusakan semakin diperparah oleh curah hujan, sehingga banyak jalan berlubang padahal biasa dilalui kendaraan berat seperti bus luar kota.

Arus lalu lintas Jalintim trans Sumatera ini bertambah padat menyusul ambruknya jembatan Sungai Pangi di jalan lintas tengah Sumatera di Desa Ulak Bandung, Lahat. Akibatnya jarak Jambi - Palembang sejauh 275 Km yang biasanya cukup ditempuh 5 jam kini menyita waktu sampai 30 jam.

Kondisi ini tak urung membuat para pengemudi dan penumpang kelelahan. Sejumlah sopir truk maupun bus terpaksa harus beristirahat di pinggir jalan, berdekatan dengan beberapa rumah makan di Desa Sukajaya, perbatasan Jambi.

“Jalan di Sumsel ini hancur, tak ada perbaikan. Macetnya bisa lama dari hari ke hari semakin parah. Apalagi saat hujan turun,” keluh seorang sopir, J. Sihombing.

Sopir truk tronton dari Jakarta ini berniat ke Medan, Sumut. Dia mengaku berangkat dari Palembang sekitar pukul 13.00 dan saat sampai di Bayung Lencir telah menghabiskan waktu lebih dari 24 jam. Padahal jarak yang masih harus ditempuh untuk sampai ke Jambi sekitar 125 km lagi.

Sopir bus antarkota PMTOH BL7542A asal NAD, Muhammad (52), mengaku kelelahan saat melewati jalan Jambi - Palembang. Biasanya perjalanan Jakarta - Banda Aceh ditempuh 3 hari. Dia berangkat dari Jakarta hari Senin (20/3) lalu dan hingga Rabu petang masih berada di Bayung Lencir. Muhammad pun merasa kasihan kepada para penumpang busnya, terutama yang membawa anak-anak. Tapi ini bukan karena kemauannya, tapi kondisi jalan yang rusak yang membuat kendaraan tak mampu melaju cepat.

Nasib yang menyengsarakan ini dialami Zaidani (35), bersama isteri dan dua anaknya. Mereka kelelahan dan badan pun terasa sakit, terutama saat melewati jalan buruk dari Palembang menuju Jambi. “Saya tak menyangka jalan seburuk ini,” tuturnya.

Elpiji Mulai Langka

Dampak lain dari rusaknya jalan trans Sumatera ini adalah mulai langkanya Elpiji di Jambi. Karena pasokan dari kilang produksi PT Medco di Sumsel terhambat dalam sepekan belakangan ini. Langkanya Elpiji ini membuat harga naik dari Rp 55.000 menjadi Rp 60.000 per tabung. Menurut *Kompas*, (24/3) alasan si penjual menaikkan harga karena mahalnnya ongkos angkut dari Palembang ke Jambi.

Apabila infrastruktur jalan raya ini tidak segera diperbaiki, bukan mustahil berbagai kebutuhan pokok masyarakat akan tersendat dan harga pun akan melonjak.

Ruas Jalintim trans Sumatera antara Palembang-Jambi semakin rusak. Pengemudi dan penumpang mengeluh. Elpiji di Jambi pun mulai langka.



Jalan lintas tengah Sumatera terputus akibat robohnya jembatan Sungai Pangi di Desa Ulak Bandung, Lahat.

Kepala Dinas PU Sumsel, Dharna Dachlan, sebagaimana dikutip *Republika* (24/3) mengakui terjadinya kemacetan di jalur lintas timur. Menurutnya, kemacetan semakin parah karena banyak kendaraan saling berebut untuk melintas di jalur tersebut.

Kondisi lalulintas yang semrawut juga menghambat mobil pengangkut material dan alat berat yang terjebak macet.

Keinginan memperbaiki infrastruktur yang rusak ini bukan tidak ada. Menurut Dachlan, perbaikan jalur lintas timur di wilayah Sumsel, saat ini masih dalam proses tender. Dari 40 perusahaan atau kontraktor yang mengikuti tender ada 7 perusahaan yang dianggap memenuhi persyaratan sebagai pemenang. “Target kita proyek perbaikan Jalintim ini sudah bisa dikerjakan awal April 2006,” tambahnya.

Para pengguna jalan di lintas timur tampaknya masih harus bersabar menerima kondisi yang ada sekarang ini. Setidaknya sampai bulan April mendatang. Itu pun kalau rencana perbaikan jalan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. ■ SP

JURUBICARA CILANGK

Tuntutan profesional membuat TNI terus berbenah diri. Reformasi internal terus berjalan. Sejumlah pejabat berpindah tugas. Termasuk Kapuspen TNI yang kini dipercayakan kepada matra laut.

Upacara serah terima jabatan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI dari pejabat lama Mayjen TNI Kohirin Suganda S, kepada penggantinya Laksamana Muda TNI Moh. Sunarto Sjoekronoputra, berlangsung sederhana di ruang kerja Panglima TNI, Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Selasa (21/3).

Sertijab tersebut menyusul dikeluarkannya Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/73/II/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Pati di lingkungan TNI. Mayjen TNI Kohirin Suganda S. akan memasuki masa pensiun, sedangkan pejabat baru sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Utama Bid. Hankam Lemhannas RI.

Jabatan Kapuspen dinilai sangat strategis karena Puspen merupakan corong informasi yang menjembatani institusi TNI dengan masyarakat luas. Laksamana Muda TNI Moh. Sunarto Sjoekronoputra, siang harinya langsung mengundang sejumlah wartawan dari berbagai media massa dalam acara pisah sambut antara pejabat lama dan pejabat baru.

Sebagai tradisi di lingkungan Puspen TNI, bagi pejabat lama



SALAM KOMANDO KAPUSPEN TNI

ISTIMEWA

25 RIBU RUMAH UNTUK TNI AL

KEPALA Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Slamet Soebijanto menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Ashari dan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Lukman Purnomosidi, di Desa Meteseh, Tembalang, Semarang, Rabu (8/3) untuk pengadaan 25 ribu unit rumah bagi Prajurit dan PNS TNI AL.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama tersebut disaksikan langsung Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam rangkaian acara peresmian 100 ribu lebih unit Rumah Sehat Sederhana (RSH) yang melibatkan 423 pengembang REI dan 100 industri riil. RSH yang diresmikan itu tersebar di seluruh Indonesia dan diperuntukkan bagi anggota TNI, Polri, para Purnawirawan, PNS serta karyawan Jamsostek.

Dalam sambutannya Presiden mengatakan, peristiwa ini sangat penting karena

keberhasilan pembangunan RSH merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya golongan yang berpenghasilan rendah.

“Saya mengajak para pengembang di seluruh tanah air agar bersungguh-sungguh berperan serta dalam membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan sehat sederhana tersebut. Dan untuk mewujudkan semua rencana itu, kita harus berupaya mengatasi berbagai kendala,” katanya.

SATGASBAN TNI KEMBALI DARI FILIPINA

SATUAN Tugas Bantuan Kemanusiaan TNI Bencana Filipina yang berkekuatan sekitar 43 personel di bawah pimpinan Letkol Ckm Ben Yura Rimba Selasa (21/2), telah kembali ke tanah air. Pasukan tersebut, diterima oleh Asisten Operasi (Asops) Kasum TNI, Mayjen TNI Bambang Darmono di Bandara Halim Per-

danakusuma.

Satuan Tugas TNI yang kembali dari penugasan kemanusiaan di Filipina adalah Tim Kesehatan yang dilengkapi oleh beberapa dokter spesialis diantaranya, Dokter Spesialis Anak, Penyakit Dalam, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Bedah dan dua Dokter Spesialis Orthopedi. Dokter-dokter tersebut, dibantu 18 perawat. Adapun perlengkapan yang dibawa ke daerah bencana: satu unit Mesin Anestesi dan Instrument Bedah, satu buah ambulans beserta obat-obatan, sehingga Satgas mempunyai kemampuan Bedah Minor dan Bedah Mayor.

Secara organisasi, Satgas ini dilengkapi dengan satu tim Zeni yang mempunyai tenaga operator alat berat, Louder, Douzer yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam operasi penyelamatan bagi korban. Selain itu, didukung personel dan perlengkapan Satkomlek yang mampu mendukung komunikasi dari lokasi bencana ke tanah air melalui Stasiun Bumi Kecil (SBK),

KAPAL DARI MATRA LAUT

yang akan meninggalkan jabatannya diperkenankan untuk menanam sebatang pohon di samping kanan gedung I Gusti Ngurah Rai. Mayjen TNI Kohirin Suganda S, yang didampingi pejabat baru menanam pohon Bisbol sebagai kenang-kenangannya.

Sosok Moh Sunarto, pria berusia (55) tahun kelahiran Kuningan Jawa Barat itu, terlihat begitu akrab dengan kalangan wartawan. Meski siang itu baru secara resmi menjabat sebagai Kapuspen, namun dengan gaya bicara yang lugas dan tangkas dia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan para wartawan.

Dalam pidato perkenalan, Sunarto mengatakan, dalam rangka menyebarluaskan informasi di lingkungan TNI tentu tidak terlepas dari kerjasama yang erat antara TNI dengan media massa. Dia juga mengajak semua pihak untuk selalu tetap berkerjasama secara profesional sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing.

Pejabat TNI lainnya yang termasuk dalam mutasi berdasarkan Skep Panglima tersebut adalah 19 orang di jajaran Mabes TNI, 5 orang di jajaran Mabes TNI AD, 3 orang di jajaran Mabes TNI AU, 1 orang di lingkungan Menko Polhukam.

Pejabat yang Dimutasi

Yang akan memasuki masa pensiun 9 orang, di antaranya: Mayjen TNI Prabowo Suharto, Aspers Kasum TNI; Mayjen TNI Bambang Widodojanto, M.Sc, Pa Sahli Tk III Bidang Kawasan Khusus dan Lingkungan Hidup Panglima TNI; Laksma TNI Bambang Susanto, S.H, M. Hum, Wakababinkum TNI; Brigjen TNI Widhya Bagya, M.Sc., Pa Sahli Tk II Eku Sahli Bidang Ekkudag Panglima TNI; Brigjen TNI Saud Aman Negara Pasaribu, Pa Sahli Tk II Indag Sahli Bidang Ekkudag Panglima

TNI; Brigjen TNI Anwar ND. S.IP, Dan Pusinteld; dan Brigjen TNI Soetan Loebis, Pati Ahli Kasad Bidang Hukum dan Humaniter.

Mutasi antarjabatan dalam pangkat yang sama terdiri dari 8 orang diantaranya: Marsda TNI Drs Mulyanto SP, Pati Mabes TNI menjadi Aspers Kasum TNI ; Marsma TNI Sony Budi Santoso S.IP, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Hidup menjadi Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kewaspadaan Nasional ; Marsma TNI Dr. A Hidayat, Sp.B.,MARS, tetap menjadi Kapuskes TNI berdasarkan pokok-pokok organisasi dan prosedur (POP) Mabes TNI yang baru (dijabat bintang dua) dan Marsma TNI Agus Dwiyono, S.H, Kadiskumau menjadi Wakadiltama Mahkamah Agung RI.

Sedangkan yang mendapatkan promosi jabatan, 11 orang di antaranya: Brigjen TNI Heryadi Pa Sahli Tk II Kawasan Eropa dan AS Sahli Bidang Hubint Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk III Bidang Kawasan Khusus dan Lingkungan Hidup Panglima TNI; Kolonel Chk Y.B. Salamun, S.H Ses Otjen TNI menjadi Wakababinkum TNI ; Kolonel Cku Dana Supendi, S.IP., S.T., Paban IV/Latgar Srenad menjadi Pa Sahli Tk.II Eku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI ; Kolonel Art. Deddy Setyabudiman, Paban Utama Keamanan dan Konflik (Kamkonf) Komunal Sahli Bidang Polkamnas Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk II Indag Sahli Bidang Ekkudag Panglima TNI ; Kolonel Chb H. Meiyanto Rachmat, Asops Satkomlek TNI menjadi Dansatkomlek TNI ; Kolonel Sus Pudi Astoto, S.H. Sedsiskumau menjadi Kadiskumau ; Kolonel Cba Imam Suparnadi, S.E.,S.T Wadirbekang menjadi Pati Ahli Kasad Bidang Hukum dan Humaniter. ■ SB

bahkan dilengkapi dengan fasilitas *tele-conference*.

Satgas Bantuan Kemanusiaan TNI Bencana Filipina mempunyai tiga balai pengobatan atau rumah sakit lapangan di tiga titik daerah, yaitu Daerah Impact Area atau lokasi bencana, Balai Pengobatan Pengungsian yang berada di daerah Catmon serta Balai Pengobatan Induk sebagai Komando Utama yang berada empat kilometer arah selatan dari lokasi bencana.

Satgas ini diberangkatkan ke Filipina menyusul terjadinya bencana longsor pada Jum'at (17/2), sekitar pukul 10.00 yang meluluh lantahkan pegunungan Kan-Ban dan tiga desa beserta penduduk yang sedang beraktivitas. Keberadaan Satgas ini berhasil membantu kesulitan, kedukaan serta kesedihan masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut. Beberapa bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Pasukan Indonesia diantaranya memberikan

pelayanan kesehatan, memberikan bantuan makanan dan sepuluh tenda tempat penampungan pengungsi.

Selain memberikan bantuan kesehatan, Satgas Bantuan Kemanusiaan TNI Bencana Filipina juga melakukan perbaikan infrastruktur pendidikan, berupa perbaikan sekolah di Saint Bernard.

ARMATIM TANGKAP 33 KAPAL PENCURI IKAN

SEBANYAK 33 kapal pencuri ikan ditangkap jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur. Hingga Senin (20/3), 16 Kapal masih ditahan di Pangkalan Utama TNI AL V Timika dan 17 Kapal lainnya di Pangkalan TNI AL Merauke, Papua.

Kapal yang ditangkap antara lain terdiri atas lima kapal berbendera Indonesia, 10 kapal berbendera China, 12 kapal berbendera Thailand, empat kapal asal Taiwan, dan satu kapal berbendera Korea.

Ke-33 kapal pencuri ikan itu ditangkap di perairan sekitar laut Aru dan Arafuru

oleh KRI Untung Suropati dan KRI Sutedi Senaputra, KRI Fatahillah, serta KRI Layang, dan kapal tangki armada ringan KRI Arun pada Februari-Maret 2006. Total ikan yang dicuri sebanyak 1.540 ton dengan nilai kerugian sekitar Rp. 7,6 miliar.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut Timika Letkol Laut (P) Alex Firmansyah Rahman di atas kapal MV Phong Thip Cholphum di Pangkalan Utama TNI AL V Timika mengatakan, seluruh kapal ditangkap atas dasar kesalahan yang beragam. Di antaranya dokumen tidak lengkap, ketidaksesuaian alat tangkap, dan melanggar wilayah penangkapan (*fishing ground*). Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Komando Armatim Letkol Laut (KH) Toni Syaiful.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, proses penyidikan kapal yang ditangkap itu akan dilakukan oleh TNI AL. ■ SB

Dua Meneer Tak Sepakat

Hamid membantah tuduhan Daan yang menyatakan dirinyalah yang memerintahkan Daan tidak mengubah harga pencetakan segel.

Meski Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin sudah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi dan bersedia datang, ia masih kesulitan melepaskan kecurigaan yang terarah kepada dirinya sejak mantan anggota KPU Daan Dimara menggulirkan keterangan keterlibatan Hamid dalam kasus pengadaan kertas segel Pemilu 2004 lalu.

Saling bantah itu rupanya menjadi perhatian media massa nasional. Maklumlah, jika Hamid terbukti terlibat, karirnya sebagai menteri langsung tamat.

Koran Tempo, 18 Maret 2006 melaporkan dua orang yang biasa saling menyapa dengan panggilan 'meneer' (tuan-bahasa Belanda) itu akhirnya bertemu juga kemarin. Sekitar pukul 13.45 WIB, Daan Dimara tiba di gedung Komisi Pemberantasan Pemilu di Jalan Veteran, Jakarta. Atas inisiatif KPK, Daan dipertemukan dengan Hamid Awaludin, juga mantan rekan sejawatnya di Komisi Pemilihan Umum.

Inilah pertemuan untuk mengkonfrontasi pengakuan Daan dan Hamid yang bertolak belakang. Daan, yang berstatus tahanan atas tuduhan korupsi pengadaan segel kertas suara Pemilu 2004 itu, mengaku menetapkan harga kertas segel adalah atas permintaan Hamid. Sebaliknya, Hamid membantah semua pengakuan Daan.

Seperti dikutip harian *Surya*, 14 Maret 2006, bapak dua anak ini membantah tuduhan Daan yang menyatakan dirinyalah yang memerintahkan Daan tidak mengubah harga pencetakan segel dengan alasan sudah diputuskan dalam pertemuan 14 Juni 2004 yang tidak dihadiri Daan.

Kata Hamid, pada tanggal itu dia memang bertemu Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, aku Hamid, dia melaporkan perkembangan pencetakan surat suara Pilpres kepada Nazaruddin yang meminta laporan karena khawatir terjadi keterlambatan pencetakan seperti Pemilu Legislatif.

Menurut Hamid, saat dia melapor ke Nazaruddin, datanglah Daan. Kepada



HAMID AWALUDIN: Soal perbedaan pengakuan dengan Daan Dimara.

Daan, Hamid saat itu mengatakan agar pencetakan surat suara dipercepat.

Biar demikian, Hamid tidak ingin mengatakan bahwa Daan berbohong kepada KPK. Menurutnya, hal itu cuma salah persepsi saja. Mengenai penerimaan uang, seperti yang diisukan beberapa pihak, Hamid mengaku itu tidak benar.

Tidak Menerima Surat

Harian *Kompas*, 14 Maret 2006, melaporkan lebih detail mengenai pengakuan Hamid Awaludin soal duduk perkaranya. *Kompas* menurunkan judul "Hamid Akui Minta Daan Percepat Proyek Segel".

Sama seperti laporan media lainnya, *Kompas* juga menulis soal pengakuan Hamid Awaludin bahwa dalam pertemuan di ruang Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin pada 14 Juni 2004, ia meminta Daan Dimara, anggota KPU, mempercepat proyek segel surat suara. Namun, ia membantah telah meminta Daan tidak mengubah harga yang sudah disepakati dengan PT Royal Standar.

Hamid diperiksa selama sekitar lima jam di kantor KPK, (13/3). Dalam pemeriksaan itu penyidik KPK mengajukan 33 pertanyaan kepada Hamid.

"Saya katakan, saya sama sekali tidak terlibat. Secara faktual, saya tidak tangani dan secara formal saya tidak pernah mendapatkan SK (surat keputusan) apapun tentang itu. Saya jelaskan kepada penyidik, saya hanya sebagai ketua pencetakan surat suara Pilpres (pemilihan presiden) I dan II, itu secara umum," papar Hamid dikutip *Kompas*.

Lebih jauh, Hamid menambahkan, ia mendapat pertanyaan soal tiga surat yang dilayangkan Untung Sastra Wijaya kepada dirinya, yaitu surat tanggal 1 Juni 2004, 10 Juni 2004, dan 12 Agustus 2004. Ia menyatakan sama sekali tidak pernah menerima surat penawaran harga itu.

Pernyataan Hamid itu sangat berbeda dengan penjelasan pihak PT Royal Standar. Manajer Hukum PT Royal Standar Kemal Fadillah, saat dikonfirmasi *Kompas*, membenarkan soal tiga surat PT Royal Standar dan soal rapat penentuan harga antara KPU dan PT Royal Standar yang dipimpin Hamid Awaludin.

Kemal membenarkan bahwa PT Royal Standar telah menulis tiga surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin - dengan UP (untuk perhatian) Hamid. Surat tersebut tertanggal 1 Juni 2004, 10 Juni 2004, dan 12 Agustus 2004.

Kasus ini belum menemukan titik temu, meskipun Hamid sudah diperiksa KPK. Ketidaksepakatan Hamid-Daan tampaknya akan tetap mewarnai berita-berita media massa minggu-minggu ke depan. ■ RH

Mereka yang Beruntung

Jika mengembalikan uang yang ditilap, para koruptor BLBI akan dibebaskan.

“**K**arpet Merah Buat Para Obligor”. Foto Atang Latief, Omar Putihrai dan Marimutu Sinivasan terpampang berderet. Judul itu terasa cukup menohok hati pembaca majalah *Trust*. Dalam edisinya No. 23, 20-26 Maret 2006, majalah ini menyoroti *privilese* bagi delapan obligor untuk lolos dari jeratan hukum.

Media massa lainnya juga ramai memberitakan ini, seolah-olah mereka syok dengan keputusan pemerintah yang belakangan dianggap tidak mempedulikan rasa keadilan masyarakat. Dari judul-judul yang mereka muat, tampaknya media massa, khususnya cetak, menyangkan keputusan pemerintah.

Kompas, 18 Maret 2006, memberi judul “Delapan Debitor BLBI Bisa Bebas”. Menurut harian ini, pemerintah akan membebaskan delapan debitor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dari tuntutan hukum jika mereka membayar 100 persen utangnya hingga akhir tahun 2006 dengan uang tunai atau surat berharga yang likuid.

Surat berharga likuid (*near cash*) yang dimaksud ialah Surat Utang Negara atau Sertifikat Bank Indonesia. Dalam hal pembayaran dengan kombinasi tunai dan *near cash* dibatasi 70 persen tunai dan 30

persen *near cash*.

Pembebasan kedelapan debitor itu dinilai layak untuk diproses karena telah memenuhi berbagai syarat, antara lain menandatangani perjanjian PKPS APU dan atau perjanjian penyelesaian sementara kewajiban pemegang saham dan pengakuan utang. Selain itu, mereka telah membayar kewajiban kepada BPPN sebelum masa tugas BPPN berakhir atau telah menyampaikan rencana pembayaran sejumlah kewajiban kepada Tim Pembebasan BPPN dan atau kepada Menkeu.

Mengenai Prosedur Penanganan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No 151/KMK.01/2006.

Harian *Republika*, 18 Maret 2006 memberi judul beritanya “Pemerintah Ampuni Pengemplang BLBI”. Harian ini diantaranya memuat jawaban Kejaksaan Agung, apakah SK PKPS itu sama dengan *release and discharge* (R&D) yang dulu sempat kontroversial juga.

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh membedakannya. Pada R&D, katanya, ada kontroversi karena tindak pidana tidak bisa hilang, meski kerugian negara sudah dikembalikan. Namun, dengan mekanisme SK PKPS diharapkan tidak ada lagi pro dan kontra yurisdiksi kasus tersebut.

Adapun pola pembayarannya adalah 100 persen tunai atau *near cash*, yaitu penyelesaian dengan sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau surat utang negara (SUN) sesuai kesepakatan dengan Menkeu.

Pro Kontra

Menghadapi reaksi negatif atas masalah ini, seperti dikutip *Investor Daily*, 18-19 Maret 2006, Menko Perekonomian Boediono menjelaskan, penetapan delapan debitor itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang melibatkan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Tanggapan positif memang sulit diharapkan. Anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun, menyatakan, kerugian negara akibat tunggakan BLBI mencapai Rp 144 triliun. Dari jumlah itu, yang dikembalikan ke negara baru lima persen. Ia meminta agar payung hukum penyelesaian BLBI ini mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dengan tidak menghapuskan tindakan pidana mereka.

Bahkan kepada *Trust*, pengamat perbankan Pradjoto mengaku heran dengan sikap pemerintah yang kooperatif terhadap para pengemplang BLBI itu. Proses penyelesaian kewajiban itu diberi tenggang waktu 8 tahun sejak mereka menerima BLBI. Tiba-tiba mereka sekarang baru muncul. Pradjoto mempertanyakan itikad baik para obligor itu.

Total uang BLBI yang dinikmati 8 obligor bermasalah itu mencapai Rp 3 triliun lebih. Mereka adalah: Marimutu Sinivasan, Ulung Bursa, Atang Latief, Lidia Mughtar, Omar Putihrai, Agus Anwar, Adisaputra Januarydy dan James Januarydy. ■ RH



MENKO PEREKONOMIAN-MENKEU-JAKSA AGUNG: Delapan obligor BLBI bermasalah akan diampuni pemerintah.

Kontroversi Kepemimpinan di Senayan

Gaya kepemimpinan Agung Laksono dan Zaenal Ma'arif di DPR menuai kritik. Mulai dari mosi tidak percaya sampai akan dilaporkan ke Badan Kehormatan menerpa mereka.

Dua pucuk pimpinan DPR-RI itu kembali didesak mundur dari jabatan masing-masing, Agung Laksono (Ketua DPR-RI) dan Zaenal Ma'arif (Wakil Ketua DPR), melalui mosi tidak percaya yang disampaikan beberapa anggota DPR dari sejumlah fraksi.

Ancaman itu terlontar sebagai reaksi terhadap gaya kepemimpinan Agung dan Zaenal terkait pelaksanaan Sidang Paripurna DPR (7/3) yang beragendakan mendengarkan jawaban pemerintah (baca: Presiden RI dan jajarannya) menyang-

Ali Mochtar Ngabalin (F-BPD).

Dalam sidang itu, SBY memang tidak hadir dan hanya mewakili kepada Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sebagai *speaker* pemerintah menjawab pertanyaan yang diajukan DPR lewat hak interpelasi. Hadir juga Mensos Bachtiar Chamsyah, dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra.

Menyikapi surat yang kontroversial itu, F-PDIP, F-PKS, dan F-PKB berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR.



AGUNG LAKSONO

kut hak interpelasi (bertanya) DPR tentang busung lapar dan wabah polio.

Agung Laksono dikritik gara-gara sepuccuk surat kontroversial yang dia layangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isi surat itu, saran kepada Presiden SBY agar tak usah hadir ke Sidang Paripurna DPR (7/3) untuk memberikan jawaban atas interpelasi sejumlah anggota Dewan mengenai busung lapar dan wabah polio.

Adanya surat itu terungkap menyusul interupsi bernada protes oleh anggota DPR: Ramson Siagian, RM Pupung Suharis, dan Panda Nababan (F-PDIP) serta



ZAENAL MA'ARIF

Surat Ketua DPR yang dikirimkan ke Presiden RI itu bernomor KD.02/1666/DPR RI/2006 tanggal 27 Februari 2006 perihal penyampaian hak interpelasi DPR. Surat yang ditembuskan juga ke pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi, dan Sesneg itu antara lain menyatakan, keterangan Presiden dimaksud dapat diwakilkan kepada Menteri. *Nah*, klausul 'dapat diwakilkan kepada menteri' itulah yang memicu protes mereka.

"Agung telah lakukan kolusi politik dengan Presiden. Menyaranakan agar tak datang itu sama dengan kolusi. Itu meniciderai DPR," kata Ketua F-PDIP, Tjahjo

Kumolo, seperti dikutip *Rakyat Merdeka* (8/3).

Ihwal fungsi pimpinan PDR tercantum pada Tata Tertib (Tatib) DPR. Pasal 27 ayat (1) huruf c dan d/Tatib DPR menyebutkan, Ketua DPR hanya menjadi juru bicara DPR serta melaksanakan keputusan DPR.

Lantas apa tanggapan Agung dan Zaenal? Respons keduanya relatif senada. Agung Laksono mengabaikan mosi tidak percaya atas kepemimpinannya di DPR. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengacu pada ketentuan UU No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa masa jabatan kepemimpinan Dewan adalah selama lima tahun.

"Saya kira tidak ada yang salah dengan surat itu. Itu sudah sesuai dengan tata tertib Dewan. Kalau ada yang lakukan itu (mosi tidak percaya, *red.*), silahkan saja. Itu hak mereka," kata Agung di Jakarta Rabu (8/3).

Agung mengatakan, surat yang dilayangkannya kepada Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Ayat (4) Peraturan Tatib DPR: keterangan Presiden dapat diwakilkan kepada menteri.

"Saya tidak *ngarang*, lagi pula pengiriman surat seperti itu sudah sering dilakukan. Saya juga tidak mengarahkan Presiden. Itu kan sesuai dengan Tata Tertib saja. Presiden mewakili kepada menteri juga sudah berdasarkan undang-undang dan tata tertib DPR," jelas Agung.

Zaenal Ma'arif juga beranggapan surat dari Ketua DPR selaras Tatib DPR. Kepada Anis Fuadi, wartawan *Berita Indonesia*, di kediamannya belum lama ini, Zaenal Ma'arif menampik anggapan dirinya dan Agung melanggar aturan.

"Saya melihat pimpinan Dewan tidak melenceng dari aturan persidangan. Kalau kita dinilai melanggar aturan, pasti pimpinan Dewan diundang Badan Kehormatan DPR. Kalau dilihat *kok* begitu, *yah* suasananya memang begitu *kok*. Mau bagaimana lagi?" urai politikus dari Partai Bintang Reformasi (PBR) itu dengan nada enteng.

Sejatinnya, desakan untuk mengganti dua pimpinan DPR ini bukan baru pertama kali terjadi. Ketika Setidaknya saat DPR menyetujui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahap pertama 2005 lalu, Agung dan Zaenal dituding bermain mata dengan pemerintah sehingga DPR kemudian memutuskan menerima kebijakan pemerintah tersebut. ■ **af**

Selamat Tinggal SBKRI!

SEBUAH kabar gembira bagi warga negara Indonesia (WNI) –khususnya– etnis Tionghoa berhembus dari Senayan. Panitia Khusus (Pansus) RUU Kewarganegaraan DPR-RI sepakat menghapuskan kewajiban kepemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi WNI yang telah memiliki akte kelahiran.

Slamet Effendy Yusuf, Ketua Pansus RUU Kewarganegaraan DPR, menegaskan hal itu pada Rabu (8/3). Sementara menyangkut naturalisasi hanya berlaku bagi warga negara asing yang menjadi WNI. Otomatis, anak-anaknya yang lahir di Indonesia adalah WNI. Namun, bila si anak berasal dari perkawinan campur (biasanya ayah WNA dan ibu WNI, red.), maka sang ayah lah yang mendapat naturalisasi, anaknya tidak. ■



SLAMET EFFENDY YUSUF



HIDAYAT NURWAHID

Hidayat Nurwahid: Gaji DPR Belum Mendesak Dinaikkan

HEBOH yang berkembang menyusul teriaknya kabar tentang rencana kenaikan gaji anggota DPR (berkisar Rp 15 juta/bulan) dan pimpinan DPR (sekitar Rp 16 juta/bulan), yang dimuat dalam anggaran 2006, memancing tanggapan kritis dari Ketua MPR-RI, Hidayat Nurwahid.

Bagi Hidayat Nurwahid, gaji anggota DPR belum saatnya dinaikkan karena saat ini banyak rakyat yang hidup di bawah kesejahteraan.

“Rencana kenaikan gaji anggota DPR itu tidak tepat waktu, karena saat ini perekonomian rakyat Indonesia masih terpuruk,” ungkap Hidayat di Yogyakarta, pertengahan Maret 2005.

Justeru yang sangat mendesak ditingkatkan dari anggota DPR, lanjutnya, adalah kinerja pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang menyangkut kepentingan rakyat. Dia mengingatkan, terpuruknya perekonomian bangsa tidak lepas dari banyaknya anggaran yang bocor.

Karena itu, mantan Presiden PKS itu berharap, pimpinan dan anggota DPR semestinya memiliki empati lebih pada nasib rakyat yang saat ini sebagian besar masih hidup miskin.

“Jika anggota DPR ingin sejahtera maka harus meningkatkan kinerja terutama dalam pengawasan terhadap anggaran yang sering bocor. Dengan demikian, perekonomian meningkat dan semua rakyat dan anggota DPR sejahtera,” cetusnya.

Dalam hematnya, kondisi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan anggota Polri dengan golongan maupun pangkat terendah yang paling mendesak dinaikkan gajinya.

Kepada rakyat umum diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi dana kesehatan, pendidikan, kebutuhan petani, dan perumahan sederhana yang sehat. ■

Siapa Orang Nomor Satu PBR?

SETELAH terjalin *islah* (rujuk politik) di antara dua pihak berseteru yang masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang *legitimate*, Partai Bintang Reformasi (PBR), kini diketuai KH. Zainuddin MZ, akan menggelar Muktamar PBR pada 22-24 April 2006 di Denpasar, Bali.

Agenda utama muktamar adalah pemilihan Ketua Umum DPP PBR yang baru, menggantikan Zainuddin MZ. Sejumlah nama yang disebut-sebut kandidat kuat, antara lain, Bursah Zarnubi, Zaenal Ma'arif, Ade Nasution, dan Jafar Badjeber. Sementara Zainuddin sendiri tidak bersedia dicalonkan lagi atas kemauannya sendiri. Bukan bagian dari kesepakatan *islah*.

“Saya sendiri sudah final, tidak akan

ikut rebutan jadi ketua umum. Karena bagi saya, jabatan itu bukan tujuan, tapi strategis,” kata Zainuddin, se usai bertemu Wapres M. Jusuf Kalla, akhir Februari silam.

“Da’i Sejuta Umat’ itu secara terus-terang menyampaikan salutation dan terima kasih kepada Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, atas peranannya sehingga terjadi *islah* di PBR.

“Kami berterima kasih kepada beliau (Wapres) yang telah membantu menyelesaikan masalah PBR melalui orang kepercayaannya Pak Aksa Mahmud. Beliau membantu tapi tidak intervensi. Itu yang bikin kami kagum,” ucapnya.

Tak lupa, Zainuddin *mewanti-wanti*,



KH. ZAINUDDIN MZ

muktamar Denpasar akan menjadi muktamar terakhir apabila pascamuktamar PBR terpecah kembali. Kata Zainuddin, jika muktamar itu gagal, tamatlah riwayat PBR. Pengalaman perpecahan pascamuktamar pertama di Jakarta, beberapa waktu lalu cukup menyakitkan. Untuk *islah* saja membutuhkan waktu 5-6 bulan.

Masih kata Zainuddin, kader PBR dari seluruh

daerah sepakat untuk tidak *merger* (bergabung) dengan partai politik lain karena tidak lolos *electoral threshold*. Jadi, PBR hanya akan berganti nama yang akan ditentukan dalam muktamar. Disebut-sebut, Zainuddin akan ditempatkan dalam Dewan Syuro PBR. ■ **af**

◆ ONGGY HIANATA

TANPA KEGAGALAN TAK ADA KESUKSESAN

Harus menghadapi banyak kegagalan dulu, sebelum ia sukses menjadi seorang wiraswasta andal seperti sekarang. Kini ia menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ingin hidupnya lebih bernilai.

Sosoknya tenang dan kalem saat berbincang-bincang di sebuah kafe dengan *Berita Indonesia*. Namun, jika sudah pernah menghadiri salah satu seminar yang diselenggarakannya, orang akan melihat sisi dirinya yang lain di depan para peserta. Ia berbicara dengan penuh semangat dan berapi-api, mengisahkan pengalaman hidupnya yang diawali kegagalan dan membangkitkan motivasi peserta seminar dengan menunjuk dirinya yang kini sukses sebagai contoh bahwa tanpa kejatuhan, seseorang tidak akan bangkit lebih tinggi.

Dialah Onggy Hianata, seorang inspirator yang sudah melanglang buana ke berbagai negara.

Pria kelahiran Tarakan Kalimantan Timur, 44 tahun yang lalu ini memang layak menjadi contoh inspirasi bagi orang-orang yang merasa hidupnya gagal dan tak berarti. Lahir dalam keluarga sederhana keturunan non-pri, Onggy tak pernah merasa dirinya berbeda. "Saya lahir di Tarakan, makan, mandi di tepi sungai," ujarnya.

Ayahnya, Ong Tjoi Moy, hanya seorang kepala administrasi dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Namun demikian, ayahnya tidak pernah mengeluh. Ini pula yang menjadikan Onggy mengidolakannya.

"Jujur, tegar, penuh perhatian pada keluarga, positif dan bertanggung jawab. Saya belajar banyak darinya," ujar Onggy. Sebelum meninggal pada tahun 1981, ayahnya mengumpulkan semua anaknya dan memberikan pesan agar mereka selalu menjaga nama baik dan integritas.

Itulah yang dihayati Onggy hingga sekarang. Pada tahun 1983 ia merantau ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan tinggi bahasa. Di sela-sela waktu kuliah, dia mencari uang untuk biaya hidup.

Aneka pekerjaan pernah ia jalani, mulai dari pedagang keliling buku sampai bikin kerupuk ubi, mulai dari berjualan lotre Porkas hingga berjualan jagung bakar di depan kampus, serta ikut bisnis pemasaran jaringan.

Bisnisnya selalu jatuh bangun, akibat situasi dan kondisi sering berubah. Sebagai juragan kerupuk ubi, misalnya, ketika pesanan kerupuk ubi sudah mulai banyak, ia ditipu rekannya.

Sekalipun jatuh bangun, Onggy tetap maju dengan berusaha menjaga nama baik dan integritas. Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah nomor satu. Sekali menipu, selamanya semua pintu tertutup sekaligus menutup kesempatan. Pedoman lain yang dia petik dari pengalamannya yang pahit itu adalah *forgive and forget*, maafkan dan lupakan. Perjalanan hidup

masih panjang, kalau selalu mengenang kegagalan, bagaimana berani menempuh masa depan.

Dengan tekad itu, dia pergi ke Jakarta awal Januari 1998. Praktis tanpa bekal karena mengalami kebangkrutan. Ia harus pula membawa istrinya, Candra Dewi, yang dinikahinya tahun 1995 dan putra pertamanya yang kala itu baru berumur satu bulan, Rich Onggy Jr.

Menghargai Hidup

Sebagai seorang praktisi di bidang pengembangan mental dan pribadi, Onggy punya keprihatinan yang sangat besar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah masalah korupsi yang seolah-olah dianggap telah menjadi 'budaya' bangsa Indonesia.

Ia sendiri sesungguhnya tidak sependapat dengan anggapan korupsi sudah membudaya. "Itu 'kan kata orang," ujarnya. Kalau pun memang benar sudah menjadi budaya, bukan berarti setiap orang



ONGGY HIANATA:
Sang inspirator.

harus mengikutinya agar dianggap tidak ketinggalan zaman.

Menurutnya, para koruptor itu adalah orang-orang yang tidak menghargai hidupnya. Filosofi “*Value Your Life*” itu sebenarnya mendalam sekali, yakni bagaimana kita menghargai diri sendiri, menghargai keluarga kita dan menghargai orang lain.

Jika para koruptor itu bertanya pada hati mereka yang terdalam, tentu mereka sendiri merasa bersalah karena telah menghidupi keluarganya dengan uang haram.

Sebagai seorang inspirator, banyak filosofi dari berbagai tokoh yang menjadi sumber inspirasinya. Tak ada tokoh tertentu, melainkan semua tokoh menjadi panutannya.

Ia mengagumi Gandhi karena kerendahan hatinya dan kepemimpinannya. Tokoh India itu adalah seorang pemimpin sejati. Ia tidak pernah menggunakan kekerasan sebagai kekuatannya. Integritasnya membuat namanya dihormati sepanjang zaman. Ia mengagumi Kong Hu Cu, filsuf dari zaman Tiongkok kuno, yang ajarannya tentang kebaikan tak lekang hingga sekarang. Ia juga meneladani tokoh-tokoh agama seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad, bahkan Buddha Gautama. Baginya, keteladanan itu tidak melihat agama. Banyak suri tauladan yang bisa dipetik dari semua tokoh-tokoh agama itu. “Janganlah berpandangan fanatik dan sempit,” ujarnya.

Onggy melihat berbagai konflik yang terjadi di tanah air akibat pandangan sempit itu. Menurutnya, jika seorang pemimpin berpandangan sempit, akan membuat pengikutnya menjadi radikal.

Kalau ada pertikaian yang membawabawa agama, menurutnya, itu bukan masalah agamanya melainkan karena oknumnya. Jadi oknumnyalah yang harus bertanggung jawab. Pandangan sempit juga seringkali berlaku bagi ras dan warna kulit. Ada pertentangan antara pribumi dan non-pribumi, bahkan antar suku pribumi sendiri.

BIODATA

NAMA LENGKAP : Onggy Hianata
TEMPAT/TGL LAHIR : Tarakan, 6 Maret 1962
ISTERI : Candra Dewi
ANAK : Rich Onggy Jr., Birdie, Evander
PENDIDIKAN FORMAL : S1 Bahasa, STIBA Surabaya

AKTIVITAS:

- Managing Director PT Edunet International
- Pengusaha
- Pembicara (inspirator) di berbagai seminar pengembangan pribadi, di dalam dan luar negeri, a.l: Malaysia, Singapura dan Hongkong.

Berbagi Kesuksesan

Mengalami berbagai kegagalan hingga sukses seperti sekarang membuat anak kedelapan dari sembilan bersaudara ini menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Mulailah ia sering diundang berbicara di berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri untuk membagikan

pengalamannya. Menginspirasi banyak orang agar tidak mudah menyerah menghadapi kegagalan. Ia kemudian dikenal sebagai seorang ‘inspirator’. Istilah yang lebih disenanginya ketimbang ‘motivator’. Sebab menurut Onggy, jika seseorang terinspirasi maka otomatis ia juga termotivasi.

Onggy akhirnya merasa terpanggil untuk menularkan kesuksesannya kepada sebanyak mungkin orang yang merasa hidupnya tak berarti karena ditimpa banyak kegagalan seperti dirinya dulu. Ia bersama beberapa temannya

kemudian mengagas dan mendirikan Edunet International pada bulan Juli 2002. Sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan dan pembentukan mental.

Melalui Edunet, ia ingin memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat luas. Seperti yang diungkapkannya kepada *Berita Indonesia*, ia belajar dari perjalanan hidup yang penuh kegagalan, namun mensyukuri hal itu.

“Nah, saya pikir kalau saya punya sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain, kenapa saya harus memegangnya sendiri,” ujarnya.

Maka, Edunet yang diambil dari kata *education network* itu ibarat sebuah suplemen setelah pendidikan formal. “Pokoknya, bagaimana saya bisa membantu banyak orang,” tegasnya. Dan salah satu filosofi Edunet itu adalah “*Value Your Life*”.

Sebagai Managing Director Edunet, Onggy menyelenggarakan seminar-seminar dan berbagai pelatihan motivasi. Ia menyusun program-program yang membangkitkan semangat hidup bagi peserta pelatihannya yang disebut “*A Life Changing Bootcamp*” itu.

Perubahan positif pun dirasakan para pesertanya. Perubahan itu sangat beragam, ada yang terlepas dari ketergantungan narkoba, minuman keras, kopi maupun pornografi, menghentikan kebiasaan selingkuh, lebih percaya diri, rajin beribadah dan mengharmoniskan kembali rumah tangga. Bahkan, ada yang bisa terbebas dari traumanya.

“Kita telah membayar harga yang mahal dari suatu kegagalan. Jika kita tidak belajar darinya maka akan lebih jelek lagi dari kegagalan itu sendiri. Setiap kegagalan minimal pasti ada satu pelajaran berharga yang harus dipetik,” katanya dengan bijak. ■ **RH, Am, WS**



Dr. Mari Bem Amude Alkatiri, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste

PEMIMPIN TANGGUH DARI TIMOR LESTE

Oleh: MYR. Agung Sidayu*

Banyak orang mengenal nama Mari Alkatiri, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste. Ia menjadi satu-satunya muslim dan keturunan Arab dalam pemerintahan negara yang masih muda itu. Terlebih lagi karena di Indonesia banyak orang keturunan Arab bernama belakang sama dengan nama sang Perdana Menteri. Tetapi lidah Portugis yang tidak fasih menyebut nama yang berbau Arab, membuat nama aslinya Mari Bin Hamud Bin Awad Alkatiri menjadi Mari Bem Amude Alkatiri.

Perdana Menteri Mari Alkatiri lahir di Dili, Timor Leste, pada tanggal 26 November 1949. Ia dibesarkan bersama 10 orang dari 12 bersaudara yang masih hidup. Walau ia beragama Islam dan empat saudara kandungnya tinggal di Indonesia, tetapi sepanjang hidupnya dihabiskan untuk berjuang demi kemerdekaan Timor Leste.

Posisinya di dalam partai itu adalah Sekretaris Jenderal. Menurut Konstitusi Timor Leste, Sekretaris Jenderal dari partai pemenang Pemilu berhak menjadi perdana menteri dan ketuanya menjadi pemimpin parlemen.

Mari berperawakan kecil dengan wajah yang tenang dan berwibawa. Setelah menyelesaikan sekolah rendah dan menengahnya di Dili, tahun 1970 ia meninggalkan Timor Leste untuk meneruskan pendidikan tingginya di Angola dan Mozambique. Ia lulus sebagai Surveyor dari Angolan School of Geography, juga lulus di bidang hukum dari Eduardo Mondlane University Mozambique.

Setelah itu, ia mengajar hukum internasional dan hukum konstitusi di universitas yang sama, di samping bekerja sebagai *senior legal consultant* di Maputo dari tahun 1992-1998. Ia juga bekerja



Kantor Perdana Menteri (PM) Timor Leste Dr. Mari Bin Amude Al-Katiri

sebagai konsultan senior di bidang hukum internasional dan hukum konstitusi di Parlemen Mozambique dari tahun 1995-1998.

Saat Alkatiri berusaha untuk menyelesaikan disertasi Ph.D-nya dengan judul "Timor-Leste Customary Law -Its Relationship with Formal Positive Law", upayanya terputus karena harus pulang ke Timor Leste pada tanggal 13 Oktober 1999.

Salah satu media Arab menyebutnya sebagai keturunan Arab yang paling berhasil di luar negara-negara Arab. Mari Alkatiri pun bangga menyebut dirinya sebagai muslim keturunan Arab dan pemimpin dari bangsa yang mayoritas Nasrani.

Lahir dari keluarga yang taat beragama, Mari Alkatiri juga dididik untuk cinta tanah air. "*Hubbul Wathan Minal Iman*" adalah ajaran yang selalu terngiang dan mendorongnya memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya, Timor Leste.

Namun ia tidak memaksakan kehendaknya kepada saudaranya-saudaranya yang lain. Maka, empat saudara kandungnya menjadi Warga Negara Indonesia dan tinggal di Kupang, Jakarta dan Surabaya.

Saudara kandungnya, Ali Bin Hamud Alkatiri, adalah juga Anggota Komite Sentral Partai Fretilin dari tahun 1975 sampai sekarang. Sementara kakak kandungnya, Djafar Bin Hamud Alkatiri, pernah menjabat sebagai Duta Besar Timor Leste untuk Kerajaan Malaysia. Sementara, Ahmad Bin Hamud Alkatiri, Taloul Bin Hamud Alkatiri dan Bader Bin Hamud Alkatiri semua berprofesi sebagai pengusaha jauh sebelum saudaranya menjadi Perdana Menteri. Sementara ibundanya, Fatmah Binti Umar Alkatiri, adalah wanita pertama Timor Leste yang menjahit Bendera Negara Timor Leste.

Sebelum kepergiannya ke Angola dan Mozambique, Mari Alkatiri mendirikan organisasi bawah tanah yang kemudian lebih dikenal sebagai the 'Movement for

the Liberation of Timor-Leste,' Tahun 1974 terjadi Revolusi Bunga di Portugal, dimana seluruh daerah jajahan Portugal di Afrika dan Asia, termasuk Timor Leste, yang dibebaskan untuk menentukan nasibnya sendiri

Situasi tersebut dimanfaatkan para pejuang Timor Leste dengan mendirikan sebuah wadah politik yang dikenal sebagai the 'Associacao Social Democrata Timorese' (ASDT) atau Timorese Social Democratic Association (TSDA). Mari diangkat sebagai wakil sekretaris jenderal. ASDT kemudian berubah menjadi Fretilin pada tanggal 11 September 1974. Mari Alkatiri duduk sebagai *central committee* dengan tanggung jawab utama di bidang hubungan internasional. Kemudian pada bulan Oktober 1975, ia terpilih sebagai National Political Commissioner.

Masuknya Indonesia pada tahun 1975 berakibat semakin berkembangnya situasi politik Timor Leste. Muncul gerakan 'the National Liberation Armed Forces of Timor-Leste' atau Falintil, tanggal 20 August 1975. Mari Alkatiri menjadi salah satu pemimpinnya.

Mari ditugaskan melakukan kampanye ke luar negeri dan mendapatkan dukungan. Ia melakukan kunjungan ke delapan negara Afrika. Sekembalinya dari perjalanan ke luar negeri Mari diangkat oleh Dewan Nasional untuk menyusun persiapan konstitusi sementara Timor Leste merdeka.

Fretilin kemudian melakukan proklamasi kemerdekaan Timor Leste pada tanggal 28 Nopember 1975, dengan nama Democratic Republic of Timor Leste. Mari Alkatiri diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Politik.

Masih dalam kaitan dengan kampanye itu, Wakil Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste Nicolao Lobato kemudian mengutus sejumlah tokoh muda Timor Leste ke luar negeri, termasuk Mari Alkatiri. Delegasi itu meninggalkan tanah airnya pada tanggal 4 Desember 1975. Mari adalah salah satu dari tiga orang pimpinan Timor Leste yang meninggalkan Dili terakhir kali. Ia berada di Mozambique sampai tahun 1999, menjelang jajak pendapat dilaksanakan



Penulis bersama PM Al-Katiri

dengan pengawasan International.

Pengalaman bersejarah yang dialami oleh Mari saat berada di pengasingan adalah partisipasinya di Dewan Keamanan PBB pada bulan Desember 1975 yang menghasilkan resolusi PBB.

Pada tahun 1977, Mari Alkatiri diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Timor Leste dalam pengasingan. Jabatan ini diembannya sampai dengan tahun 1982. Selama ini, Mari selalu aktif ikut serta dalam setiap sesi Komisi IV Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai wakil dari Timor Leste.

Menjunjung Amanah

Pada bulan April 1998, para pejuang Timor Leste mendirikan wadah mutakhir menjelang kemerdekaannya yaitu CNRT, untuk percepatan proses kemerdekaan. Di dalamnya tersusun Magna Carta yang berisi konsep kedepan Negara Timor Leste merdeka. Dr Mari Alkatiri adalah pencetus Magna Carta dalam posisinya sebagai National Political Commission

CNRT.

Pada bulan Agustus 1999, Dr. Mari Alkatiri diangkat oleh Presiden CNRT Xanana Gusmao untuk bertanggung jawab penuh atas nama CNRT terhadap urusan Timor Sea yang kemudian dengan piawai diperoleh hasil pembagian 90:10 untuk Timor Leste dari Australia. Timor Leste kemudian berhasil melakukan kerja sama besar dengan Conoco Phillips dalam mengembangkan proyek Bayu-Undan di Timor Sea dengan perkiraan penghasilan untuk Timor Leste 17-20 tahun mendatang sekitar 3 miliar dolar AS.

Dr Mari Alkatiri memegang amanah yang amat berat, yakni membangun Timor Leste. Di bawah kepemimpinannya, dua tahun terakhir ini Timor Leste telah menjadi anggota dari IMF, World Bank, ADB, ACP-EU dan CPLP (persatuan negara-negara berbahasa Portugis – walau sebenarnya sangat sulit untuk menerapkannya di tengah masyarakat yang terbiasa berbahasa Indonesia dan Tetun). Timor Leste juga menjadi peninjau dari PIF (organisasi negara Pasifik) dan ASEAN. Diharapkan dalam waktu dekat, ASEAN akan memasukkan negeri ini menjadi

anggota penuhnya sehingga semakin mengakrabkan hubungan antara sesama anggota, khususnya Timor Leste-Indonesia.

Untuk jerih payahnya memperjuangkan dan memimpin Timor Leste, Mari Alkatiri banyak mendapatkan penghargaan internasional. Salah satu yang amat prestisius adalah "Lifting Up the World with a Oneness" yang diterimanya pada ulang tahun ke-58 PBB di New York tahun 2003. Penghargaan yang sama diberikan kepada tokoh dunia lainnya yaitu ; Nelson Mandela, Paus John Paul II, Mother Theresa dan Mohammad Ali.

Ia menikah dengan seorang wanita asli Timor Leste, Marina Mari Alkatiri, yang kini membantu negaranya sebagai Kuasa Usaha Timor Leste di Mozambique. Pasangan ini dikaruniai tiga orang anak, yakni Nurima, Lukeno dan Solok.

* Penulis adalah wartawan majalah Berita Indonesia/ RH

Lahan Indonesia, Sawitnya Malaysia

Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit mentah (*crude palm oil*, CPO) terbesar dunia, tetapi justru nama Malaysia yang lebih dikenal di dunia internasional. Muncul fenomena baru, Malaysia gencar memasuki pasar Indonesia.

“Kerbau punya susu sapi punya nama”, demikian bunyi pepatah klasik, yang menjadi gambaran aktual potret kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia saat ini.

Pasalnya, dari total 4,25 juta hektar (ha) lahan sawit Indonesia, di antaranya seluas 1,49 juta ha setara 35,05% sudah dikuasai oleh sedikitnya 44 perusahaan sawit asal Malaysia. Bahkan, negeri jiran ini masih akan menambah lagi penguasaan lahan hingga mencapai total 2,5 juta ha di tahun 2010.

Malaysia, yang saat ini memiliki lahan sawit 4 juta ha di negerinya sendiri, sudah mengalami keterbatasan dalam menambah lahan. Berbeda dengan Indonesia, masih menyisakan tambahan 2 juta ha lahan sawit.

Selain oleh Malaysia, lahan sawit Indonesia lainnya dikuasai oleh perusahaan swasta nasional sebanyak 1,93 juta ha, atau sekitar 45,4%. Tiga besar pemain utamanya adalah Grup Sinar Mas, memiliki lahan 473 ribu ha, disusul Grup Salim 275 ribu ha, dan Raja Garuda Mas 250 ribu ha.

Harian ekonomi *Investor Daily*, memperoleh data langsung dari *AID Environment*, sebuah lembaga internasional yang bernaung di Amsterdam, Belanda, menuliskan, agresilitas perusahaan Malaysia menguasai lahan sawit Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, terjadi sejak 1997 lalu.

Saat itu Malaysia mengakuisisi sejumlah perusahaan sawit milik Indonesia. Sebagai contoh, perusahaan Kumpulan Guthrie Berhad tahun 1999 baru menguasai 60 ribu ha lahan, tetapi akhir tahun 2005 sudah menguasai total 216 ribu ha lahan sawit. Atau, hanya dalam enam tahun Guthrie berhasil menambah lahan baru 156 ribu ha.

Paralel dengan itu selama satu dekade terakhir terlihat Malaysia selalu unggul dalam hal jumlah produksi tahunan minyak sawit. Tahun ini pun, produksi tahunan minyak sawit Malaysia diperkirakan masih unggul berkisar 14,95 hingga 15,25 juta ton, sedangkan Indonesia hanya berkisar 15 sampai 15,1 juta ton.

Investor Daily menurunkan daftar 10 perusahaan kelapa sawit Malaysia sebagai pemilik lahan terbesar di Indonesia, yakni Kumpulan Guthrie Berhad yang menguasai lahan 216.000 ha,

disusul Golden Hope Plantations Berhad (122.000 ha), EPA Management Sendirian Berhad (113.100 ha), Lembaga Tabung Haji (Pilgrimage Fund Board) (90.000 ha), Kretam Holding (60.000 ha), Kuala Lumpur Kepong Bhd (56.000 ha), Trade-winds Bhd (50.000 ha), Hak Corporation Sdn Bhd (47.000), Suka Chemical Berhad (45.000), dan Dara Lam Soon (41.750 ha).

Fenomena Baru

Fenomena penguasaan lahan kelapa sawit oleh Malaysia seiring sejalan dengan kecenderungan agresilitas perusahaan-perusahaan Malaysia membeli saham perusahaan Indonesia.

Di hari yang lain *Investor Daily* (20/3) menyebutkan lima perusahaan Malaysia Petronas, YTL Power International Bhd, Telekom Malaysia, Maxis Communications Bhd, dan Commerce Assets Holdings, selama tahun 2002-2005 menggelontorkan uang 1,934 miliar dolar AS atau Rp 21 triliun hanya untuk membeli saham perusahaan Indonesia.

Perusahaan Indonesia yang dibeli antara lain Kerr-McGee Indonesia Ltd, PT Transportasi Gas Indonesia, Premier Oil Plc, Jawa Power, Santubong Investments BV, Bank Lippo, PT Exelcomindo Pratama, PT Natrindo Telepon Seluler, dan PT Niaga Sekuritas.

Badan Investasi Pemerintah Malaysia, Khazanah Nasional Bhd, mengumumkan pula ambisi besarnya untuk mengincar investasi di sektor infrastruktur, seperti jalan tol,

pembangkit listrik, dan bandar udara. Bahkan, Khazanah disebut-sebut bakal menguasai saham perusahaan agribisnis PT London Sumatera Tbk.

Menurut Direktur Pengelola Khazanah Nasional, Dato' Azman Hj Mokhtar, pihaknya memprioritaskan sektor infrastruktur yang selama ini telah menjadi basis kompetensi dan memiliki daya saing. Khazanah, sebelum ini telah mengakuisisi saham Bank Lippo, Bank Niaga, dan Exelcomindo, menempatkan 4% dana atau 640 juta dolar setara Rp 6 triliun di Indonesia, dari total kelolaan portofolio yang mencapai 16 miliar dolar AS.

Jumlah terbesar 94% masih diinvestasikan di Malaysia.

Investasi langsung perusahaan Malaysia di luar negeri memang terus meningkat. Sebagai contoh, pada tahun 2003 jumlahnya masih 1,4 miliar dolar AS, tahun 2004 naik 35% menjadi 1,9 miliar dolar. Malaysia adalah investor asing terbesar keenam di Indonesia, yang tahun 2003 nilainya mencapai 155,3 juta dolar, lalu tahun 2004 meningkat 197% menjadi 461,5 juta dolar.

Secara kumulatif selama tahun 1997-2004 investasi Malaysia di Indonesia mencapai total 6,7 miliar dolar AS mencakup proyek. ■ HT/am



Masih menyisakan tambahan 2 juta ha lahan kelapa sawit.

85 Langkah Perbaiki Iklim Investasi

Walau dinilai setahun terlambat, Pemerintah akhirnya menelurkan paket kebijakan perbaikan iklim investasi, terdiri 85 langkah perbaikan. Langkah ini masih tahap awal. Indonesia tahun ini membutuhkan dana investasi Rp 716 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal Maret lalu mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2006, perihal Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Di situ tertuang 85 langkah perbaikan yang akan pemerintah lakukan untuk mempercepat perbaikan iklim investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Yudhoyono, saat mengumumkan kebijakan terbarunya menekankan bahwa nilai yang terpenting dari Inpres terletak pada implementasinya. Ia menginstruksikan para menteri agar mematuhi jadwal yang sudah dibuat. Kepada Menko Perekonomian, Boediono, dimintanya agar terus memonitor tindak lanjut dari pelaksanaan paket kebijakan, dan melaporkannya kepada Presiden dan Wapres melalui forum yang akan dibentuk kemudian.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Lutfi, mengakui paket kebijakan investasi ini masih tahap awal, sehingga terlalu dini untuk menilai sejauhmana efektivitasnya. Kepada *Suara Pembaruan* (6/3), Lutfi mengatakan setelah ini pemerintah akan mempelajari lebih lanjut hal-hal apa lagi yang bisa mendorong industri dalam negeri, supaya mampu berkompetisi dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

“Paket investasi ini sifatnya untuk memperbaiki iklim investasi saja, dan merupakan pekerjaan lama yang kita selesaikan. Setelah ini, akan dilanjutkan dengan mempelajari apa yang dilakukan negara-negara kompetitor,” ucap Lutfi.

Komentar Bermunculan

Banyak komentar dari berbagai kalangan kemudian bermunculan menanggapi paket kebijakan perbaikan iklim investasi ini. Harian *Kompas* (6/3), misalnya, mengutip pernyataan ekonom



MS HIDAYAT

Faisal Basri, menyebutkan paket ini terlihat agak konkrit, sebab mencakup pula serangkaian program, tindakan, target penyelesaian, berikut siapa penanggungjawabnya. Sebagai langkah awal, jelas Faisal, paket ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja investasi, sehingga bisa menjadi ujung tombak peningkatan pertumbuhan serta kesinambungan pemulihan ekonomi.

Rakyat Merdeka (4/3) menurunkan pernyataan Menko Perekonomian Boediono, bahwa perbaikan iklim investasi sangat

dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Masih terkait paket kebijakan ekonomi, kepada harian *Pelita* (8/3) Boediono mematok tiga sasaran ekonomi yang harus dicapai. Yakni, *pertama*, menciptakan kestabilan ekonomi dengan upaya menekan tingkat inflasi hingga *single digit* 8%, kedua, mempercepat penyelesaian proyek-proyek besar dan *high profit*, dan *ketiga*, menciptakan sektor keuangan yang sehat.

Kadin Indonesia, melalui

Ketua Umum MS Hidayat menyambut baik paket kebijakan ini. Hidayat menilai paket perbaikan iklim investasi ini bertujuan untuk mendorong investasi, dan memicu pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Karena itu ia mendesak pemerintah supaya segera mengimplementasikan kebijakannya pada tahun ini juga, mengingat kemunculannya sesungguhnya sudah terlambat setahun. Implementasi harus pula diikuti segera dengan penyesuaian empat rancangan undang-undang (RUU), yang saat ini sudah dalam pembahasan di DPR, yaitu RUU Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Pajak. Hidayat menjamin target-target yang dibuat pemerintah akan dapat tercapai apabila tidak hanya sekadar wacana, tetapi harus dilaksanakan.

Mantan Menteri Keuangan, Mar’ie Muhammad, kepada *Bisnis Indonesia* (6/3) justru mengungkapkan hasil sebuah studi yang dilakukan oleh *World Economic Forum*, yang menunjukkan bahwa daya saing Indonesia, baik secara regional maupun global, semakin meluncur saja ke bawah. Akibatnya, lapangan kerja yang harus diciptakan semakin menurun, sehingga pengangguran terbuka terus meningkat, saat ini sekitar 11 juta orang.

Sementara itu, Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI), Hartadi A. Sarwono, kepada *Media Indonesia* (21/3) mengemukakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%, sebagaimana sudah ditetapkan pemerintah, Indonesia membutuhkan dana investasi Rp 716 triliun. BI, yang sudah terlebih dahulu mengeluarkan Paket Kebijakan di akhir Januari (disebut PakJan), ini juga dimaksudkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, menghitung bahwa perbankan



MUHAMMAD LUTFI

nasional hanya bisa menyumbang 20% dari kebutuhan investasi pada tahun ini. Karena itu, kata Hartadi, sangat diperlukan upaya keras agar Indonesia dapat menarik investasi langsung dari luar (*foreign direct investment/FDI*), agar dapat mencapai porsi yang diharapkan hingga 47,3% dari dana investasi yang diperlukan. Sisanya, perlu dicari lagi dari sumber-sumber lain. ■ HT/Rm

AMARAH DI ABEPURA

Judul di atas, ditulis oleh Majalah Berita Mingguan **Tempo** edisi 26 Maret 2006 sebagai judul sampul yang menggambarkan laporan utama majalah tersebut. Sampul depan bergambar muka yang penuh dengan cat di balik kaca yang retak. Kedua matanya terlihat berada dalam pecahan yang menggambarkan pulau Irian Jaya dimana Abepura berada.

Memang tragedi Abepura menjadi perhatian utama di sejumlah media setelah pecahnya kerusuhan berdarah di depan Kampus Universitas Cenderawasih 16 Maret lalu. Berita tersebut sungguh merisaukan. Tiga polisi dan satu tentara gugur dan puluhan lainnya luka akibat bentrokan antara massa yang menuntut penutupan PT Freeport dengan aparat keamanan.

Pengunjuk rasa menuntut penutupan PT Freeport, namun fakta di lapangan mengindikasikan persoalannya jauh lebih rumit. Bahkan terakhir muncul indikasi adanya keterlibatan LSM luar negeri dalam kerusuhan tersebut. Kendati demikian, Laksamana Muda Moh. Sunarto Sjoekronoputra usai pelantikannya sebagai Kapuspen TNI mengaku, belum menerima informasi tersebut.

Selain kasus di Abepura, Majalah *Tempo* juga menulis 'Pertempuran' di balik RUU Antipornografi. RUU itu kini memasuki tahap perumusan. Pro dan kontra pun terus menggelinding. Demonstrasi baik yang pro maupun yang kontra terus terjadi bahkan merambah ke berbagai daerah. Ketua Pansus RUU APP Drs H. Balkan Kaplale yakin bahwa RUU panas tersebut yakin akan disahkan meski dengan merevisi beberapa hal yang dianggap kontroversial.

Majalah **Forum**, edisi 26 Maret 2006 : Laporan Utamanya menulis *Who Wants To Be* Perampok Billionare, sebagai judul sampulnya. Forum menulis, perampok berhasil menggasak berlian senilai puluhan miliar rupiah, di kawasan Tebet Jakarta Selatan. Pelaku dalam aksinya menggunakan senjata api. Kekerasan



Tuntutan penutupan PT Freeport akhirnya berbuah darah. Peristiwa bentrokan di Papua menjadi pilihan utama beberapa majalah. Tiga polisi dan satu tentara menjadi korban.

dengan menggunakan senjata api memang diakui cenderung meningkat.

Sama dengan *Tempo*, *Forum* juga mengangkat kembali masalah seputar pro dan kontra tentang RUU Antipornografi dan Pornoaksi. Karena sebagian masyarakat mengatakan RUU itu menyelamatkan perempuan dan bagiannya lagi menyebut RUU tersebut menyebar kebencian pada tubuh perempuan.

Majalah **Trust** edisi, 20-26 Maret 2006 dalam salah satu beritanya, juga mengangkat masalah insiden di Abepura dengan judul tulisan, *Kemilau Berdarah di Papua*. Setelah sebulan menjadi kontroversi, persoalan Freeport kini memercikkan darah. Korban jiwa telah berjatuhan. "Persoalan ini akan diselesaikan lewat pendekatan keamanan" demikian *Trust* menulis.

Namun, dalam laporan utamanya,

Trust lebih memilih berita mengenai korupsi di Jamsostek. "Ada Korupsi (lagi) di Jamsostek' demikian judul beritanya. Perusahaan yang dipimpin Iwan Pontjowinoto tersebut dilaporkan oleh PT Barca Hardayaperkasa milik Hartati Murdaya dalam kaitannya dengan tender pengadaan perangkat Teknologi Informasi di Perusahaan BUMN tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah.

Majalah **Gatra**, edisi 25 Maret lebih beragam dalam laporannya. Namun, juga menyorot masalah Abepura. Demo anti Freeport merebak kemana-mana. Puncaknya 16 Maret 2006 pecah bentrok di Universitas Cenderawasih mengakibatkan tiga polisi dan satu tentara gugur diarak massa.

Selain itu, **Gatra** menyoroti bahwa kedatangan Menlu AS Condolezza Rice pertengahan Maret lalu ke Indonesia dicurigai sebagai langkah mengamankan kepentingan ekonomi Amerika. Lalu juga disorot mengenai Pertamina di bawah Dirut yang baru Ari Sumarno, yang dinilai semakin melunak. Kaitan dengan itu, ladang minyak Blok Cepu akhirnya dikelola oleh Exxon, raksasa minyak asal Houston Amerika Serikat. Padahal Dirut Pertamina sebelumnya Widya Purnama, berupaya keras untuk mempertahankan agar Pertamina yang mengelola Blok Cepu.

Majalah **SWA** edisi, 22 Maret 2006 menulis laporan utamanya, mengenai perang perusahaan dalam menguasai pasar, demi kelangsungan usahanya. Baik itu perusahaan jasa maupun barang. "**Perang Belum (dan Tak Akan Pernah) Usai**", demikian **SWA** menulis judul laporan utamanya. Majalah ini mengingatkan dengan filosofi bahwa kemenangan tertinggi sebuah perusahaan justru diraih ketika suatu perusahaan mampu memenangi perang tanpa terlibat satu pun pertempuran. "Yang penting otak, bukan sekadar otot, apalagi adu nekat," tulisnya. ■ **SB**

ADA XP DI DALAM APPLE



Para hacker akhirnya berhasil menjalankan Windows XP di iMac, Mac Mini dan Macbook Pro yang sudah berbasis processor intel.

Pada pertengahan tahun 2005 lalu, secara resmi Apple mengumumkan peralihan penggunaan processor dari sebelumnya menggunakan processor PowerPC menjadi menggunakan Intel Processor. Apple kemudian merealisasikan rencananya dengan meluncurkan produk terbarunya, iMac, Mac Mini dan MacBook Pro terbaru di tahun 2006 yang menggunakan processor Intel Core Duo.

Pilihan Apple menggunakan processor Intel kemudian menimbulkan beberapa spekulasi, di antaranya kemungkinan PC dan Mac saling bertukar *operating system*. Bayangkan sekiranya sebuah komputer Apple atau PC dapat terinstall Mac OS X, Windows XP dan salah satu distro GNU/Linux?

Secara teori, PC dan Apple saling bertukar OS sangat memungkinkan. Dengan sama-sama digunakannya arsitektur x86, keduanya menjadi memiliki banyak kesamaan.

Rasa penasaran yang besar membuat para *hacker* mencari cara menjalankan sistem operasi Windows XP di komputer Apple yang juga menjalankan sistem operasi OS X. Maka dibuatlah kompetisi yang diprakarsai pemerhati Apple, Collin Nederkoorn. Nederkoorn menggelar kompetisi tersebut segera setelah bos Apple, Steve Jobs, mengenalkan komputer Apple Mac pertama yang menggunakan chip Intel (Macbook Pro), pada Januari 2006. Supaya lebih memikat, Nederkoorn lalu menawarkan uangnya sendiri sebagai hadiah, yaitu US\$100.

diungkapkan American Speech-Language-Hearing-Association (ASHA) yang dikutip dari InformationWeek, Kamis (16/03/2006).

Muncul Virus Lokal Mybro

PENULIS virus lokal Rontokbro melahirkan varian baru MyBro yang sama sekali berbeda namun, dinilai lebih berbahaya. Varian ini ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda dari versi awalnya. Rontokbro (ditemukan pada pertengahan Oktober 2005) dan seluruh variannya hingga yang terakhir W32/Rontokbro ditulis menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic (VB). Di lain pihak, MyBro dibuat memakai Bahasa C. Varian MyBro itu pertama kali terdeteksi pada 14 Maret oleh perusahaan antivirus lokal Vaksincom yang menggunakan aplikasi Norman Virus Control. Tingkat penyebarannya belum diketahui secara pasti.



DARI KIRI KE KANAN: iMac 20", MacBook Pro dan Mac Mini yang menjalankan Windows XP.

Besaran hadiah terus bertambah, setelah berita mengenai kompetisi ini menyebar.

Kompetisi ini dinyatakan berakhir minggu kedua Maret 2006 lalu setelah sepasang hacker berhasil menemukan caranya. Hacker bernama sandi (keduanya tetap menyembunyikan identitas aslinya) "narf-2006" dan "blanka" ini mengantongi hadiah sebesar US\$

13.854.

Dalam lomba ini ditekankan bahwa untuk memenangkan kompetisi, para hacker harus mengupayakan agar Windows XP dan Apple OSX bisa jalan di komputer yang sama, tanpa menimbulkan gangguan satu sama lain. Kesulitan dari tantangan ini adalah adanya perbedaan cara *boot-up* dari Windows XP dan OSX. Intinya, PC dan Mac menggunakan teknologi yang berbeda untuk *loading* sistem operasinya.

Kedua hacker ini lalu membuat duplikat Windows XP yang sudah dimodifikasi. Modifikasinya dilakukan pada *installation files*, sehingga memungkinkan XP berjalan pada sistem *boot* Apple.

Software bantuan (*Blanka and Narf installer patch*) yang digunakan untuk dapat menjalankan Windows pada Mac, kemudian beredar di internet. Salah satunya bisa dilihat di onmac.net atau mac-windows.com. Ajang mengoprek sistem operasi ini rupanya terus berlanjut. Menurut perkembangan terakhir yang didapat Berita Indonesia dari situs gearlog.com, sebuah team bahkan berhasil menjalankan Windows XP di iMac, Mac Mini dan MacBook Pro yang sudah berbasis intel. ■

SEKILAS INFO

MP3 Player Ganggu Kesehatan Telinga

SURVEI membuktikan, penggunaan pemutar musik digital secara berlebihan bisa menjadi awal gangguan pendengaran. Jadi, bukan hanya iPod yang bikin 'budheg'. Dari 1.000 responden, ditemukan lebih dari setengah siswa sekolah di AS mempunyai sedikitnya satu gejala gangguan pendengaran. Hal ini kemungkinan diakibatkan dari meningkatnya penggunaan pemutar musik portabel dan produk sejenis. Dua dari lima siswa dan orang dewasa mendengarkan musik dari pemutar mp3 nya dengan volume yang tinggi. Kurang dari 30 persen pengguna menggunakan earphone yang tidak menggunakan busa sebagai penyaring suara, dan sebagian besar pengguna mendengarkan musik selama 1 hingga 4 jam setiap harinya. Demikian

Gaji Steve Jobs Hanya US\$ 1

NEWS.COM melansir berita yang menyatakan bahwa gaji Chief Executive Steve Jobs (Apple Inc) kembali dibayar sebesar US\$ 1 (US\$ 1 = Rp 9.243) dan tidak mendapatkan bonus lain selama fiskal 2005. Meskipun dirinya telah berjerih payah menjadi CEO, gajinya tetap tidak berubah dari fiskal 2004. Tetapi meskipun demikian dirinya mendapat kompensasi lain berupa saham perusahaan. Sebanyak 10 juta lembar saham milik Jobs yang diserahkan pada 2003 lalu, berhasil mencapai US\$ 532 juta pada akhir fiskal 2005. Angka tersebut berdasarkan perhitungan senilai US\$ 53,2 per saham yang diambil dari harga penutupan 23 September lalu. Dengan saham sebanyak itu, Steve Jobs memiliki saham Apple sebesar 1,2 persen.

Mengenal *Three Lions* di Ajang World Cup

Inggris dikenal sebagai negara sepakbola. Namun, perjalanannya menuju juara dunia Jerman 2006 masih panjang. Mampukan Three Lions mengulang suksesnya 40 tahun silam?



Kesebelasan Nasional Inggris 2006

Negara Ratu Elizabeth ini boleh dibilang sebagai negara tempat lahirnya olah raga sepak bola. Tetapi ironisnya, dalam sejarah Piala Dunia, negeri yang dikenal kompetisi paling ketat itu baru sekali meraih mahkota juara, yaitu pada tahun 1966. Gelar itu diraih Inggris di negaranya sendiri ketika mereka menjadi tuan rumah dengan mengalahkan Jerman Barat 2-4 di babak final. Pemain Inggris Geoff Hurst menjadi bintang pada pertandingan itu setelah dia mencetak *hat trick*.

Inggris pertama kali ikut putaran Piala Dunia pada tahun 1950. Hingga sekarang, Inggris telah berpartisipasi sebanyak 11 kali di ajang akbar itu. Namun, setelah memboyong gelar di tahun 1966, selanjutnya Inggris tidak pernah meraih prestasi berarti. Kecuali masuk babak semifinal di tahun 1990 di Italia. Ketika itu mereka kalah lewat adu penalti oleh Jerman yang kemudian meraih gelar juara.

Meski minim prestasi di Piala Dunia, kompetisi sepak bola klub-klub Inggris di dalam negerinya sangat maju dan berkembang. Kompetisi bertajuk "English Premiere League" itu melahirkan klub-klub macam Manchester United, Liver-

pool, Arsenal, atau Chelsea dan masih banyak lagi yang wara-wiri di kejuaraan antarklub dunia.

Tim yang dipegang pelatih asal Swedia Sven Goran Eriksson ini terus berbenah diri. Penunjukan Eriksson awalnya sempat mengundang kontroversi. Pasalnya, masih banyak orang Inggris yang merasa terpukul atas tim nasionalnya karena dilatih oleh pelatih yang bukan asal Inggris. Tetapi, kemudian kontroversi itu mereda setelah Eriksson mampu mengatrol prestasi Three Lions belakangan ini.

Hasil dari buah tangan dingin Eriksson, wajah dan gaya permainan Inggris juga dinilai berubah. Mereka tak lagi memainkan gaya sepak bola Inggris klasik yang biasanya dikenal mengandalkan permainan cepat dan umpan-umpan lambung jauh ke mulut gawang lawan. Kini mereka sudah biasa bermain dengan sentuhan satu dua dari kaki antar lini. Dalam tim itu juga terdapat nama besar sebagai pemain pilar yang tangguh seperti David Beckham, Michael Owen, Wayne Rooney, atau Steven Gerrard, Rio Ferdinand dan Sol Campbell.

Di Piala Dunia 2002 silam, sebetulnya Inggris termasuk tim yang disebut banyak pengamat merupakan calon kuat juara.

Sebab, dalam babak kualifikasi menuju Jepang-Korea Selatan itu sebelumnya mereka sempat membat Jerman 1-5. Tapi, sebuah tendangan bebas yang diambil Ronaldinho membobol gawang Inggris saat mereka berhadapan dengan Brasil di babak delapan besar dan mengubur impian tim Three Lions tersebut.

Di Jerman, Inggris tetap menjadi salah satu favorit juara. Mereka akan mengandalkan sejumlah pemain muda yang dimotori Wayne Rooney yang dikombinasikan dengan para pemain senior berpengalaman seperti Beckham dan Owen. Ramuan tim Inggris seperti sekarang ini juga dilakukan Italia dan Jerman, diprediksi akan menyulitkan setiap tim yang nanti berhadapan dengan mereka. Apakah gelar juara dunia yang kedua bagi Inggris akan hadir di Jerman?

Kiprah di Piala Dunia

Inggris sudah berpartisipasi di putaran final sebanyak 11 kali, yakni tahun 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, dan 2002. Tapi, prestasi terbaik mereka adalah saat menjadi juara Piala Dunia 1996 di kandang sendiri. Pada tahun 1990, di Italia, Inggris sempat melaju ke semifinal, tapi kalah dari Jerman lewat adu penalti 4-3. Di perebutan tempat ketiga, mereka juga dihempaskan tuan rumah Italia dengan skors 1-2. Pada keikutsertaan di Piala Dunia 1954, 1962, 1970, 1986, dan 2002, Inggris hanya mampu melaju sampai babak perempat final. ■ **Sb**

SKUAD LENGKAP

Pelatih : Sven Goran Eriksson

NO.	PEMAIN	POS
	Robert Green	G
	David James	G
1.	Paul Robinson	G
	Wayne Bridge	D
2	Luke Young	D
4	Ledley King	D
5	Rio Ferdinand	D
6	John Terry	D
6	Sol Campbell	D
12	Phil Neville	D
14	Paul Konchesky	D
	Michael Carrick	M
4	Steven Gerrard	M
7	David Beckham	M
8	Frank Lampard	M
11	Joe Cole	M
14	Jermaine Jenas	M
7	Shaun Wright-Phillips	S
9	Wayne Rooney	S
10	Michael Owen	S
15	Alan Smith	S
16	Peter Crouch	S
18	Jermain Defoe	S

Keterangan:

G=Goalkeeper M=Midfielder
D=Defender S=Striker

CONDOLEEZZA RICE

Wajahnya memang tidak fotogenik seperti Margareth Thatcher atau mantan ibu negara Hillary Clinton. Tapi, pesona dan pengaruhnya demikian kental dalam strategi kebijakan luar negeri AS, terutama sejak George Walker Bush menjadi presiden.

Kedatangan Menteri Luar Negeri AS, Condoleezza Rice (52) ke berbagai negara seperti Indonesia, Australia dan Jepang beberapa waktu lalu menyisakan 'cerita' tersendiri. Cerita itu ada yang bernada kecaman, namun tidak sedikit yang memuji pribadi bahkan justru mengacungi jempol atas kemampuan diplomasinya.

Sosok Rice barangkali menjadi sosok yang langka. Seperti yang digambarkan oleh Arifin Siregar, mantan Gubernur Bank Indonesia. "Dengan kecemerlangannya, ia adalah seorang yang bisa memukau lawan debatnya karena pendekatannya yang personal, meski lawan debat itu tak bisa menerima argumentasinya," demikian Arifin menilai.

Gambaran tentang birokrat pemerintah AS di bawah Presiden George W. Bush sedikitnya tercoreng dengan invasi AS ke Irak. Pemerintah AS sekarang juga dijuluki sebagai si penerkam. Jadi, mau tak mau Rice juga menjadi bagian dari gambaran itu. Maka, ketika Rice berkunjung ke Australia, setelah sehari kunjungannya ke Indonesia, ia mendapat sambutan yang kurang hangat, utamanya dari para mahasiswa.

Ketika sedang berpidato, ia diinterupsi seorang mahasiswa dengan teriakan lantang, "Condoleezza Rice, Anda seorang kriminal perang. Tangan Anda berlumuran darah rakyat Irak dan Anda tidak bisa menghilangkan bekasnya". Mahasiswa itu lalu digiring keluar ruangan. Namun, tak lama kemudian pidatonya



Putri Pendekar Perang

kembali diinterupsi saat ia bicara mengenai upaya mendorong kemerdekaan di Irak. "Kebebasan macam apa yang sedang Anda bicarakan? Bagi rakyat Irak, Anda itu seorang pembunuh". Rice berkunjung ke Australia untuk membicarakan masalah keamanan dengan para pejabat Australia, salah satu negara yang menjadi sekutu utama AD dalam invasi ke Irak.

Pribadi Mempesona

Kompas (16/3) mencatat, Rice yang dijuluki sebagai pendekar perang itu, mempunyai aura mempesona. Ia bukan hanya sangat menguasai keahlian ber-

komunikasi, tapi ia tahu betul bagaimana berhubungan dengan komunitas Asia, yang terbiasa dengan berjabat tangan lalu diperkuat dengan sentuhan tangan kiri. Ia ingin memperlihatkan keseriusan bahwa ia adalah seorang teman sejati.

Lepas dari faktor Amerika Serikat sang adikuasa, di balik namanya Rice memang memiliki aura. Orang akan langsung melupakan wajahnya yang tidak fotogenik, tetapi terpesona pada kelihaihan bicaranya. Ia berhasil membelokkan persoalan dan membawa pendengarnya berada di bawah sudut pandangannya jika dilontarkan pertanyaan yang menggugat kebijakan AS.

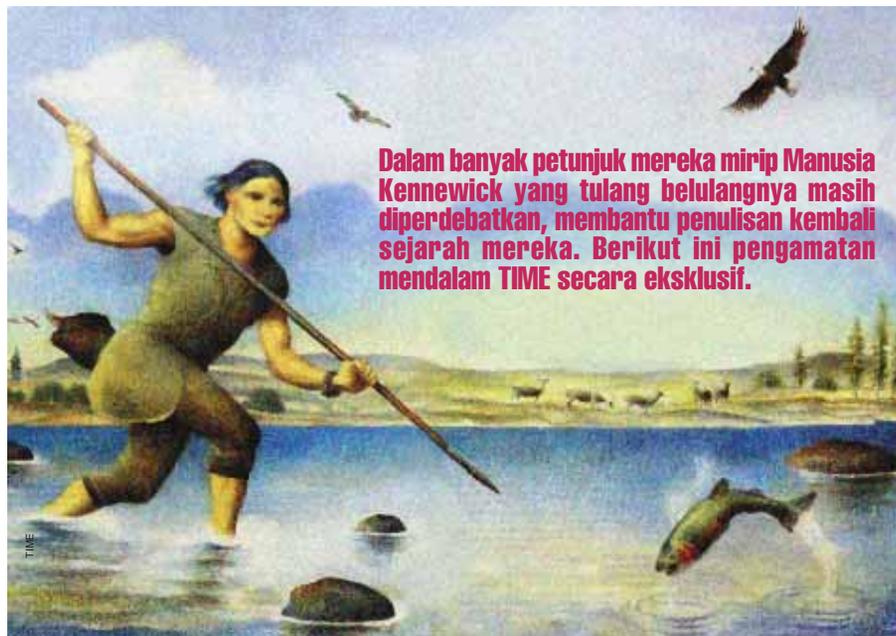
Sementara *Republika* (16/3) mengomentari kunjungan Rice ke Indonesia, Rice pandai menutupi kelemahan AS dengan pidato yang menarik dan diplomatik. Padahal pidatonya sendiri sebenarnya biasa-biasa saja. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa dua hari kunjungan Rice ke Indonesia 14-16 Maret lalu, berpengaruh langsung terhadap persahabatan dengan Amerika.

Dilahirkan tahun 1954 di Birmingham, Alabama, di bawah bayang-bayang rasisme, Rice meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Politik dari Universitas Denver tahun 1974. Gelar Master Ilmu Politiknya diraih tahun berikutnya, 1975 di Universitas Notre Dame. Di usia 26, tahun 1981, Rice menggondol gelar doktor (Ph.D) di Sekolah Tinggi Kajian Internasional, Universitas Denver.

Rice tertarik pada Hubungan Internasional dan kajian mengenai Soviet ketika ia kuliah di Universitas Denver. Inspirasinya datang dari seorang pengungsi Chechnya, Josef Korbel, ayah dari mantan Menteri Luar Negeri AS wanita pertama, Madeleine Albright. Wanita yang masih lajang ini telah meraih berbagai penghargaan, antara lain Walter J. Gores Award pada tahun 1984 dan School of Humanities and Sciences Dean's Award, dan gelar doktor kehormatan dari beberapa universitas terkemuka.

Rice fasih berbahasa Rusia, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Ketika diangkat sebagai penasihat keamanan nasional pada pemerintahan George Walker Bush, Rice sudah menjadi anggota dewan direksi di sejumlah perusahaan termasuk dewan direksi raksasa perminyakan Chevron Corporation. Rice secara pribadi dekat dengan George Walker Bush, dan sejak Bush menjadi presiden, Rice sudah memberikan pengaruhnya dalam strategi kebijakan luar negeri. Maka kini ia dipercaya Bush sebagai Menteri Luar Negerinya. ■ **DW, AD**

Manusia Asli Amerika



Dalam banyak petunjuk mereka mirip Manusia Kennewick yang tulang belulanginya masih diperdebatkan, membantu penulisan kembali sejarah mereka. Berikut ini pengamatan mendalam TIME secara eksklusif.

Jelas, sejak awal Jim Chatters mengamati tulang belulang manusia yang mati bukan akibat tindak kejahatan—jadi tak seorangpun yang bisa digugat. Chatters, antropologis forensik, telah diminta oleh bagian penyidik kematian Benton County, Washington, untuk konsultasi mengenai sejumlah tulang yang diketemukan oleh dua mahasiswa di tanggul Sungai Columbia, dekat kota Kennewick.

Ketika bagian penyidik kematian meminta pendapatnya, Chatter memberi isyarat awal, karena bentuk tengkoraknya serupa Caucasoid, tulang-tulang itu mungkin milik seorang pemukim akhir tahun 1800-an. Namun *CT scan* mengungkapkan sebiji batu menempel di tengkorak tersebut, mendorong Chatter mengirim sepotong tulang tangan ke Universitas California di Riverside untuk pendataan radiokarbon. Ketika hasilnya dikirim kembali, perkiraan awal meleset jauh. Tulang-tulang itu bukan berusia 100 atau 1000 tahun, tetapi tulang seseorang yang mengembara di tanggul-tanggul Sungai Columbia, lebih dari 9.000 tahun lalu.

Singkatnya, tulang belulang yang kemudian diketahui berasal dari mayat Manusia Kennewick itu, usianya dua kali lebih tua dari Iceman (manusia es) yang diketemukan tahun 1991, di Gletser Alpin. Ini tulang belulang paling tua dan paling lengkap yang pernah diketemukan di

Amerika. Setiap penemuan baru memberi makna yang lebih penting pada misteri yang terus terjadi mengenai siapa yang menghuni Benua Baru—sudah terakhir bumi yang dihuni manusia. Manusia Kennewick dapat memberikan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan muskil; Kapan migrasi terjadi? Dari mana para penghuni pertama Amerika berasal? Dan

bagaimana mereka sampai di sana?

Para periset pemerintah AS telah meneliti tulang-tulang tersebut. Tetapi para ilmuwan independen butuh waktu satu dekade untuk memperoleh gambaran yang jelas. Meskipun diketemukan sejak tahun 1996, suku Indian Umatilla dan suku-suku lembah sungai Columbia segera mengklaim bahwa mayat para nenek moyang mereka mestinya dilindungi oleh UU Pengembalian dan Perlindungan Kuburan-Kuburan Manusia Asli Amerika. Mereka menuntut agar tulang belulang tersebut dikebumikan kembali tanpa dinodai studi ilmu pengetahuan. Sekelompok periset digugat, dimulai dengan perang gugatan hukum, dan negosiasi berakhir Juli lalu, sehingga para ilmuwan memperoleh akses yang luas untuk meneliti tulang-tulang tersebut.

Tim ilmuwan yang melakukan penelitian ulang dipimpin oleh antropologis forensik Douglas Owsley dari Museum Nasional Sejarah Alam, Smithsonian Institut. Owsley dan timnya mampu memberi petunjuk yang lebih jelas tentang gambaran pisik Manusia Kennewick. Tingginya kira-kira 1,7 meter dan sangat tangguh. Terbiasa dengan tangan kanan: buktinya, tulang tangan kanannya lebih besar dari tangan kiri. Dia berburu dan menangkap ikan sepanjang hidupnya. Menurut perkiraan sebelumnya, Manusia Kennewick berusia rata-rata 45 sampai 55 tahun. Namun Owsley memperkirakan usia rata-rata 38 tahun, karena tak satu pun tulang yang rapuh. ■ SH

ASAL-USUL ORANG AMERIKA

Selama puluhan tahun, para ilmuwan mengira Dunia Baru itu dihuni oleh para migran dari Asia yang mengembara dari tengah benua itu kira-kira 12.000 tahun yang lalu. Temuan baru membuang teori itu ke laut.

Tiga pandangan tentang asal-usul orang Amerika;

Darat : Temuan-temuan di Klovis, N.M. mengarah pada teori bahwa budaya tunggal manusia masuk ke Amerika dari sisi timur Rocky Mountains kira-kira 12.000 tahun yang lalu.

Pantai : Temuan-temuan belum lama ini di Gua Daisy, Kalifornia dan Monte Verde, Chili, menunjuk pada sekelompok manusia yang melanglang turun ke pantai Pasifik di Amerika Utara dan Selatan jauh lebih awal, barangkali 30.000 tahun yang lalu.

Atlantik : Sisa-sisa peninggalan di Karolina Selatan mendorong para arkelogis berspekulasi bahwa para migran pertama mungkin tiba di pantai timur dari Eropa, meskipun bukti-bukti tersebut masih dipertentangkan.

BATU-LONCATAN MIGRASI:

1. Mulai abad es Amerika Utara. Studi DNA-mitochondrial menunjukkan migrasi paling awal (30.000 B.P).
2. Terbukanya jembatan benua Bering antara Asia dan Amerika Utara (25.000 tahun lalu).
3. Migrasi paling awal menurut studi Y-kromosom (20.000 tahun lalu).
4. Bukti-bukti tentang manusia di Amerika Selatan (15.000 tahun lalu).
5. Akhir abad es di Amerika Utara (10.000 tahun lalu).
6. Manusia Kennewick yang hidup di Pasifik Baratdaya (9.000 tahun lalu)
7. Fajar budaya Amerika Tengah seperti Olmek dan Maya (5.000 tahun lalu).

TIME-SH

RAMADHAN KH

Perginya Bapak 'Biografi'

"Menulis biografi tokoh terkenal itu tidak gampang, karena sering terperangkap antara keharusan menceritakan sisi baik dan kenyataan apa adanya".

Kesan ini dilontarkan Ramadhan KH, seorang sastrawan dan budayawan yang akhirnya menggeluti penulisan biografi para tokoh. Pengalamannya menulis kisah hidup para tokoh sering dihadapkan pada dilema itu. Namun, sebagai penulis yang sudah kenyang makan asam-garam, bagi Ramadhan, itu bukan suatu kendala. Nyatanya, di usianya yang sudah berkepala tujuh, ia masih rajin menulis biografi.

Kepiawaiannya di dunia sastra dan tulis menulis memang sudah diakui. Bahkan Ia tercatat sebagai satu-satunya sastrawan Indonesia yang mampu membuat puisi dengan format terbang kinanti. Karya Ramadhan disebut Sapardi Djoko Damono, sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia pada periode 1950-an, bersama WS Rendra dan Toto Sudarto Bachtiar.

Namun kini, masyarakat tak akan lagi menemukan karya-karya terbarunya. Pada Kamis (16/3), pukul 08.30, ayah dari pemain drum dan musisi Gilang Ramadhan ini menghadap sang Khalik. Ia meninggal di Cape Town, Afrika Selatan saat mendampingi sang istri, Salfrida Nasution menjalankan tugas sebagai Konjen di sana. Ia meninggal bertepatan dengan hari kelahirannya yang ke-79.

Kanker prostat yang telah dideritanya cukup lama, akhirnya melumpuhkan pertahanannya. Ia meninggalkan satu orang istri Salfrida Nasution, dan dua anak (Gumilang Ramadhan dan Gilang Ramadhan), serta lima cucu. Salfrida Nasution, bekerja di Konsulat Jenderal RI di Cape Town, adalah istri kedua Ramadhan yang dinikahi tahun 1993. Istri pertamanya, Pruistin Atmadjasaputra, telah lebih dahulu wafat (tahun 1990).

Kang Atun-panggilan akrab Ramadhan adalah anak ketujuh dari sepuluh bersaudara. Ia lahir di Bandung 16 Maret 1927 dari pasangan Raden Edjeh Kartadimadja dan Sadiyah. Saat Ramadhan kembali ke Indonesia dari perjalanannya

ke Eropa pada tahun 1954, ia menemukan tanah kelahirannya sedang bergejolak karena berbagai peristiwa separatis di Jawa Barat. Kekacauan sosial politik tersebut mengilhami Ramadhan untuk menulis tentang kumpulan puisi yang kemudian diterbitkan dalam buku yang berjudul *Priangan Si Djelita (1956)*. Oleh Sastrawan Sapardi Djoko Damono, buku

Gerbang (1981), kemudian ia menulis biografi tokoh-tokoh terkenal di Indonesia, seperti AE Kawilarang, Ali Sadikin, Hoegeng Imam Santoso, Mochtar Lubis, Didi Kartasmita, Kemal Idris, DI Panjaitan, Dewi Dja-Sripanggung Dardanella, Soemitro, dan Soeharto.

Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah buku *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, yang merupakan biografi mantan Presiden Soeharto. Buku tersebut dibuat saat Soeharto berada di puncak kekuasaannya tahun 1988. Proses penulisannya konon meninggalkan kesan yang dalam di hatinya. Tawaran menulis biografi datang saat Ramadhan mendampingi istrinya, Pruistin Atmajasaputra (almarhum) yang tengah bertugas sebagai diplomat di Jenewa, Swiss, pada 1985. G. Dwipayana sekretaris Soeharto membawa pesan itu jauh-jauh dari Jakarta. Berat bagi Ramadhan untuk menolak. Apalagi dorongan terbesar datang dari sang istri.

Akhirnya ia memutuskan untuk menerima tawaran itu. Proses buku ditulis sampai selesai, ia hanya bertemu Soeharto tiga kali. Buku otobiografi itu yang kemudian digunakan sebagai rujukan banyak orang termasuk peneliti luar negeri sebagai bahan studi. Setelah itu, permintaan penulisan biografi

pun mengalir dari sejumlah pejabat Orde Baru.

Dalam menulis, mertua artis Syahnaz Haque itu berkiblat pada keterangan sejarah. Meski mencatat riwayat hidup orang-orang dalam lingkaran kekuasaan, Ramadhan tidak goyah pendirian. Sikapnya tetap tegas dan bicaranya selalu apa adanya. ■ SR, RD



RAMADHAN KH (ALM)

tersebut dinilai sebagai puncak prestasi Ramadhan di dunia sastra Indonesia.

Perjalanan hidup membawanya menjadi penulis biografi terbaik di negeri ini. Selain itu ia juga dikenal sebagai penulis cerpen, puisi, dan novel, yang produktif. Hingga kini, tidak kurang 30 buku biografi dihasilkannya. Diawali dengan Biografi Inggit Garnasih, *Kuantar ke*

JEJAK KAUM YANG HILANG

Serombongan umat Islam yang baru saja menunaikan shalat Id berjamaah, keluar dari pintu gerbang Masjid Jamik Petolongan di kawasan Pekojan, Semarang, Jawa Tengah. Wajah ceria terpancar dari raut muka sejumlah orang yang sepintas dilihat mirip wajah orang Arab. Senyuman dari wajah yang khas itu berbau dengan senyuman yang terpancar dari wajah-wajah orang Jawa, yang juga bersembahyang di Masjid Jamik Petolongan.

Demikian cuplikan laporan yang pernah dimuat *Kompas*, 10 November 2005, tentang kehidupan penduduk Koja di Semarang.

Komunitas warga Koja Semarang selain terkonsentrasi di kawasan Pekojan dan Petolongan, juga tersebar di kawasan Pecinan Semarang, yakni di Jeruk Kingkit, Bonkenep atau Bonarum, Wotprau, Bustaman, Suburan, Pandean, Progo, Pemali, dan Pesanggrahan. Mereka memiliki tradisi tersendiri setiap Lebaran, hari-hari besar Islam, dan pernikahan.

Meski bertampang mirip orang Arab—seperti yang disangka kebanyakan orang Indonesia—komunikasi sehari-hari warga Koja Semarang menggunakan bahasa Jawa *ngoko* maupun *krama inggil*. Tak jarang logat khas Semarang seperti *he'eh* dan *iya ik*, terselip dalam obrolan mereka.

Komunitas Koja tidak hanya dijumpai di Semarang. Meski bertampang seperti orang Arab, sesungguhnya mereka adalah keturunan Tamil dan Gujarat di India, yang berinduk pada bangsa Pakistan.

Lain Semarang, lain Jakarta. Di Ibukota negara ini, penghuni kampung Pekojan kini bukan lagi keturunan India muslim, setelah pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-18 menetapkan Pekojan sebagai kampung Arab.

Sampai kini, masih terdapat Gang Koja—yang telah berganti nama jadi Jl Peng-



Menunaikan sholat jamaah di sebuah Masjid Pekojan

ukiran II. Di sini terdapat sebuah masjid kuno Al-Anshor yang dibangun pada 1648 oleh para Muslim India.

Tidak sampai satu kilometer dari tempat ini, masih di Kelurahan Pekojan, terdapat Masjid Kampung Baru yang dibangun pertengahan abad ke-18. Warga Muslim India yang telah menyebar di Jakarta, setiap Lebaran, shalat Id di masjid ini. Sambil bernostalgia mengenang para leluhurnya yang tinggal di kawasan ini.

Menjadi Kampung Arab

Di masa Hindia Belanda, para imigran yang datang dari Hadramaut (Yaman Selatan) ini diwajibkan lebih dulu tinggal di Pekojan. Dalam perkembangannya, Kampung Pekojan boleh dibilang cikal bakal dari sejumlah perkampungan Arab yang kemudian berkembang di Batavia. Dari tempat inilah mereka kemudian menyebar ke Krukut dan Sawah Besar (Jakarta Barat); Jatipetamburan, Tanah Abang, dan Kwitang (Jakarta Pusat); Jatinegara dan Cawang (Jakarta Timur).

Menurut jurnalis senior yang juga pengamat budaya Betawi, Alwi Shahab,

Prof LWC van den Berg, orientalis dan pakar hukum Belanda, pada tahun 1884-1886 pernah mengadakan penelitian mengenai orang Arab di Hadramaut dan Hindia Belanda. Ketika ia mengadakan penelitian itu, orang Koja sudah tidak ada lagi. Saat itu penduduk yang ada mayoritas Arab dan hanya beberapa gelintir Cina.

Seperti ditulisnya di harian *Republika*, di Cirebon juga terdapat kampung Pekojan. Pemerintah Belanda mengangkat seorang kapiten Arab pada 1845. Seperti juga di Batavia, kampung Arab di sini dulunya tempat tinggal orang India Muslim.

Pada 1872, koloni di Indramayu dipisahkan dari Cirebon dengan mengangkat seorang

kapiten (kepala koloni) Arab. Demikian pula di Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Bangil, Lumajang, Besuki, Banyuwangi, Surakarta, Sumenep, dan berbagai tempat di Nusantara terdapat kapiten Arab. Ini dimaksudkan, antara lain, untuk memisahkan keturunan Arab dengan pribumi.

Orang Koja umumnya berasal dari daerah Cutch, Kathiawar dan Gujarat, India. Mereka berasal dari kasta Ksatria. Pada abad ke-14, komunitas ini mengalami perubahan besar ketika seorang mubaligh Persia, Pir Sadrudin, menyebarkan agama Islam di antara mereka dan memberikan kepada mereka nama "Khwaja", dan dari kata ini diperoleh kata "khoja" atau "koja". "Khawaja" sendiri berarti "guru, orang yang dihormati dan cukup berada". Sementara, dalam bahasa India sendiri, Koja berarti 'orang hilang'.

Saat ini, baik di Semarang, Jakarta, maupun kota-kota lain, penduduk Pekojan telah berbaur dengan penduduk lainnya. Meski ada tradisi-tradisi tertentu yang berbeda dan tetap dipertahankan, hal itu memperkaya khasanah budaya Nusantara. ■ RH

ORANG KOJA SERINGKALI DIANGGAP KETURUNAN ARAB. NAMUN NENEK MOYANG MEREKA BERASAL DARI TAMIL DAN GUJARAT DI INDIA.

BACAAN PARA EKSEKUTIF



BERITAINDONESIA
MAJALAH BERITA PILIHAN

*All in One
One for All*



Century Bank everlasting growth

Kemilau sensasi hadiah dari:

Tabungan Century Mas

Gratis
Personal
Accident
hingga
Rp. 5 Milyar

Makin seru hadiahnya, tetap berlimpah keuntungannya

Tabungan Century Mas dengan keuntungan yang berlimpah, kini hadir dengan hadiah yang semakin seru. Mulai dari Mobil - Suzuki APV Type GL, Sepeda Motor - Suzuki Smash dan Logam Mulia 50 gr. Tabungan Century Mas juga memberikan perlindungan asuransi kecelakaan (Personal Accident) hingga Rp. 5 Milyar secara Gratis!

Segera hubungi kami untuk pembukaan Tabungan Century Mas, hadiah seru dari Tabungan Century Mas telah menanti anda.

Periode Februari s/d Mei 2006



**5 MOBIL
SUZUKI
APV**



**5 Motor
Suzuki
Smash**



**5 Keping Logam
Mulia 50 gr.**

PT BANK CENTURY, Tbk.
Kantor Pusat
Sentral Senayan I Building, 1st, 2nd, 16th floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, Indonesia
Telp. (021) 572 4180 (H) Fax. (021) 572 4443/46